

2012



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu 2005-2025



Pemerintah Kota Batu  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 2012

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum .....	I - 2
1.3. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 5
1.5. Maksud dan Tujuan .....	I - 6

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II -1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II -1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II -5
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	II -17
2.1.4. Demografi .....	II -20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II -23
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II -24
a. Pertumbuhan Ekonomi .....	II -27
b. Laju Inflasi .....	II -28
c. Pendapatan per Kapita .....	II -29
d. Daya Beli .....	II -30
2.2.2 Kesejahteraan Sosial .....	II -31
a. Pendidikan .....	II -31
b. Kesehatan .....	II -33
c. Kemiskinan .....	II -34
d. Kesempatan Kerja .....	II -36
e. Kriminalitas .....	II -38
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga .....	II -39
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II -41
2.3.1. Pelayanan Dasar .....	II -41
a. Pendidikan Dasar dan Menengah .....	II -41
b. Kesehatan .....	II -42
c. Lingkungan Hidup .....	II -44
d. Sarana dan Prasarana Umum .....	II -47
e. Penataan Ruang .....	II -49
f. Perhubungan .....	II -51
2.3.2. Pelayanan Penunjang .....	II -52
a. Penanaman Modal .....	II -52
b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	II -53
c. Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II -56
d. Ketenagakerjaan .....	II -57
e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II -58
f. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II -59
g. Komunikasi dan Informatika .....	II -61
h. Pertanahan .....	II -61
i. Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	II -61

j.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .....	II -62
k.	Pemuda dan Olahraga .....	II -65
2.4	Daya Saing Daerah .....	II -66
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II -66
2.4.2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .....	II -67
a.	Aksibilitas Daerah .....	II -67
b.	Penataan Wilayah .....	II -67
c.	Fasilitas Bank dan Non Bank .....	II -68
d.	Ketersediaan Air Bersih .....	II -70
e.	Fasilitas Listrik dan Telepon .....	II -71
f.	Ketersediaan Restoran .....	II -72
g.	Ketersediaan Hotel/Penginapan .....	II -73
2.4.3.	Iklm Investasi .....	II -75
a.	Keamanan dan Ketertiban .....	II -78
b.	Kemudahan Perijinan .....	II -79
c.	Status Desa .....	II -80
2.4.4.	Sumberdaya Manusia .....	II -80
a.	Kualitas Tenaga Kerja .....	II -80
b.	Tingkat Ketergantungan .....	II -81

### **BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

3.1	Analisis SWOT / Analisis ALI dan ALE .....	III-1
3.1.1	Lingkungan Internal .....	III -1
3.1.2	Lingkungan Eksternal .....	III -5
3.2.	Isu-isu Strategis .....	III- 7
3.2.1	Pendidikan dan Kesehatan .....	III -7
3.2.2	Kemiskinan dan Pengangguran .....	III -9
3.2.3	Revitalisasi Pertanian dan Pariwisata .....	III -10
3.2.4	Infrastruktur .....	III -12
3.2.5	Lingkungan .....	III -12
3.2.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	III -13
3.3	Modal Dasar .....	III-14

### **BAB IV VISI DAN MISI**

4.1	Visi .....	IV-1
4.2.	Misi .....	IV- 4
4.3	Strategi .....	IV-11

### **BAB V SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

5.1	Sasaran dan Arah Pembangunan Kota Batu .....	V - 1
5.1.1.	Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal .....	V -1
5.1.2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas .....	V -3
5.1.3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	V -9
5.1.4.	Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat .....	V -10
5.1.5.	Mewujudkan Pengembangan Kota Batu sebagai Kota Industri dan Perdagangan yang Berbasis Ekonomi Rakyat dan Berwawasan Lingkungan .....	V -11
5.2.	Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Batu .....	IV -18

5.2.1	Lima Tahun Pertama (RPJMD 2005-2010).....	IV -19
5.2.2	Lima Tahun Kedua (RPJMD 2011-2015).....	IV -23
5.2.3	Lima Tahun Ketiga (RPJMD 2016-2020).....	IV -28
5.2.4	Lima Tahun Keempat (RPJMD 2021-2025).....	IV -34

**BAB VI. KAJIAN PELAKSANAAN**

**BAB VII. PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemanfaatan Sumber Mata Air di Kota Batu Tahun 2007.....	II -3
Tabel 2.2	Penggunaan Tanah Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2008-2010.....	II -4
Tabel 2.2a	Perkembangan Sektor Pertanian Tahun 2009 dan 2010.....	II -6
Tabel 2.3	Luas Panen Tanaman Padi dan Palawija (Ha) Tahun 2006-2010.....	II -10
Tabel 2.4	Usaha Perdagangan per Kecamatan dan Golongan Tahun 2008-2010.....	II -11
Tabel 2.5	Potensi Pariwisata menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2010.....	II -14
Tabel 2.6	Sarana Akomodasi di kota Batu Tahun 2008 Berdasarkan Klasifikasi.....	II -11
Tabel 2.7	Sarana Akomodasi di Kota Batu Berdasarkan Jenis Tahun 2010.....	II -17
Tabel 2.8	Kejadian Bencana Alam menurut Jenis Kejadian Tahun 2010.....	II -11
Tabel 2.9	Penduduk Kota Batu Berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2007-2011.....	II -20
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota batu Tahun 2009 dan 2010.....	II -21
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2007 dan 2011.....	II -22
Tabel 2.12	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha.....	II -22
Tabel 2.13	Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Selama Tahun 2008-2011.....	II -23
Tabel 2.14	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2009 ADHB.....	II -25
Tabel 2.15	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2009 ADHK Tahun 2000.....	II -26
Tabel 2.16	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006-2009.....	II -26
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Tahun 2007-2011.....	II -27
Tabel 2.18	Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2005-2009.....	II -28
Tabel 2.18	Perkembangan Sektoral PDRB Atas dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009.....	II -15
Tabel 2.19	Indeks PPP Kota Batu Tahun 2005-2011.....	II -30
Tabel 2.20	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batu Tahun 2007-2011.....	II -32
Tabel 2.21	Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kota batu Tahun 2007-2011.....	II -32
Tabel 2.22	Angka Harapan Hidup dan Indeks Harapan Hidup Kota Batu Tahun 2007-2011.....	II -33
Tabel 2.23	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Batu Tahun 2007-2011.....	II -37
Tabel 2.24	Banyaknya Kejahatan Menurut Jenis Tindakan Pidana Tahun 2008-2010.....	II -39
Tabel 2.25	Organisasi Kesenian dan Budaya Kota Batu Tahun 2010.....	II -40
Tabel 2.26	Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2008/2009.....	II -41
Tabel 2.27	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota batu Tahun 2005 s/d 2009.....	II -42
Tabel 2.28	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Batu Tahun 2008-2010.....	II -43
Tabel 2.29	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi (Ha) Tahun 2008-2010.....	II -47
Tabel 2.30	Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Permukaan Jalan Tahun 2008-2010.....	II -48
Tabel 2.31	Koperasi Dirinci Menurut Sifat Usaha Tahun 2008-2010.....	II -54

Tabel 2.32	Pemilik Surat Tanda Usaha Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2008-2010 .....	II -55
Tabel 2.33	Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2008-2010 .....	II -56
Tabel 2.34	Kekuatan Potensi Hansip Menurut Pendidikan Tahun 2008-2010.....	II -63
Tabel 2.35	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008-2010 .....	II -65
Tabel 2.36	Jumlah Kantor Bank Menurut Jenis Bank Tahun 2007-2010 .....	II -69
Tabel 2.37	Perkembangan Pelanggan dan Pemakaian Air PDAM Kota Batu Tahun 2008-2010 .....	II -70
Tabel 2.38	Banyaknya Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Listrik Yang Terjual Menurut Golongan Tahun 2010 .....	II -71
Tabel 2.39	Banyaknya Pelanggan, Daya, dan Pemakaian Listrik Yang Terjual Menurut Golongan Tahun 2010 .....	II -72
Tabel 2.40	Banyaknya PelangganTelpon di Kota Batu Tahun 2010.....	II -72
Tabel 2.41	Sarana Akomodasi di Kota Batu Berdasarkan Jenis Tahun 2010.....	II -73
Tabel 2.42	Distribusi Kredit Perbankan di Kota Batu (Rp. Juta).....	II -76
Tabel 2.43	Klasifikasi Desa/Kelurahan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010.....	II -80
Tabel 2.44	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Batu Tahun 2006 s/d 2009 .....	II -81
Tabel 2.42	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Batu .....	II -82
Tabel 5.1	Target Pencapaian Pembangunan Pada Tahun 2010 .....	V -19
Tabel 5.2	Target Pencapaian Pembangunan Pada Tahun 2015 .....	V -23
Tabel 5.3	Target Pencapaian Pembangunan Pada Tahun 2020 .....	V -29
Tabel 5.4	Target Pencapaian Pembangunan Pada Tahun 2025 .....	V -35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RPJPD dalam Hirarki Rencana Pembangunan .....	I -4
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Batu .....	II -4
Gambar 2.2	Kontribusi Relatif Terhadap LPE Kota Batu.....	II -6
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Batu Tahun 2010 .....	II -21
Gambar 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Antar Waktu Kota Batu Tahun 2005-2011 .....	II -23
Gambar 2.5	Sebaran Posisi IPM Daerah di Jawa Timur .....	II -24
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kota Batu Tahun 2006-2011 .....	II -27
Gambar 2.7	Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan/kapita Kota Batu Antar Waktu (2005-2011).....	II -29
Gambar 2.8	Perbandingan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2009 .....	II -29
Gambar 2.9	Sebaran Posisi Indeks Daya Beli di Provinsi Jawa Timur .....	II -31
Gambar 2.10	Sebaran Posisi Indeks Pendidikan di Jawa Timur.....	II -32
Gambar 2.11	Perkembangan AKB dan AHH Kota Batu .....	II -33
Gambar 2.12	Sebaran Posisi Indeks Kesehatan di Provinsi Jawa Timur .....	II -34
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Miskin di Kota Batu Tahun 2005-2011 .....	II -35
Gambar 2.14	Tingkat Kemiskinan dan TPT di Jawa Timur Tahun 2009 .....	II -36
Gambar 2.15	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Batu Tahun 2005-2011 .....	II -38
Gambar 2.16	Peta Rencana Struktur Ruang Perkotaan Provinsi Jawa Timur.....	II -50
Gambar 2.17	Peta Struktur Ruang Kota Batu.....	II -50
Gambar 2.18	Indikator Pertumbuhan Investasi di Kota Batu Tahun 2005-2011.....	II -76
Gambar 2.19	Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu Tahun 2005-2011.....	II -77
Gambar 4.1	Strategi Pembangunan Jangka Panjang Kota Batu 2005-2025.....	IV -12
Gambar 4.2	Strategi Pembangunan Daerah Berdasar SWOT.....	IV -13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kota Batu di era global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan kota di segala bidang. Kota Batu di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, serta perkembangan IPTEK yang semakin memperkuat pengaruh sosial-budaya masyarakat. Isu-isu global yang harus diperhatikan dalam pembangunan antara lain; akan dihapusnya hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas (WTO) pada tahun 2015; isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan; *millenium development goal's* sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera; serta isu-isu demokratisasi dan HAM dengan menempatkan pendekatan partisipasi pembangunan secara proporsional.

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing (*capacity building*) menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Batu, tetap mengacu pada dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) sesuai dengan UU No 17 tahun 2007, dan Perda No. 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan (*road map*) yang efektif.

Upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah di dalam sistem pembangunan nasional, memiliki konsekuensi bahwa seluruh pemerintah daerah baik Provinsi serta Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selain peraturan perundang-undangan di atas, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Memperhatikan amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang menimbulkan dampak yang signifikan bagi kualitas kehidupan masyarakat Kota Batu dalam jangka panjang; maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025. RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan, sehingga tidak terlalu terasa dalam jangka pendek dan jangka menengah; tetapi dapat menimbulkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perubahan sedemikian antara lain terjadi pada aspek demografi, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.

RPJPD Kota Batu 2006-2025 disusun dengan pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel

dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar, dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Batu untuk menentukan dan menetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat (partisipatif). Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

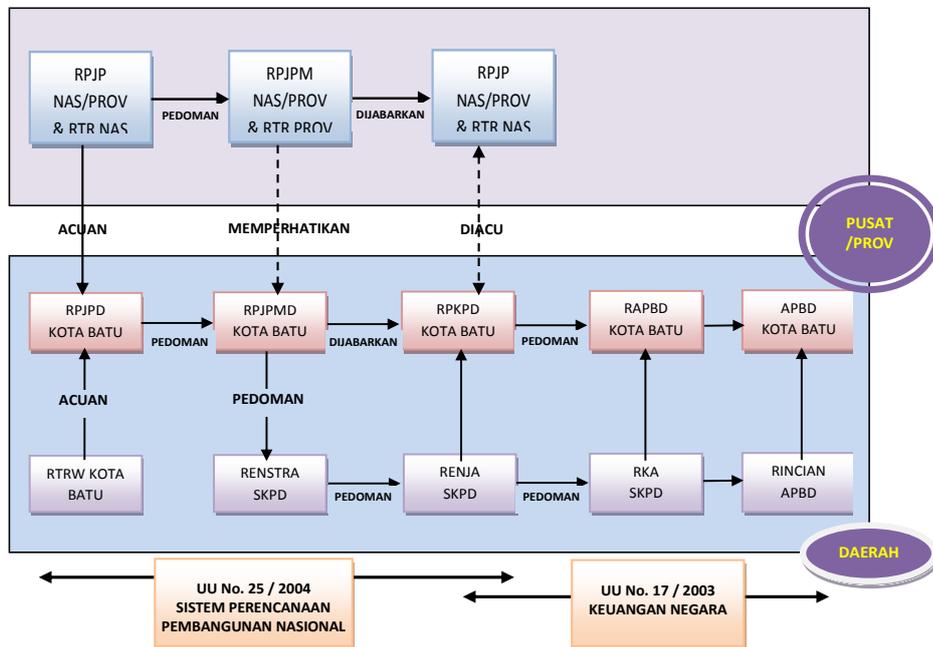
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.

### **1.3. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan rencana pembangunan Kota Batu tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Penyusunan RPJP Daerah Kota Batu berpedoman dan mengacu serta memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lokal, provinsi maupun pusat. Di tingkat lokal, RPJP daerah berpedoman dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu, Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan keterkaitan dengan pemerintah pusat adalah RPJPD Kota Batu ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional dan RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah.

Keterkaitan antara RPJP Kota Batu dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RPJPD Kota Batu**  
**dalam Hirarki Rencana Pembangunan Provinsi dan Nasional**



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dokumen RPJPD Kota Batu yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2005-2025 merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pembangunan di Kota Batu dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RPJPD Kota Batu berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya RPJPD harus dijabarkan lebih operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pentahapan RPJMD disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Setelah menyusun RPJMD, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Renstra-SKPD berisi gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Renja-SKPD tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan SKPD.

Renja-SKPD yang telah disusun, selanjutnya diintisarikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisi prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan. Dengan berbagai dokumen dan tahapan rencana pembangunan daerah yang sistematis dan terintegrasi baik secara vertikal dan horizontal, diharapkan target pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata dapat terwujud.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Tata urutan RPJPD Kota Batu 2005-2025 disusun dengan mengacu pada tata urutan RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Kota Batu. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa RPJP Nasional merupakan induk yang tidak terpisahkan dengan RPJP Daerah. Pola pengembangan dan isi disesuaikan dengan muatan dan unsur yang dimiliki. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJPD Kota Batu dengan dokumen lain yang relevan seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW Kota Batu, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisi (1) Aspek Geografi dan Demografi yang mencakup (a) Karakteristik lokasi dan wilayah; (b) Potensi pengembangan wilayah; (c) Wilayah rawan bencana; (d) Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.

#### **BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan di masa mendatang termasuk pembahasan terhadap (1) Permasalahan Pembangunan Daerah dan (2) Isu-isu Strategis. Analisis yang dilakukan meliputi Perumusan permasalahan pembangunan daerah, Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Sekitar, serta Penelaahan RPJPD Provinsi. Analisis isu strategis berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional yang meliputi isu yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

## **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Memaparkan Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batu 2005-2025 serta keterkaitannya dengan RPJPD provinsi Jawa Timur.

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Bab ini menggambarkan Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta Tahapan dan Prioritas yang ditetapkan.

## **BAB VI Kaidah Pelaksanaan**

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD. Dalam bagian ini ditekankan bahwa RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD dalam kurun waktu lima tahunan serta Kaidah Pelaksanaan.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah Kota Batu dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan. Maksud penyusunan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 adalah untuk menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Batu selama 20 (duapuluh) tahun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu 2005-2025 memuat kondisi umum, visi, misi serta arah pembangunan Kota Batu dalam kurun waktu 2005-2025. Oleh karena itu substansi materi RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD).

#### **1.5.1 Maksud**

RPJPD Kota Batu 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.

#### **1.5.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Batu adalah:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, dengan pemerintah propinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan.

2. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah Kota Batu.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kota Batu sesuai dengan kondisi, potensi dan prospek pengembangan yang berazaskan kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjaga kesinambungan pembangunan Kota Batu dalam periode lima tahunan yang dituangkan dalam RPJM Daerah Kota Batu.
5. Menjamin kepastian arah pembangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Sebelum menjadi daerah otonom Kota Batu merupakan Kota Administratif bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Semenjak reformasi berjalan, semangat otonomi mulai tumbuh di kalangan masyarakat Kota Batu guna memaksimalkan kegiatan pembangunan di Kota Batu. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah dengan memisahkan diri dari Kabupaten Malang agar kegiatan pembangunan dan penggalian potensi-potensi yang ada di Kota Batu dapat dilakukan secara lebih intensif, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Batu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu *icon* pariwisata di Jawa Timur yang terletak kurang lebih 100 Km ke arah Selatan Surabaya, atau terletak di sebelah Barat Laut Kota Malang. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara  $7^{\circ}44',55,11''$  sampai dengan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan dan  $122^{\circ}17',10,90''$  sampai dengan  $122^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah  $199.087 \text{ km}^2$  atau 19.908,72 hektar (berdasarkan hasil perhitungan peta Bakosurtanal 2001). Batas Wilayah Kota Batu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Di antara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Pandoman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Sedangkan kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25 - 40% dan kemiringan > 40.

Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelas, yaitu:

##### a. 600 - 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah:

1. Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto.
2. Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung)

3. Kecamatan Bumiaji (terutama pada sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji)

**b. 1.000 - 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha**

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

**c. 1.500 - 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha**

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong serta Gunung Punuksari. Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji, seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.

**d. 2.000 - 2.500 DPL dengan luas 1.789,81 Ha**

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji, ketinggian ini berada di sekitar Gunung Anjasmoro dan pada sebagian kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa sumbergondo dan Desa Torongrejo.

**e. 2.500 - 3.000 DPL dengan luas 707,32 Ha**

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

**f. > 3.000 DPL dengan luas 78,29 Ha**

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah pada beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa sumbergondo), Gunung Kembar dan Gunung Wlirang (Desa Tulungrejo).

Sedangkan kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta konturBakosurtanal 2001 diketahui bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25-40% dan kemiringan > 40. Rincian mengenai kemiringan ini adalah:

- 0 - 8% seluas 2.207,21 Ha.
- 8 - 15% seluas 2.223,73 Ha.
- 15-25% seluas 1.799,37 Ha.
- 25 - 40% seluas 4.529,85 Ha.
- > 40% seluas 4.493, 33 Ha.

Dilihat dari formasi geologi di atas menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilinginya sehingga mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian. Kota Batu secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau. Endapan hasil aktifitas gunung api ini sering disebut endapan Epiklastik dan Tiroklastika. Kota Batu merupakan daerah pegunungan dengan hawa dingin dengan suhu udara 21,3°C dan 34,2 °C. Adapun Kota Batu memiliki 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi hidrologi Kota Batu banyak di pengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota, sehingga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan kota. Hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi 3 (tiga ) jenis yaitu air permukaan, air tanah dan sumber mata air. Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan.

Banyaknya volume air bersih pada Tahun 2009 mencapai 2.309.699 M<sup>3</sup>. Dari jumlah tersebut, sekitar 88,68 persen di antaranya dikonsumsi kelompok non niaga, sekitar 4,15 persen dikonsumsi kelompok niaga, dan 4,18 persen dikonsumsi kelompok sosial Sedangkan kelompok lain proporsinya masih sangat kecil. Sumber mata air di Kota Batu yang dimanfaatkan untuk PDAM dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut;

**Tabel 2.1.**

**Pemanfaatan Sumber Mata Air di Kota Batu tahun 2007**

No	Nama Sumber	Kapasitas		Produksi					Daerah Pelayanan
		Sum ber	Terpa sang	2004	2005	2006	2007	Sat	
1	Sumber Darmi	22 ltr/det	19 ltr/det	9	12	12	12	Ltr/dtk	Desa Oro-oro Ombo, Ngaglik, Temas
2	Sumber Banyuning	200 ltr/det	52 ltr/det	38	39	40	40	Ltr/dtk	Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas
3	Sumber Gemulo 1	25 ltr/det	10 ltr/det	6	6	8	8	Ltr/dtk	Desa Sisir
4	Sumber Gemulo 2	35 ltr/det	15 ltr/det	4	4	6	6	Ltr/dtk	Desa Pandanrejo
5	Sumber Gemulo 3	100 ltr/det	25 ltr/det	4	4	12	12	Ltr/dtk	Desa Temas, Beji, Sisir dan Mojorejo
6	Sumber Torong Belok	6 ltr/det	6 ltr/det	4	4	4	4	Ltr/dtk	Desa Songgokerto dan Pesanggrahan
7	Sumber Kasinan	8 ltr/det	3 ltr/det	3.5	3.5	3.5	3.5	Ltr/dtk	Desa Pesanggrahan
8	Sumber Ngesong 1 (LAMA)	112 ltr/det	5 ltr/det	4	4	4	4	Ltr/dtk	Desa Sumberejo dan Desa Sabtean
	Sumber Ngesong 2 (KOTA)		9 ltr/det	8	8.5	8.5	8.5	Ltr/dtk	Jl. Panglima Sudirman
	Sumber Ngesong 3 (PROP)		11 ltr/det		8.5	10.5	12	Ltr/dtk	Desa Sumberejo dan Desa Sabtean
9	Sumber Cemoro Kandang	4 ltr/det	2,5 ltr/det	2	2	2	2	Ltr/dtk	Panderman Hill

Sumber : PDAM Kota Batu, 2007

Pada umumnya di Kota Batu musim hujan dimulai pada Bulan Agustus dan diakhiri Bulan Juni. Curah hujan pada tahun 2009 tercatat mencapai rata-rata 130,45 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 60 hari. Pada periode sebelumnya, rata-rata tinggi curah hujan mencapai 153,08 mm/bulan dengan jumlah hari hujan mencapai 138 hari. Tingkat kelembaban udara hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur yaitu sebesar 21 (minimum) pada bulan Oktober dan pada bulan Mei mencapai sebesar 98 (maksimum).

Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yang terdiri atas 20 (duapuluh) Desa dan 4 (empat) Kelurahan. Ke tiga wilayah Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo. Gambar 2.1 menunjukkan peta wilayah administratif dan letak Kota Batu di wilayah provinsi Jawa Timur.

**Gambar 2.1**

**Peta Wilayah Administrasi Kota Batu**



Pada Tahun 2009, jumlah lahan tanah sawah di Kota Batu seluas 2.661,00 ha dengan rincian 2.072 ha perairan teknis, 476 ha perairan setengah teknis dan sisanya perairan sederhana. Dipihak lain, luas lahan kering yang mencakup pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/ kebun/lading, tambak, hutan dan kolam seluas 6.109,57 ha

**Tabel 2.2.**  
**Penggunaan Tanah Dirinci Menurut Kecamatan (Ha)**  
**Tahun 2008-2010**

	Kecamatan	Sawah	Bukan Sawah	Jumlah
	<b>2010</b>			
1.	Batu	591.00	3,954.81	4,545.81
2.	Junrejo	1,108.00	1,457.02	2,565.02
3.	Bumiaji	814.00	11,983.89	12,797.89
	<b>2009</b>			
1.	Batu	727.00	3,818.81	4,545.81
2.	Junrejo	1,109.00	1,456.02	2,565.02
3.	Bumiaji	825.00	11,972.89	12,797.89
	<b>2008</b>			
1.	Batu	594.00	3,951.81	4,545.81

2.	Junrejo	1109.00	1,456.02	2,565.02
3.	Bumiaji	825.00	11,972.89	12,797.89

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011

Sedangkan permukiman di wilayah Kota Batu terdiri atas 2 jenis yaitu jenis permukiman/perumahan alami dan permukiman estate. Bangunan permukiman tersebut hampir semuanya merupakan bangunan permanen dengan kondisi bangunan yang beragam. Kawasan perumahan/permukiman penduduk umumnya tersebar merata di setiap wilayah yang ada Kota Batu dengan pola linier. Kepadatan paling tinggi berada di Kecamatan Batu yaitu di Kelurahan Pesanggrahan tepatnya di sekitar Jalan Panglima Sudirman, Jalan Hasanudin, Jalan Samadi, Jalan Cempaka.

Sebagai kesatuan wilayah yang memiliki hutan, luas kawasan hutan lindung adalah sebesar 5197,40 Ha menyebar di seluruh kecamatan. Wilayah kecamatan yang memiliki hutan lindung terluas adalah kecamatan Bumiaji yaitu 3674,40 Ha, selanjutnya Kecamatan Junrejo sebesar 810,20 Ha dan yang terakhir Kecamatan Batu sebesar 622,80 Ha. Tahura R. Soeryo memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi selain flora dan fauna serta pemandangan alam yang indah pada kawasan tersebut terdapat juga tempat pemandian sumber air panas, Arboretum Cangar yaitu tempat koleksi tanaman langka, Arboretum Sumber Brantas, Gua-gua Jepang, Petapaan Abiyoso, Padang Rumput Lalijiwo, Pondok Welirang, Puncak Welirang dan Petapaan Indrokilo. Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan di antaranya lintas alam, menikmati pemandangan alam pegunungan, berkemah, mandi air panas dan lain-lain. Kawasan Hutan Lindung ini berdasarkan kriteria diarahkan pada Kawasan Hutan sebelah Utara, Barat Laut, Timur Laut Kota Batu (masuk wilayah Tahura R. Suryo) yaitu di kawasan G. Arjuno, G. Kembar, G. Welirang, G. Tunggangan, G. Anjasmoro dan G. Rawung. Sedangkan Kawasan Hutan sebelah Barat Daya (masuk wilayah Perum. Perhutani) yaitu di kawasan G. Srandil, G. Panderman, G. Bokong dan G. Punuksapi.

Dari sisi energi, kebutuhan akan sarana penerangan dan energi dari pelayanan kelistrikan telah menjadi suatu bagian kebutuhan yang sulit untuk dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini terlebih khusus masyarakat perkotaan. Hampir semua kelurahan/desa yang ada di Kota Batu telah dilayani oleh tenaga listrik dan penyaluran tenaga listrik di Kota Batu menggunakan kawat saluran udara.

Kontribusi perusahaan Indus-tri pengolahan dalam pembelian listrik dari PT PLN adalah cukup besar artinya, karena sekitar 5.526 juta kwh berasal dari golongan tarif industri. Ini berarti jumlah listrik yang dibeli kelompok golongan industri mencapai 6,3 persen dari seluruh listrik yang terjual atau berada di urutan keempat setelah golongan rumah tangga, bisnis dan pemerintah.

### 2.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Pengelolaan sumberdaya alam Kota Batu yang potensial secara ekonomis masih belum optimal dan intensif. Pada dasarnya Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendatangkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Potensi itu meliputi pengembangan wisata, hasil pertanian dan air bersih. Selama ini, permasalahannya terletak pada relatif masih kurangnya investasi atau penanaman modal dalam mengembangkan usaha, meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha, penggunaan teknologi pengelolaan dan modal kerja yang cukup serta masih rendahnya kualitas angkatan kerja mengingat latar belakang pendidikan penduduk secara umum masih rendah dan belum sepenuhnya mengarah pada penguasaan dan pemanfaatan iptek.

Terkait dengan potensi wilayah, dalam struktur perekonomian Kota Batu, sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati ranking tertinggi sebagai penopang laju pertumbuhan PDRB ADHB, yakni mencapai sebesar 46,32 %. Kondisi tersebut sesuai dengan ikon Kota Batu yang menempatkan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor wisata mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Secara umum struktur tanah Kota Batu merupakan lahan subur untuk pertanian. Sektor pertanian dengan sub-sistem perikanan dan peternakan dijadikan salah satu potensi unggulan pembangunan daerah Kota Batu. Produksi pertanian yang berpotensi antara lain tanaman sayur, tanaman padi dan palawija, buah, budidaya semi insentif perikanan, peternakan sapi perah dan kelinci. Salah satu potensi di bidang pertanian yang menjadikan Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman hortikultura, yang meliputi beragam jenis sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.

**Tabel 2.2a**  
**Perkembangan Sektor Pertanian**  
**Tahun 2009 dan 2010**

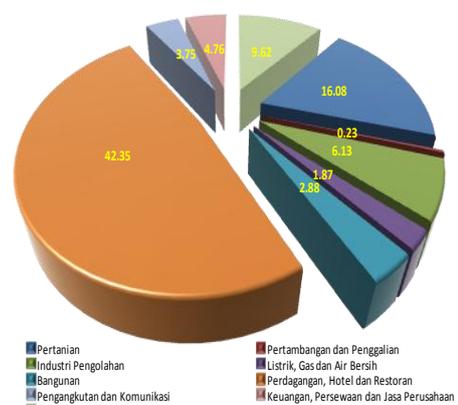
No	Kriteria	2009	2010
1	Luas lahan Tanah Sawah	2.528 ha	n.a
2	Luas lahan Kering	5.607,75 ha	n.a
3	Luas Panen Padi	1.125 ha	1.458 ha
4	Luas Panen Palawija	1.415 ha	3.111 ha
5	Produksi Padi	5.958,46 Ton	9.404,92 ton
6	Produksi Telur	613,16 Ton	42.262 btr
7	Produksi Susu	7.729,48 Ltr	10.189,34 Ltr

Sumber : BPS Kota Batu dan Dinas Pertanian dan Kehutanan - 2010

Meskipun kontribusi sektor ini dalam menyusun PDRB tidak sebesar sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun mampu menampung banyak tenaga kerja dan mempunyai fungsi strategis serta besarnya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan Kota Batu. Data penting yang berkaitan dengan perkembangan sektor pertanian di Kota Batu dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Gambar 2.2.

Untuk lebih mengembangkan sektor pertanian ini, Pemerintah Kota Batu mempunyai komitmen penerapan sistem pertanian organik melalui BATU GOES ORGANIC yang akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu.

**Gambar 2.2**  
**Kontribusi Relatif terhadap LPE Kota Batu**



Pertanian organik bisa diwujudkan pada tanah kas desa dengan dukungan ADD (Alokasi Dana Desa) dengan skema penggunaan ADD merupakan salah satu syarat pencairan dalam tahun anggaran. Sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) penggunaan ADD. Program *Go Organic* merupakan program utama Pemerintah Kota Batu di tahun-tahun mendatang guna mendukung pengembangan pertanian dan agropolitan. Dengan begitu program tersebut harus dilaksanakan, termasuk oleh pemerintah desa. Kebijakan diambil dengan mensyaratkan setiap desa menyediakan lahan dari kas desa atau tanah kelurahan khusus menanam produk pertanian yang bebas bahan kimia. Diharapkan hal tersebut akan mampu memberikan *image* bahwa produk pertanian asal Kota Batu lebih aman dikonsumsi karena bebas bahan kimia.

Di samping itu, pariwisata merupakan salah satu potensi Kota Batu selain pertanian, Industri ini meliputi penginapan dan sarana akomodasi lainnya. Pemerintah Kota Batu terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan potensi pariwisata karena wilayah ini telah dikenal baik di tingkat regional maupun nasional. Pada tahun 2011, pemerintah berupaya mengaktifkan potensi 14 obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki hingga saat ini, antara lain:

- a) Pemandian selecta
- b) Kusuma Agro Wisata
- c) Jatim Park 1
- d) Jatim Park 2 ( Museum Satwa dan Batu Secret Zoo )
- e) Air Panas Cangar
- f) Pemandian Songgoriti
- g) Batu Night Spectacular (BNS)
- h) Petik Apel "Makmur Abadi"
- i) Vihara "Dammadhupa Arama"
- j) Beji Outbond
- k) Rafting Kaliwatu
- l) Ingu Laut Florist
- m) Kampoeng Kidz
- n) Banyu Brantas Rafting

Secara alami dan dengan sendirinya Kota Batu sudah terbentuk citra sebagai kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Potensi daerah di bidang wisata dan pertanian menjadi komoditi andalan yang kompetitif. Sektor agrowisata atau wisata pertanian merupakan salah satu pilihan untuk dikembangkan di Kota Batu dengan memanfaatkan potensi pertanian dan potensi wisata yang ada.

Pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata berbasis Pertanian yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Batu tahun 2007 - 2012 ini memperoleh respon positif dari masyarakat dikarenakan masyarakat Kota Batu umumnya telah lama berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya, terutama mengambil manfaat dari lahan-lahan pertanian, hasil peternakan dan hasil perikanan dan jasa pariwisata bagi keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya usaha-usaha pengembangan yang ditujukan pada sektor pariwisata dan pertanian tersebut maka bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Sektor Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungannya yang kondusif, akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkan potensi pertanian dan sekaligus bisa dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh. Mulai dari hasil produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanaman hias, bunga potong serta hasil produksi buah-buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan yang tak kalah menarik adalah hasil produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk pertanian yang lain. Di antara obyek wisata yang berbasis pertanian di Kota Batu antara lain:

1. Tanaman Hias di sepanjang Jl. Bukit Berbunga Desa Sidomulyo
2. Pasar Bunga dan STA (Sub Terminal Agribisnis) Desa Sidomulyo
3. Wisata Ikan (kolam dan kuliner) di PBI (Pasar Benih Ikan) Desa Sidomulyo.
4. Wisata Selektta dengan pedagang bunga dan buah apel serta pangan olahan untuk oleh-oleh.
5. Wisata hutan rakyat di Cagar Desa Sumberbrantas.
6. Wisata Bunga Potong (Krisan) di Perusahaan Inggau Laut Desa Tulungrejo.
7. Wisata Bunga Potong (Mawar) di Desa Gunungsari.
8. Wisata petik Apel, Jambu biji dan Strawberi di Kusuma Agrowisata Batu.
9. Wisata Desa Ternak Sapi Perah di Desa Oro-oro Ombo.

Sebagai pendukung sub sektor pariwisata, jumlah hotel dan penginapan yang tercatat di BPS Kota Batu tahun 2007 sebanyak 382 buah, sedangkan jumlah tamu yang menginap di hotel tercatat 482.372 orang. Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata meningkat dari 1.906.170 pada tahun 2009 menjadi 2.178.794 orang pada tahun 2010. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dari 14 ODTW yang ada di Kota Batu mencapai berkisar 2.584.777 orang.

Selain berbagai potensi sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data kajian dari Provinsi Jawa Timur, Kota Batu memiliki potensi cadangan energi alternatif yakni geothermal (panas bumi) yang sampai saat ini belum dapat dikelola mengingat keterbatasan anggaran pembiayaan. Potensi geothermal tersebut antara lain terdapat di Songgoriti sebanyak 25 Mwe dan Cagar sebanyak 100 Mwe.

Dalam upaya pengembangan energi alternatif, khusus untuk tahun 2011 Pemerintah Kota Batu melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro. Proses PLTS sinar matahari diterima *solar cell* dan menimbulkan arus listrik yang disimpan dalam aki (mengisi aki), selanjutnya disalurkan ke bola lampu untuk penerangan listrik. Selain itu, telah dibangun instalasi gas *methane* melalui pemanfaatan sampah masyarakat di desa Tlekung yang diproyeksikan menghasilkan listrik mencapai 5.000 sampai dengan 15.000 watt.

Potensi lainnya adalah kemungkinan pembuatan bio gas dari bahan organik mengingat Kota Batu masih memiliki kawasan hutan yang cukup besar serta kawasan agropolitan. Proses bio gas bahan organik (seperti kotoran ternak, kotoran manusia, jerami sekam dan daun-daun hasil sortiran) dimasukkan di gester, lalu terjadi proses petanisasi secara anaerobik untuk menghasilkan energi biogas dan pupuk organik cair/padat.

Sesuai dengan kondisi geografis maupun geomorfologis, sebagian besar penduduk Kota Batu mengandalkan aktivitas ekonomi pada sektor primer sebagai sumber mata pencaharian, terutama pada sub sektor pertanian pangan, peternakan dan perikanan. Bidang pertanian selama ini masih mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effects* yang besar, karena sekitar 40 % masyarakat Kota Batu menggantungkan hidupnya di sektor ini. Selain itu, mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian di Kota Batu diupayakan sinergis dengan pembangunan sektor lainnya bahkan merupakan titik pusat sebagai penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis dan masih menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi menjadi berkelanjutan. Peningkatan usaha pertanian diupayakan didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk menjadikan pertanian Kota batu menjadi salah satu pusat pertanian Jawa Timur terutama dalam pengembangan komoditi hortikultura. Selain itu, dilakukan pengetatan kebijakan untuk menahan laju konversi lahan pertanian yang terus mengancam seiring dengan peningkatan kebutuhan lahan pemukiman dan peningkatan sektor industri dan jasa yang tentunya membutuhkan lahan untuk perkantoran dan tempat produksi.

Terkait dengan hal ini, potensi sub sektor peternakan di Kota Batu cukup besar yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya produksi budidaya sapi perah dan sapi potong, kambing, kelinci dan ayam ras potong maupun petelur. Namun demikian konsumsi protein hewani asal ternak masih perlu dipacu agar lebih meningkat.

Di bidang kehutanan, Kota Batu memiliki sumberdaya hutan seluas 11.227 Ha atau meliputi hampir kurang lebih 56,4% dari luas wilayah Kota Batu dengan potensi yang memadai, namun demikian keberadaan kawasan hutan tersebut belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kondisi sumberdaya hutan tersebut secara umum telah dan sedang mengalami proses degradasi fungsi secara serius baik disebabkan oleh penjarahan, perambahan, maupun kebakaran, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Kota Batu adalah salah satu daerah yang kurang cocok untuk dijadikan daerah kawasan industri karena kondisi geografis yang kurang mendukung. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur, keberadaannya kawasan industri akan mengganggu kelestarian lingkungan. Namun bukan berarti industri kecil dan kerajinan rumah tangga tidak diberdayakan, karena kontribusinya yang cukup signifikan dalam memben-tuk PDRB Kota Batu.

#### **a. Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan**

Secara umum kontribusi sektor pertanian Kota Batu dalam Produk Domestik Regional Bruto tidaklah sebesar sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun besarnya tenaga kerja yang ditampung oleh sektor ini berfungsi strategis dan besarnya sumberdaya dapat dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan. Keuntungan tersebut yang harus digali untuk meningkatkan peran sektor pertanian pada pendapatan regional. Namun di sisi lain, kepentingan petani sebagai produsen juga diperhatikan. Di bidang pertanian, penurunan produksi yang pernah pada tahun-tahun lalu antara lain disebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas karena pergantian pola musim, masalah pupuk, menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, rendahnya akses ke sumber daya produkif, belum optimalnya sistem penyuluhan, sistem irigasi mengalami penurunan (kuantitas dan kualitas), serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali

Potensi tanaman hortikultura yang mempunyai nilai komersial tinggi bila ditangani secara baik akan menjadi Wisata Agro, Agro Industri, dan Agro Bisnis. Sehingga kemasannya wisata berbasis pada produksi pertanian hortikultura merupakan modal pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Batu. Produk-produk unggulan di atas memiliki peluang pasar di kota-kota lain cukup besar. Permintaan barang sangat banyak namun kapasitas produksinya masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan, sehingga kapasitas produksi perlu dilakukan pembenahan dengan jalan promosi dan pemasaran secara maksimal dan ada pembenahan tempat industri yang lebih representatif yang memungkinkan perusahaan dapat memproduksi secara optimal. Sedangkan untuk pesaing dari luar Kota Batu dapat diantisipasi dengan membuat jaringan pemasaran yang didukung oleh rantai nilai (*value chain*), rantai penawaran (*supply chain*), dan rantai permintaan (*demand chain*) yang dilakukan melalui pembentukan klaster-klaster berbasis potensi lokal.

Pada Tahun 2009, jumlah lahan tanah sawah di Kota Batu seluas 2.661,00 ha dengan rincian 2.072 ha perairan teknis, 476 ha perairan setengah teknis dan sisanya perairan sederhana. Sedangkan luas lahan kering yang mencakup pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/ kebun/lading, tambak, hutan dan kolam seluas 6.109,57 ha. Pada Tahun tersebut, produksi padi di Kota Batu mengalami kenaikan yaitu dari 7.688 ton menjadi 7.908 ton, yang berarti meningkat sebesar 2,86 persen. Kenaikan produksi padi tidak diikuti bertambahnya luas panen, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan produksi disebabkan oleh produktivitas tanaman padi yang meningkat akibat penerapan intensifikasi. Hal ini terjadi juga pada tanaman palawija. Perkembangan luas panen sebagaimana terlihat di Tabel 2.3. berikut

**Tabel 2.3.**  
**Luas Panen Tanaman Padi dan Palawija (Ha)**  
**Tahun 2006-2010**

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Padi Sawah	1,053	1,125	1,240	1,155	1,298
Padi Ladang	-	-	-		12
<b>Jumlah</b>	<b>1,053</b>	<b>1,125</b>	<b>1,240</b>	<b>1,155</b>	<b>1,310</b>
Jagung	756	1,372	1,790	1,784	1,176
Ubi Kayu	18	43	74	87	225
Ubi Jalar	30	30	46	71	230
Kacang Tanah	3	5	11	31	-
Kedele	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011

Kawasan strategis pertanian meliputi kawasan sentra produksi pertanian sayur mayur (hortikultura) terletak di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, dan sekitarnya, kawasan sentra produksi pertanian bunga di Desa Sidomulyo, Gunungsari, Punten dan sekitarnya, kawasan sentra produksi apel di Kecamatan Bumiaji, dan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan di Desa Pendem dan Torongrejo. Pengembangan kawasan strategis pertanian di Kota Batu adalah sebagai berikut:

- Pengembangan agrotourism meliputi orchids farmers, accessories flowers, green house, dan fresh flowers
- Pengembangan kawasan sentra produksi sayur mayur (tanaman hortikultura) lokasi di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo dan sekitarnya.
- Pengembangan : teknologi, permodalan, sdm diprioritaskan pada ksp di Kec. Bumiaji, pusat agrobisnis : Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji dengan di dukung konsep desa wisata
- Kawasan sentra produksi bunga di desa Sidomulyo, Gunungsari, Punten dan sekitarnya.
- Kawasan sentra produksi apel di wilayah Kecamatan Bumiaji

Di sisi lain. Pusat kawasan agropolitan di Kota Batu lebih diarahkan pada bagian utara dari wilayah Kota Batu. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada topografi dengan tingkat keterlerangan 15-30% yakni agak curam, dengan ketinggian 1000-1500 m dpl. Pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu merupakan pengembangan pada kawasan transisi dari pengembangan pusat kegiatan Kota Batu dengan kawasan pengembangan sangat terbatas. Kawasan agropolitan Kota Batu di kembangkan pada :

1. Kecamatan Bumiaji meliputi Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, dan Desa Sumber Brantas.
2. Kecamatan Junrejo yaitu meliputi Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem serta Desa Tlekung.

#### **b. Sub Sektor Peternakan**

Ternak pada umumnya dapat dibedakan menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Pada tahun 2009, populasi ayam pedaging mengalami peningkatan yaitu sekitar 40,44 persen. Di sisi lain sapi potong mengalami penurunan sebesar 9,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Populasi Kuda juga menurun sebesar 17,46 persen dan populasi Kerbau tetap stabil.

Populasi ternak kecil yang meliputi kambing dan domba masing-masing tercatat sebanyak 3.742 ekor dan 7.624 ekor. Populasi kambing mengalami penurunan sebesar 3,33 persen, sementara populasi domba menurun sebesar 5,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ayam, baik ayam buras maupun ayam petelur mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 2,35 persen dan 1,14 persen. Berbeda dengan unggas lainnya, ayam pedaging justru mengalami kenaikan yang cukup besar dibanding periode sebelumnya yaitu dari 76.000 ekor menjadi 349.000 ekor. Sedangkan populasi itik dan entog juga menurun sebesar 7,40 persen sementara kelinci menurun 5,38 persen yaitu dari 27.630 ekor periode sebelumnya menjadi 26.143 ekor.

Jenis daging yang banyak dikonsumsi masyarakat Kota Batu adalah daging ayam, daging sapi, kambing domba, dan itik. Sebaliknya untuk daging babi, kerbau, kuda dan kelinci tidak banyak dikonsumsi masyarakat Kota Batu. Sejalan dengan penurunan populasi ayam petelur, jumlah telurpun mengalami penurunan yaitu dari 680 ton menjadi 623 ton. Penurunan ini diikuti turunnya produksi daging dan produksi susu yang masing-masing tercatat 1.695 ton dan 6.105,19 ribu liter. Ini berarti produksi daging turun sebesar 21,8 persen dan produksi susu sebesar 27,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

Persebaran jenis ternak cenderung memusat di Kecamatan Batu. Untuk kawasan perikanan pada dasarnya tersebar terkait erat dengan kondisi sumber daya air. Pada wilayah Kota Batu, persebaran kawasan perikanan terkonsentrasi pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Jika memperhatikan karakter ketersediaan potensi peternakan dan perikanan maka kawasan peternakan serta perikanan telah berkembang sesuai dengan potensinya.

### **c. Sub Sektor Industri**

Profil industri di Kota Batu cenderung masih didominasi oleh industri kecil. Hal tersebut terlihat dari persentase jumlah industri kecil yang mencapai lebih dari 95 persen. Perusahaan industri besar/ sedang di Kota Batu pada tahun 2009 mampu menyerap 519 tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Total investasi di sektor industri pengolahan pada tahun 2009 mencapai 9,02 milyar. Kelompok industri non formal menduduki urutan pertama dalam penanaman investasi yaitu sebesar 9,01 milyar.

Sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, nilai output perusahaan industri pengolahan besar dan sedang selama tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Nilai output meliputi semua hasil perusahaan yang bersangkutan, antara lain: produksi utama, tenaga listrik yang dijual, margin perdagangan, selisih nilai stock barang setengah jadi serta penerimaan lain dari jasa non industri. Dari nilai total output 23,06 milyar sekitar 99,38 persen di antaranya dihasilkan dari produksi utama/ langsung oleh industri yang bersangkutan, sementara sisanya adalah jasa industri yang diberikan kepada pihak lain.

Kawasan industri di Kota Batu memiliki pola tersebar di setiap wilayah dengan penyebaran terbanyak berada di Kecamatan Batu. Berdasarkan jenisnya, sektor industri di Kota Batu meliputi industri sandang, pangan, kimia bahan bangunan, logam elektro dan kerajinan. Persebaran lokasi kawasan industri di Kota Batu terletak di Kecamatan Batu yaitu di Kelurahan Temas, Kelurahan Songgokerto serta Desa Pesanggrahan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Junrejo tersebar di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo serta Desa Beji. Selanjutnya di wilayah Bumiaji berada di Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji serta Desa Bulukerto. Sedangkan arah pengembangan industri di Kota Batu akan diarahkan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji dengan hasil industri berupa pengolahan susu perah dan hasil produksi pertanian, hal ini dikarenakan industri tersebut dekat dengan peternakan dan bahan baku perkebunan. Selain itu, industri ini dapat dijadikan alternatif obyek wisata dengan daya tarik peternakan sapi perah.

### **d. Sub Sektor Perdagangan dan Jasa**

Pada tahun 2009, usaha perdagangan di Kota Batu yang memiliki SIUP berjumlah 265 usaha. Dari jumlah tersebut sekitar 205 usaha merupakan usaha kecil, 49 usaha menengah dan sisanya usaha besar. Walaupun jumlah usaha perdagangan besar di Kota Batu kurang dari 10 persen, namun kemampuan dalam menyerap tenaga kerja tidak dapat diabaikan. Pada periode yang sama, jumlah usaha yang berbadan hukum perorangan merupakan jumlah usaha perdagangan yang memiliki ijin SIUP terbanyak. Usaha yang berbadan hukum perorangan tercatat sebanyak 159 usaha. Berikutnya CV sebanyak 82 usaha, PT sebanyak 11 usaha dan sisanya badan hukum koperasi dan firma. Khusus untuk perkembangan perdagangan skala mikro, menengah dan kecil yang sampai saat ini menjadi salah satu titik fokus perhatian Pemerintah Kota Batu dapat diamati dari Tabel 2.4. berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Usaha Perdagangan per Kecamatan dan Golongan**  
**Tahun 2008-2010**

Kecamatan		Perdagangan		
		Mikro	Menengah	Kecil
<b>2010</b>				
1.	Batu	16	26	156
2.	Junrejo	8	3	66
3.	Bumiaji	5	13	66
<b>2009</b>				
1.	Batu	6	28	117
2.	Junrejo	3	17	42
3.	Bumiaji	2	5	45
<b>2008</b>				
1.	Batu	6	31	90
2.	Junrejo	0	7	27
3.	Bumiaji	0	5	32

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kota Batu, 2011*

Kawasan perdagangan dan jasa komersial yang ada di Kota Batu tersebar di setiap wilayah dan sepanjang koridor jalan utama yang meliputi pedagang bunga di sepanjang koridor Jl. Bukit Berbunga, Desa Sidomulyo Kecamatan Bumiaji. Mall dan pertokoan berada di pusat kota di Jl. Panglima Sudirman, Pasar batu tradisional dan pertokoan di Jl. Dewi Sartika serta rumah makan dan penjual tanaman hias berada di sepanjang Jl. Mojorejo. Untuk pengembangan ke depan kawasan perdagangan dan jasa komersial akan diarahkan di pusat kota yaitu sepanjang koridor Jl. Panglima Sudirman serta Jl. Raya Oro-oro Ombo dekat dengan lokasi obyek wisata serta memiliki kelerengan 5-15% berupa daerah landai sehingga dapat dimanfaatkan untuk kawasan perdagangan dan jasa.

#### **e. Sub sektor Pariwisata**

Berdasarkan kondisi alamnya, maka kota Batu dijadikan kota sentra wisata bukan tanpa dasar karena kota Batu memiliki kekayaan dan potensi pariwisata yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur. Potensi tersebut juga dikembangkan melalui wisata *artificial*, wisata budaya dan wisata agronomi. Keadaan itu membuat Kota Batu banyak diminati oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara. Namun demikian kekayaan dan potensi alam tersebut belum digarap secara maksimal sehingga perlu mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak. Selain pengembangan wisata berbasis pada pertanian hortikultura, Kota Batu kaya akan potensi wisata alam terutama wisata pegunungan dengan aktifitas wisata petualangan dan olah raga, sumber mata air panas dan pemandangan alam, serta kondisi alam yang dapat dikemas menjadi wisata rekreasi seperti keberadaan air terjun dan wisata pedesaan terkait dengan kehidupan/ sosial budaya pedesaan dan pertanian.

Pengembangan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat

menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna membangkitkan aktifitas pariwisata. Melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk dapat melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Batu, sehingga aktifitas ekonomi meningkat yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan masyarakat dan terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai potensi pariwisata yang berbasis pada alam, obyek wisata buatan serta dengan dukungan sarana penunjang seperti hptel dan restoran, maka kota Batu dapat menjadi pusat pariwisata di Jawa Timur. Perpaduan antara sektor pertanian, agroindustri, budaya masyarakat akan lebih mengokohkan Kota Batu sebagai tujuan utama wisata di Jawa Timur melalui program *agrotourism* maupun *ecotourism*. Sehingga wisatawan yang datang tidak hanya wisatawan dalam negeri akan tetapi mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Tabel 2.5. menyajikan potensi per jenis pariwisata Kota Batu di setiap kecamatan.

**Tabel 2.5.**  
**Potensi Pariwisata menurut Jenis dan Kecamatan**  
**Tahun 2010**

Jenis Pariwisata		Batu	Junrejo	Bumiaji	Jumlah
1.	Wisata Rekreasi	5	0	1	6
2.	Wisata Alam	2	0	5	7
3.	Wisata Agro	1	0	4	5
4.	Wisata Budaya	0	1	1	2
5.	Wisata Minat Khusus	1	1	1	3
6.	Wisata Religi	3	1	1	5
7.	Wisata Ziarah	1	1	1	3
8.	Wisata Sejarah	2	0	3	5
9.	Wisata Husada	2	0	0	2
10.	Wisata Kuliner	24	8	4	36

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, 2011*

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pariwisata yang berdaya saing tinggi, maka didukung sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura yang mempunyai spesifikasi tersendiri dan tidak dimiliki daerah lainnya. Didukung tanahnya yang subur, udara bersih, sejuk dan panorama yang indah semakin memperkuat daya tarik untuk mengembang sektor pertanian, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Terkait dengan hal di atas, peningkatan layanan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Saat ini Pemerintah Kota Batu sedang menyiapkan konsep dan prototype *Batu Agropolitan* yang akan meningkatkan peran Kota Batu sebagai Kota Pertanian (Agropolitan), khususnya untuk jenis tanaman sayur, buah dan bunga serta menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian (*agro-industri*) yang diperhitungkan baik di tingkat regional (Jawa Timur) maupun tingkat nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian. Selain itu juga meningkatkan posisi dan pertaan Kota Batu dari "Kota Wisata" menjadi "Sentra Wisata" yang diperhitungkan di tingkat regional atau bahkan nasional, dengan menambahkan

ragam obyek dan atraksi wisata, yang didukung sarana dan prasarana serta unsur wisata yang memadai dengan sebaran yang relatif merata di seluruh penjuru wilayah Kota Batu sehingga mampu memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan warga maupun PAD Kota Batu yang berbasis pariwisata. Potensi sektor pariwisata di Kota Batu meliputi obyek wisata dan fasilitas pendukung wisata yang meliputi sarana akomodasi serta sarana rumah makan, di antaranya adalah.

- a. Wisata Agro dan Wisata Bunga
  - Kusuma Agrowisata
  - Wisata Agro Punten
  - Wisata Bunga Sidomulyo
- b. Wisata Alam
  - Pemandian Air Panas Cangar
  - Pemandian Air Panas Songgoriti
  - Camping Ground, Air Terjun Coban Talun
  - TAHURA (Taman Hutan Raya) Junggo
  - Camping Ground
  - Air Terjun Coban Talun
  - Air Terjun Coban Rais
- c. Wisata Budaya
  - Sedekah Bumi
  - Grebeg Desa
  - Tari Sembrama
  - Maulud Nabi Muhammad SAW
  - Dokar Wisata
- d. Wisata Buatan
  - TR. Jatim Park 1 dan Jatim Park 2
  - TR. Air Panas Songgoriti
  - TR. Kolam Renang Selecta
  - TR. Tirta Nirwana
  - TR Batu Night Spectaculer (BNS)
- e. Wisata Minat Khusus
  - Wisata Paralayang (Aero Tourism)
  - Wisata Arung Jeram
  - Wisata Sepeda Gunung
  - Wisata Bumi Perkemahan
- f. Wisata Sejarah
  - Candi Supo Songgoriti
  - Patung Ganesha
  - Makam Tuan Denger
  - Wisma Bima Sakti Seleka
  - Kartika Wijaya (Heritage Hotel)
  - Goa Jepang Cangar
  - Goa Jepang Tlekung
- g. Wisata Religi
  - Masjid An-Nur
  - Gereja Tua Jago
  - Vihara Budha Kertarajasa
  - Klenteng Dewi Kwam Im Thong

h. Wisata Ziarah

- Makam Pesarehan Mbah Wastu terletak di Bumiaji merupakan cikal bakal nama Kota Batu
- Makam Pesarehan Mbah Pathok terdapat di wilayah Songgoriti yang konon Mbah Pathok membuka wilayah/ babat alas daerah Songgoriti

i. Wisata Husada

Wisata tersebut dapat dijumpai di Balai Matera Medika

j. Wisata Kuliner

Di Kota Batu terdapat restoran dan rumah makan yang menjual aneka makanan khas kota batu seperti sop buntut, gurame bakar, sate kelinci, bebek kuali dan lain sebagainya.

k. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi merupakan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan wisata lebih dari 24 jam. Sarana akomodasi yang ada di Kota Batu berdasarkan klasifikasi meliputi hotel melati sampai dengan hotel berbintang yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Sarana Akomodasi di Kota Batu Tahun 2008**  
**Berdasarkan Klasifikasi**

Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel
Bintang 4	1
Bintang 3	3
Bintang 2	3
Bintang 1	1
Melati 3	11
Melati 2	3
Melati 1	32

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, 2008*

Untuk lebih lengkapnya data di atas dapat dilihat di Tabel 2.41 halaman II-73

l. Sarana Rumah Makan

Sarana rumah makan merupakan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk memenuhi kebutuhan akan makan dan minum ketika melakukan perjalanan wisata ke Kota Batu. Sarana rumah makan yang ada di Kota Batu sejumlah 32 rumah makan yang persebarannya relatif banyak di Kecamatan Batu, di antaranya adalah seperti tertera di Tabel 2.7..

**Tabel 2.7.**  
**Sarana Akomodasi di Kota Batu Berdasarkan Jenis**  
**Tahun 2010**

No	Rumah Makan
1.	Warung Watu Lontar
2	Sate Hotplet
3	Rumah Makan Slamet Noto Roso
4	Rumah Makan Khas Jawa
5	Rumah Makan Hot Cwie Mie
6	Rumah Makan Cafe Pantara
7	Rumah Makan Ayam Goreng Pemuda
8	Rumah Makan Ayam Goreng Kalasan
9	Rumah Makan Al-Madinnah
10	Restaurant Bougenville
11	Restaurant Batu Suki Restaurant Batu Suki
12	Ikan Segar Mojo Asri
13	Depot Jeddah
14	Rumah Makan Flamboyan
15	Warung Jamiah

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kota Batu, 2011*

Ke depan, pengembangan wisata Kota Batu berdasarkan jenis wisatanya meliputi wisata desa, wisata *adventure* dan alam, wisata budaya dan wisata kota serta dikembangkan pula kegiatan wisata meliputi kegiatan wisata spektakuler, wisata rutin dan wisata spesial dengan didukung obyek wisata serta fasilitas penunjang wisata yang ada di Kota Batu. Sedangkan pengembangan kawasan strategis pariwisata di Kota Batu:

- Wisata desa (*living with people*) dikembangkan untuk kegiatan kampung bersih, memiliki daya tarik berupa tanaman hortikultura yaitu buah apel dan tanaman hias, dikembangkan berdekatan dengan lokasi wisata yang lain agar terjadi keterkaitan antar lokasi wisata serta perlu adanya penyediaan air bersih untuk memudahkan kebutuhan wisatawan
- Wisata *adventure* dan alam diarahkan untuk dikembangkan untuk lokasi wisata arung jeram, paralayang, *camping ground* dan *off road*
- Wisata budaya diarahkan sebagai wisata dengan daya tarik budaya yang dikembangkan di obyek wisata Klenteng
- Wisata kota dikembangkan untuk lokasi wisata miniatur world, pendidikan pariwisata dan rumah sakit pariwisata.

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Manusia tidak dapat mencegah dan meramalkan bencana alam. Yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengelola risiko bencana itu secara cermat dan rapi untuk memperkecil dampaknya, terutama memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Pengelolaan risiko seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadi bencana melainkan perlu adanya upaya pencegahan melalui metoda penanggulangan risiko secara profesional sebelum terjadinya bencana sehingga dapat memperkecil akibat yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung adalah kerugian atau kerusakan baik yang

merupakan risiko ekonomi maupun non-ekonomi karena terjadinya suatu bencana; sedangkan akibat tidak langsung adalah kerugian atau kerusakan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kejadian bencana melainkan berhubungan dengan akibat terjadinya bencana, misalnya risiko sosial, psikologis, dan politis. Oleh karena itu, kesiagaan terhadap bencana alam perlu ditingkatkan. Saat ini penanganan bencana alam yang dilakukan masih bersifat tanggap darurat, dimana upaya penanganan dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana serta belum dilaksanakan secara terkoordinasi, baik dalam hal penanganan maupun pendanaan.

Mengingat besarnya potensi daerah rawan bencana maka diperlukan upaya penanganan secara terpadu, baik meliputi aspek pendanaan maupun pengelolaan yang melibatkan seluruh pihak terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat). Pemerintah Daerah bekerja sama dengan unsur-unsur lain yang terkait perlu mengadakan bimbingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan tersebut. Isu yang muncul saat ini adalah pola penanggulangan bencana umumnya masih bersifat parsial, sektoral, kurang terpadu, dan masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah; sehingga akibatnya, masyarakat hanya menjadi obyek semata.

Upaya penguatan kapasitas atau kemampuan masyarakat dan upaya mengurangi tingkat kerentanannya cenderung belum dilakukan dengan baik. Dalam paradigma terkini, penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini juga menuntut koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik dari sektor pemerintah, lembaga-lembaga swasta/masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

Kerja sama lintas wilayah, dalam hal ini, merupakan *critical point* bagi upaya pencegahan banjir di Kota Batu. Mengingat beberapa daerah aliran sungai juga melintas di luar wilayah Kota Batu. Pemeliharaan DAS di Kota Batu (hilir) akan lebih optimal apabila juga ditunjang dengan pemeliharaan vegetasi DAS (hulu). Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -dalam hal ini Badan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah (BPSAW) Sungai Brantas- perlu ditingkatkan demi optimalnya hasil pengendalian bencana di Kota Batu.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali bencana alam di wilayah Kota Batu di antaranya adalah angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Tabel 2.8. mencatat kejadian bencana alam di Kota batu tahun 2010.

**Tabel 2.8.**  
**Kejadian Bencana Alam menurut Jenis Kejadian**  
**Tahun 2010**

Jenis Bencana	Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Korban Jiwa	Kerugian Harta (Rp.)
1. Tanah Longsor	Giripurno	Februari	-	120,000,000
	Sumber Brantas	Mei	-	150,000,000
	Beji	Juni	-	78,000,000
	Temas	Agustus	-	65,000,000
	Oro-oro ombo	Agustus	-	52,000,000
2. Banjir	Punten	Desember	-	30,000,000
	Dadaprejo	Desember	2 orang	6,000,000

Sumber: Kantor Kebangpollinmas Kota Batu, 2011

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terkena bencana tanah longsor, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng kawasan ini. Kawasan ini menempati puncak-puncak dan tubuh lajur gunung api tengah. Kondisi lereng yang terjal, lapisan tanah yang tebal, daya kohesinya kecil (tidak kompak), kejenuhan air tinggi (adanya mata air), dan lajur patahan (sesar) menjadikan kawasan ini rawan longsor, yang dipercepat oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Kawasan rawan bencana di Kota Batu perlu dikendalikan secara ketat untuk pengembangan kawasan budidaya terutama pada kegiatan pertanian bukan pada tanaman keras dan kegiatan permukiman. Dampak yang dominan dari kawasan rawan bencana yang ada di Kota Batu adalah erosi/tanah longsor dan banjir lumpur. Adapun kawasan rawan bencana erosi/longsor di Kota Batu terdapat pada:

a. Kota Batu bagian utara

Kawasan Gunung Pusungkutuk, Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasmoro, Gunung Raung, dan Sumber Brantas di Desa Tulungrejo, pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut untuk hutan, ruang terbuka hijau, pertanian, pariwisata, permukiman, industri dan pergudangan. Kawasan ini memiliki klasifikasi kelerengan >40%.

b. Kota Batu bagian selatan

1. Kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punuksapi, dan Gunung Srandil di Desa Oro-oro Ombo, pemanfaatan ruang kawasan tersebut adalah untuk hutan dan pertanian.
2. Kawasan Gunung Wukir di Desa Torongrejo dengan pemanfaatan ruang untuk pertanian, sebagian kecil Desa Mojorejo dengan pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil Desa Pendem dengan pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil Desa Beji dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman; sebagian kecil Kelurahan Temas dengan pemanfaatan untuk pertanian, ruang terbuka hijau dan permukiman; sebagian kecil Desa Giripurno dengan pemanfaatan untuk pertanian; dan sebagian kecil Desa Pandanrejo dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman. Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %.

c. Kota Batu bagian barat

1. Kawasan Gunung Banyak di Desa Gunungugari dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman villa.
  2. Gunung Kerumbung di Desa Tulungrejo dengan pemanfaatan untuk pertanian
  3. Gunung Preteng di Desa Gunungsari dengan pemanfaatan untuk pertanian
- Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %.

d. Kota Batu bagian timur

1. Kawasan Gunung Pucung di Desa Bulukerto dengan pemanfaatan untuk pertanian
  2. Kawasan Gunung Gede di Desa Bumiaji dengan pemanfaatan untuk pertanian
- Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan > 40 %.

#### 2.1.4. Demografi

Secara umum selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan sex ratio di Kota Batu terlihat pada Tabel 2.9. Pada tahun 2011 jumlah penduduk tercatat 191.594 jiwa dengan sex ratio sedikit menurun menjadi 97,77. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga (KK) secara keseluruhan adalah 50.228 KK dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 3,78. Tabel 2.10, Menunjukkan Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2007-2011.

**Tabel 2.9.**  
**Penduduk Kota Batu**  
**Berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2007-2011**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
2007	92,329	93,657	185,986	98.58
2008	94,755	93,058	187,813	101.82
2009	95,025	94,579	189,604	100.47
2010	94,114	96,062	190,176	97.97
2011	94,717	96,877	191,594	97.77

*Sumber : Hasil Susenas Tahun 2007 - 2010 dan prediksi 2011*

Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk adalah 0,75% per tahun yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan laporan sensus penduduk tahun 2010 dengan selang waktu yang berbeda (10 tahun). Hal ini menunjukkan trend yang positif karena perkembangan penduduk lebih terkendali. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk perempuan di Kota Batu selama 5 tahun terakhir yakni 2007-2011 lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yakni masing-masing sebesar 0,64% p.a dan 0,85% p. Sebaran penduduk Kota Batu terpusat terutama di Kecamatan Batu yakni 46,26%, Kecamatan Bumiaji 29,24%, dan Kecamatan Junrejo sebesar 24,50%.

Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda seperti terlihat pada Tabel 2.10. Hal ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 32,35% pada tahun 2009 dan 35,31% pada tahun 2010. Dengan demikian pada tahun 2010 angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 46,89 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 47 orang bukan usia produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio 2 : 1.

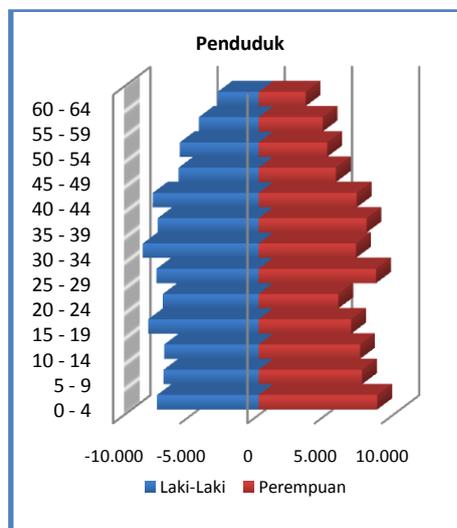
**Tabel 2.10.**  
**Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kota Batu Tahun 2009 dan 2010**

Kelompok Umur	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-14	23,09	23,09	23,09	23,04	25,02	24,04
15-64	71,65	71,65	71,65	70,48	65,73	68,08
65+	5,26	5,26	5,26	6,48	9,25	7,88
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2011*

Sedangkan Komposisi Penduduk dilihat dari kelompok umur atau struktur usia terdapat pada Gambar 2.3. di bawah ini.

**Gambar 2.3.**  
**Piramida Penduduk Kota Batu Tahun 2010**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2011*

Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut:

**Tabel 2.11.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas**  
**menurut Pendidikan Yang Ditamatkan**  
**Kota Batu Tahun 2007-2011**

Tingkat Pendidikan	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
Tidak belum pernah sekolah	3,94	3,45	2,55	3.87	2.95
Tidak belum tamat SD	12,89	13,30	11,21	10.99	9.48
Tamat SD	29,01	28,90	27,82	29.96	29.42
Tamat SLTP	23,91	22,96	23,29	21.87	22.17
Tamat SMTA +	23,61	24,24	26,23	25.03	26.41
Tamat PT	6,65	7,15	8,89	8.28	9.57

Sumber : Hasil Susenas 2007 - 2010 dan Hasil Analisis 2011  
 \*)jangka sementara \*\*)jangka estimasi

Sebagai kota yang berhawa sejuk dan memiliki tanah yang subur, Kota Batu sangat kondusif untuk usaha pertanian. Oleh karena itu, dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis pekerjaannya maka kelompok petani menduduki jumlah yang paling banyak, meskipun secara kuantitatif terus mengalami penurunan sejalan dengan perkembangan jaman, seperti terlihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011**

Pekerjaan Utama	2008		2009		2010		2011*)	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pertanian	38,596	43.58	35,427	37.03	34,011	36.53	31,927	32.84
Penggalian	148	0.17	110	0.11	326	0.35	484	0.50
Industri	5,193	5.86	6,360	6.65	7,526	8.08	9,060	9.32
Listrik dan Air Bersih	214	0.24	106	0.11	148	0.16	123	0.13
Konstruksi	6,920	7.81	7,492	7.83	7,414	7.96	7,674	7.89
Perdagangan	21,631	24.43	23,980	25.06	22,873	24.57	23,520	24.19
Transportasi & Komunikasi	4,805	5.43	5,648	5.90	3,844	4.13	3,438	3.54
Keuangan	977	1.10	1,624	1.70	1,440	1.55	1,748	1.80
Jasa-Jasa dan Lain - Lain	10,071	11.37	14,932	15.61	15,514	16.66	19,255	19.80
Kota Batu	88,555	100.00	95,679	100.00	93,096	100.00	97,230	100.00

Sumber: BPS Kota Batu, 2011  
 \*)jangka estimasi

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni 2008-2011 tampak terjadi pergeseran terhadap pekerjaan utama penduduk Kota Batu dari sektor primer yang mengalami penurunan ke sektor sekunder dan terutama ke sektor tersier seperti terlihat pada Tabel di

atas. Hal ini sejalan dengan pergeseran sektor-sektor ekonomi seperti di tunjukkan oleh pergeseran PDRB sektoral dalam kurun waktu yang sama.

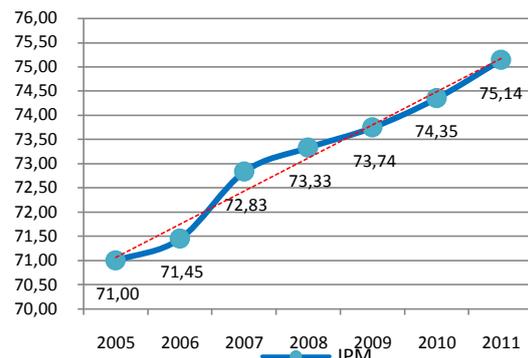
## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kota Batu untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.

Pada tahun 2009, IPM Kota Batu mencapai 73,74 kemudian meningkat menjadi 74,45 pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 diperkirakan meningkat menjadi 75,14 dengan *shortfall* sebesar 0,79. Sedangkan *shortfall* pada tahun sebelumnya adalah 0,61. Hal ini berarti

bahwa percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu: pada tahun 2010 indeks pendidikan 84,58, indeks kesehatan 74,03 dan indeks daya beli 64,44, sedangkan pada tahun 2011 diperkirakan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 86,12; 74,47, dan 64,84. Tabel 2.13. berikut menyajikan informasi IPM beserta komponennya antar waktu mulai tahun 2008-2011 berikut *shortfall*nya. IPM Kota Batu pada tahun 2011 dan diperkirakan berada pada peringkat ke-9 di antara 38 pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur.

**Gambar 2.4.**  
Indeks Pembangunan Manusia Antar Waktu Kota Batu Tahun 2005-2011



Sumber : Indikator Makro BPS Prop. Jatim, diolah, 2011

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

**Tabel 2.13.**  
Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Selama Tahun 2008-2011

Indeks	2008	2009	2010	2011*)	Perubahan (point)	
					2009-2010	2010-2011
IPM	73,33	73,74	74,35	75,14	0,61	0,79
Indeks Harapan Hidup	73,12	73,20	74,03	74,47	0,83	0,44
Indeks Pendidikan	83,09	83,38	84,58	86,12	1,20	1,54
Indeks PPP	63,79	64,65	64,44	64,84	-0,21	0,40

Sumber : Indikator Makro BPS Prop. Jatim, diolah, 2011

\*) Hasil proyeksi

Gambar 2.4. di atas menunjukkan Perkembangan IPM Kota Batu Antar Waktu mulai tahun 2005-2011. Terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut IPM Kota Batu menunjukkan

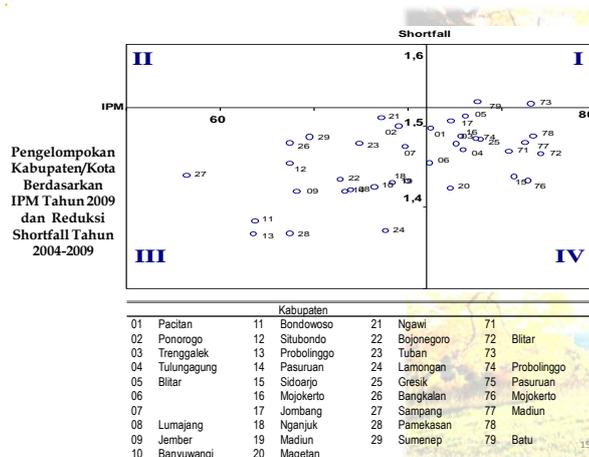
tren/kecenderungan yang meningkat secara gradual dan signifikan dan berkelanjutan (*sustainable*).

Besarnya angka IPM serta kecenderungan peningkatan secara berkelanjutan yang dicapai Kota Batu tersebut menunjukkan bahwa pencapaian status pembangunan manusia secara umum selama periode 2005 - 2011 mengalami perubahan yang cukup berarti dan berada pada tingkatan menengah ke atas di wilayah provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa

pembangunan yang dilakukan telah *on the right track* serta telah dapat menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam menuju ke arah pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi sebagaimana dipersyaratkan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Batu.

Posisi IPM Kota Batu secara komparatif dengan pemerintah daerah lainnya di provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 2.5.

**Gambar 2.5.**  
**Sebaran Posisi IPM Daerah di Jawa Timur**



Sumber: Bappeprov Jatim, 2010

### 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di kawasan ini berkisar 4-4,5% per tahun dengan pendapatan per kapita rata-rata Rp. 6,8 juta dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan di atas rata-rata meskipun tingkat pendapatan per kapita masih di bawah Kota Malang dan Kota Probolinggo. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu pada periode tersebut mencapai 6,4%-6,8%. Sejak akhir tahun 2005 wilayah ini mulai mengindikasikan adanya peningkatan usaha yang tercermin dari peningkatan penggunaan tenaga kerja, nilai penjualan dan nilai produksi. Secara sektoral indikasi ekspansi tampak dipengaruhi oleh ekspansi pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hotel, dan restoran, sementara sektor manufaktur terjadi penurunan kondisi usaha yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan ongkos produksi seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut menjadikan tingkat inflasi merambat naik.

Secara riil perekonomian Kota Batu banyak digerakkan oleh tiga sektor utama yaitu: perdagangan, jasa, dan pertanian. Sektor perdagangan dan pariwisata (termasuk Perhotelan dan Restoran) menyumbangkan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Batu, yaitu rata-rata sebesar 39,86%. Kontribusi sektor jasa-jasa rata-rata sebesar 23,64%, dan sektor pertanian memberikan kontribusi riil rata-rata terhadap pertumbuhan sebesar 15,62%. Peranan/kontribusi riil relatif dari masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (64,60%) terutama sub-sektor perdagangan besar dan eceran (44,25%) dan sub-sektor perhotelan (19,99%) serta sub-sektor restoran (1,23%). Kedua sub-sektor terakhir ini tetap signifikan dan besar peranannya bagi pengembangan industri pariwisata yang merupakan ciri khas dan bahkan *trademark* Kota Batu.

Dengan derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan finansial sebesar lebih dari 85% terhadap Pemerintah Pusat kiranya sampai saat ini masih terdapat kendala bagi Pemerintah Kota Batu untuk dapat memberikan layanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, menyediakan sumber dana pembangunan bagi masyarakat dan pemerintah daerah lain di sekitarnya, dan sebagainya. Dengan kata lain untuk mewujudkan dan mencapai otonomi yang lebih luas perhatian harus lebih difokuskan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan tersebut utamanya dari sisi pajak dan retribusi daerah.

Sampai tahun 2008, pangsa sektor tersier perekonomian Kota Batu terus meningkat. Pada tahun 2006, pangsa sektor tersier masih mencapai 68,55 persen dan secara konsisten naik hingga mencapai 70,39 persen pada tahun 2009. Sementara itu, pangsa sektor sekunder yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Batu bersama sektor tersier, memberi sumbangan 10,72 persen pada tahun 2009. Selama empat tahun terakhir, sektor sekunder cukup memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan karena pangsa sektor sekunder terus meningkat. Peningkatan ini terjadi karena pangsa sektor listrik dan air bersih serta pangsa sektor bangunan yang meningkat selama empat tahun terakhir, walaupun pangsa sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Tabel 2.14 dan Tabel 2.16. berikut menyajikan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Batu tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan 2000.

**Tabel 2.14.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2009**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**

No.	Sektor/ Sub-sektor	2006		2007		2008*)		2009 **)	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
I	Pertanian	358,248.86	20.38	408,449.69	20.34	458,750.99	19.51	496,555.55	18.70
II	Pertambangan Dan Penggalian	3,596.00	0.20	4,123.53	0.21	4,701.71	0.20	5,124.86	0.19
III	Industri Pengolahan	135,461.36	7.70	152,914.03	7.61	177,095.01	7.53	193,540.49	7.29
IV	Listrik Dan Air Bersih	27,863.25	1.58	32,245.57	1.61	37,545.03	1.60	41,347.96	1.56
V	B a n g u n a n	27,981.79	1.59	34,122.04	1.70	42,181.46	1.79	49,774.12	1.87
VI	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	812,691.47	46.22	919,741.02	45.79	1,092,494.29	46.47	1,260,413.14	47.46
VII	Pengangkutan Dan Komunikasi	62,511.31	3.56	70,677.15	3.52	82,162.81	3.49	91,307.17	3.44
VIII	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	77,643.53	4.42	88,034.96	4.38	100,952.49	4.29	113,000.22	4.26
IX	Jasa - Jasa	252,227.82	14.35	298,184.92	14.85	355,198.42	15.11	404,575.60	15.23
Produk Domestik Regional Bruto		1,758,225.39	100.00	2,008,492.91	100.00	2,351,082.21	100.00	2,655,639.11	100.00

Sumber: Hasil analisis, 2011

**Tabel 2.15.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2009**  
**atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

No.	Sektor/ Sub-sektor	2006		2007		2008*)		2009 **)	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
I	Pertanian	216,307.49	21.24	229,661.82	21.12	243,729.58	20.97	258,567.84	20.84
II	Pertambangan Dan Penggalian	2,082.19	0.20	2,252.10	0.21	2,407.70	0.21	2,543.47	0.21
III	Industri Pengolahan	79,571.67	7.81	84,391.22	7.76	89,733.69	7.72	94,857.19	7.65
IV	Listrik Dan Air Bersih	15,362.83	1.51	16,745.78	1.54	18,185.42	1.56	19,808.69	1.60
V	B a n g u n a n	14,580.88	1.43	16,460.84	1.51	18,369.65	1.58	20,354.85	1.64
VI	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	473,432.61	46.50	502,155.49	46.18	534,672.70	46.01	569,275.84	45.89
VII	Pengangkutan Dan Komunikasi	34,513.11	3.39	37,097.32	3.41	39,990.99	3.44	42,867.34	3.46
VIII	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	47,218.08	4.64	50,812.17	4.67	54,424.30	4.68	58,255.28	4.70
IX	Jasa - Jasa	135,141.00	13.27	147,912.85	13.60	160,672.85	13.83	173,996.27	14.03
Produk Domestik Regional Bruto		1,018,209.86	100.00	1,087,489.59	100.00	1,162,186.88	100.00	1,240,526.77	100.00

Sumber: Hasil analisis, 2011

Selanjutnya, terkait dan melengkapi dengan nilai dan kontribusi sektoral sebagaimana di atas, maka Tabel 2.16. menunjukkan pertumbuhan kontribusi sektoral ADHB maupun ADHK Tahun 2000.

**Tabel 2.16.**  
**Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)**  
**dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006-2009**

No.	Sektor/ Sub-sektor	Hb	Hk
		%	%
I	Pertanian	-0.02	-0.01
II	Pertambangan Dan Penggalian	-0.02	0.01
III	Industri Pengolahan	-0.01	-0.01
IV	Listrik Dan Air Bersih	-0.01	0.02
V	B a n g u n a n	0.06	0.05
VI	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	0.00	0.00
VII	Pengangkutan Dan Komunikasi	-0.01	0.01
VIII	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	0.00	0.01
IX	Jasa - Jasa	0.03	0.02

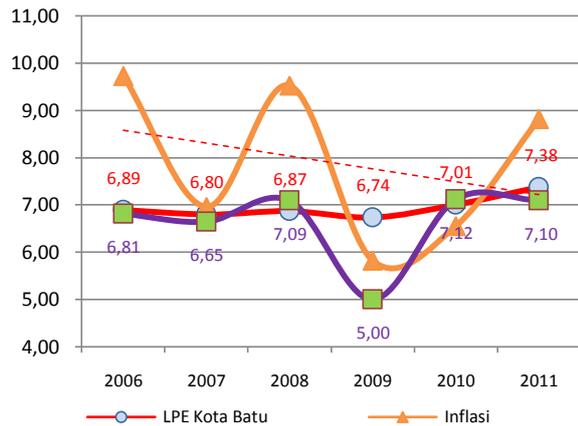
Sumber: Hasil analisis, 2011

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2009, perekonomian Kota Batu menunjukkan proses pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Seluruh sektor kegiatan memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh yakni sebesar 6,74%, yang berarti sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski pertumbuhan pada 2009 cukup tinggi, namun ditinjau dari struktur produksi masih kurang mencerminkan fondasi yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama mengingat masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir terbesar.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada tahun 2010 mencapai 7,01 persen. Angka ini menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 7,38 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,10 persen. Gambar 2.6. menunjukkan histori laju pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2006-2011. Pertumbuhan yang paling tinggi adalah di sektor Bangunan yaitu sebesar 12,64 persen. Menyusul kemudian sektor jasa dengan angka 11,01 persen serta sektor Listrik, Gas dan air sebesar 8,72 persen dan sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 7,78 persen seperti terlihat pada Tabel 2.17. Pertumbuhan pada 2011, ditinjau dari struktur produksi sektoral, pertumbuhan yang terjadi kurang mencerminkan fondasi yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama mengingat belum optimalnya pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan sektor pertanian yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir (*backward-forward*) terbesar. Sampai dengan tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kota Batu mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari sebesar Rp. 1.328.893 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 1.422.066 juta pada tahun 2010 kemudian meningkat mencapai Rp. 1.527.033 juta pada tahun 2011,

**Gambar 2.6.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kota Batu Tahun 2006-2011



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2011

**Tabel 2.17.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Tahun 2007-2011

SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>*)</sup>
1. Pertanian	6.23	6.13	6.09	6.10	5.84
2. Pertambangan dan Penggalan	8.16	6.91	5.64	6.59	7.53
3. Industri Pengolahan	6.01	6.37	5.59	6.02	6.26
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9.06	8.66	8.93	8.95	8.72

5. Bangunan	12.89	11.60	10.81	11.92	12.64
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.08	6.34	6.48	6.76	6.82
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7.47	7.75	7.19	7.26	7.62
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7.18	6.89	6.78	6.57	7.78
9. Jasa-jasa	9.52	9.19	8.43	9.03	11.01
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6.80</b>	<b>6.87</b>	<b>6.74</b>	<b>7.01</b>	<b>7.38</b>

Sumber : BPS Kota Batu 2005 - 2009 dan Hasil analisis 2011

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

## b. Laju Inflasi

Sebagaimana dapat diamati pada Gambar 2.5. maupun Tabel 2.18 berikut, tingkat inflasi Kota Batu selama tahun 2008 yang diukur dengan indeks implisit PDRB mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 6,93 persen pada tahun 2009 menjadi 9,44 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 tingkat inflasi diproyeksikan turun menjadi 8,5%-9,5%.

Berdasarkan sektor ekonomi, laju inflasi terutama berasal dari sektor konstruksi sebesar 11,68%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencatat kenaikan sebesar 10,30%. Pada urutan ke tiga dan ke empat berasal dari sektor industri pengolahan dan pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 9,69 persen dan 9,59 persen. Kebijakan Pemerintah untuk memberikan gaji ke 13 dan kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen mengakibatkan sub sektor Pemerintahan memberi sumbangan terbesar sektor Jasa-jasa. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mencatat inflasi paling rendah dibanding sektor-sektor lainnya.

**Tabel 2.18.**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2005-2009**  
**Di Kota Batu**

No.	Sektor/ Sub-sektor	2005*)	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	13.67	10.26	7.38	5.83	2.03
2	Pertambangan Dan Penggalian	16.51	7.74	6.02	6.65	3.18
3	Industri Pengolahan	14.73	9.86	6.44	8.92	3.38
4	Listrik Dan Air Bersih	12.87	5.97	6.17	7.22	1.10
5	B a n g u n a n	17.03	12.54	8.01	10.78	6.49
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	13.69	9.19	6.70	11.56	8.36
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	20.88	7.42	5.19	7.84	3.67
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	14.48	9.83	5.36	7.06	4.57
9	Jasa - Jasa	14.33	11.03	8.02	9.66	5.18
Produk Domestik Regional Bruto		14.22	9.73	6.96	9.53	5.82

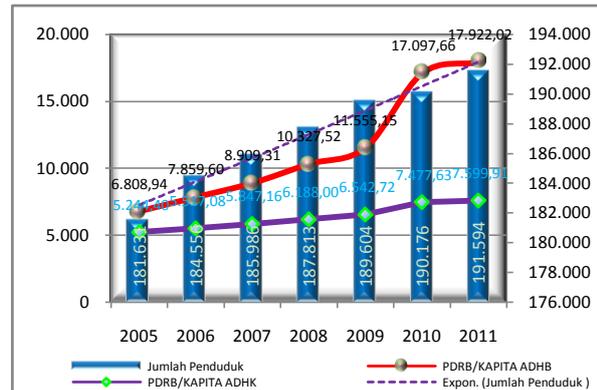
Sumber: Hasil analisis, 2011

### c. Pendapatan per Kapita

Secara agregat perkembangan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat mencerminkan perkembangan / peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu selama tahun 2004-2011. Pendapatan per kapita penduduk Kota Batu baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan secara berkelanjutan sejak tahun 2005-2011.

Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2011 mencapai Rp.17,92 Juta meningkat Rp.824,35 ribu per kapita dibandingkan tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp. 17,09 Juta atau naik 4,82 Persen. Sedangkan jumlah PDRB per Kapita ADHK tahun 2011 mencapai Rp.7,60 Juta meningkat 1,64 Persen atau Rp.122,27 ribu per kapita dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 17,09 Juta.

**Gambar 2.7.**  
**Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan per Kapita Kota Batu Antar Waktu (2005-2011)**

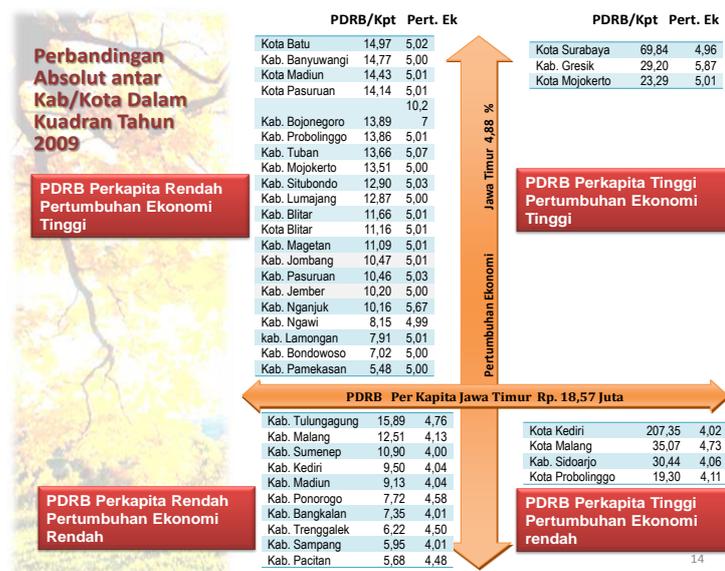


Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2009 dan Hasil analisis 2011  
\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

Meskipun kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian kinerja PDRB per kapita ADHK tahun 2011 sebesar Rp.7.600.000,00 menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK masih belum mencapai nilai varian target yang ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp.9.000.000,00. Gambar 2.7. menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat Kota batu tahun 2005-2011.

**Gambar 2.8**

### Perbandingan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2009



Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan tingginya nilai PDRB per kapita mencerminkan rata-rata output per kapita masyarakat (diharapkan bukan merupakan angka semu). Pertumbuhan ekonomi yang merata di semua sektor menunjukkan gambaran berkembangnya rantai perekonomian. Hal ini merupakan tujuan agar output per kapita masyarakat benar-benar meningkat secara riil.

Perbandingan yang dapat memberikan nilai absolut masing-masing daerah sebagai gambaran kinerja adalah dengan cara membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita Kabupaten/Kota terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita Jawa Timur. Hal menarik yang ditunjukkan oleh gambar hasil perbandingan disajikan pada Gambar 2.8.

Selain kesenjangan regional, juga terdapat kesenjangan sektoral. Sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat kontribusinya lebih rendah dari pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran, walaupun masih dalam kategori yang tinggi. Sebagai propinsi lumbung pangan, keberadaan Jawa Timur sangat strategis dalam pemenuhan pangan daerah maupun kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu perhatian pada sektor pertanian juga harus menjadi prioritas pembangunan dalam rangka revitalisasi pertanian.

Sektor ekonomi strategis Kota Batu adalah pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Dalam rangka menangkap peluang perdagangan bebas sekaligus mengatasi ancaman produk impor, sektor ini perlu dikembangkan baik sehingga memiliki *competitive advantage* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Untuk itu diperlukan industri berdaya saing tinggi. Namun demikian pembangunan sektor-sektor tersebut harus juga mempertimbangan aspek wilayah dan lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan yang dapat mengurangi derajat kesehatan harus dapat ditanggung pemerintah sebagai bagian pemenuhan hak sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### d. Daya Beli

Kemampuan daya beli penduduk Kota Batu mengalami peningkatan secara stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Tabel 2.19. Indeks PPP Kota Batu dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berfluktuasi naik dari 57,45 pada tahun 2005 menjadi 56,41 pada tahun 2006 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 57,24 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 naik menjadi 63,79% kemudian pada tahun 2009 menjadi 65,48%. Peningkatan tersebut terus berlanjut sehingga tahun 2010 menjadi 64,44 dan tahun 2011 menjadi 64,84. Kenaikan indeks PPP menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Batu selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diterima. Indeks PPP tersebut

**Tabel 2.19.**  
**Indeks PPP Kota Batu Tahun 2005-2011**

TAHUN	INDEKS PPP
2005	57,45
2006	56,41
2007	62,69
2008	63,79
2009	64,33
2010	64,44
2011 <sup>*)</sup>	64,84

Sumber : Hasil Susenas 2005 - 2009

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

mengkonfirmasi peningkatan kesejahteraan ekonomis masyarakat Kota Batu secara gradual dan berkelanjutan.

Kenaikan indeks PPP menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Batu pada tahun 2009 mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diterima. Sebaran posisi indeks daya beli dalam konteks Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.9. berikut. Pada gambar tersebut terlihat Kota Batu berada di kuadran IV artinya tingkat IPMnya tinggi namun Indeks Daya Beli meskipun meningkat tetap masih rendah.

**Gambar 2.9.**  
**Sebaran posisi Indeks Daya Beli di Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Bappepriv Jatim, 2010

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial

### a. Pendidikan

Sekolah adalah sarana pendidikan yang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang handal dalam menyukseskan pembangunan. Sekolah TK, SD hingga SMU sudah tersedia secara memadai di Kota Batu baik negeri, madrasah maupun swasta. Sekolah Dasar dan SLTP tersebar di masing-masing kecamatan secara merata. Jumlah SD Negeri di Kota Batu tersebar masing-masing di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (26 Sekolah); Kecamatan Junrejo (16 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (23 Sekolah). Jumlah SMP negeri di Kota Batu sebanyak 7 sekolah dimana di Kecamatan Batu (2 Sekolah); Kecamatan Junrejo (1 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (4 Sekolah). Hanya ada 2 Sekolah SMU Negeri di Kota Batu yang terdapat masing-masing di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Selain itu ada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebanyak 3 sekolah yang juga tersebar merata di tiga kecamatan. Selain sekolah-sekolah negeri di atas, tersebar pula sekolah-sekolah swasta lainnya di masing-masing kecamatan, meskipun hingga saat ini Perguruan Tinggi negeri maupun swasta belum tersedia secara permanen di Kota Batu.

Sejalan dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, persentase angka partisipasi sekolah di masing-masing jenjang pendidikan juga mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir seperti terlihat di Tabel 2.20.

**Tabel 2.20.**  
**Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Kota Batu Tahun 2007-2011**

Usia Sekolah	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
7 - 12	99,41	99,18	101,99	114,16	127,07
13 - 15	93,82	92,49	99,62	88,53	94,13
16 - 18	73,14	70,26	86,44	87,21	91,18

Sumber: Hasil Susenas 2007 – 2010

\*) angka sementara \*\*)angka estimasi

Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator: angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Tabel 2.21. berikut menunjukkan perkembangan tiga indikator pendidikan di Kota Batu selama 2007-2011.

**Tabel 2.21.**  
**Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan**  
**Kota Batu Tahun 2007-2011**

TAHUN	ANGKA MELEK HURUF	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	INDEKS PENDIDIKAN
2007	97,30	8,19	83,07
2008	97,30	8,20	83,09
2009	97,40	8,30	83,38
2010	98,74	8,44	84,58
2011 <sup>*)</sup>	98,86	8,65	86,12

Sumber : Hasil Susenas 2007 – 2010 dan hasil proyeksi

\*\*) Angka sementara hasil proyeksi

Sebaran posisi Indeks Pendidikan dalam konteks Provinsi Jawa Timur, ditunjukkan pada Gambar 2.10. berikut. Pada gambar tersebut terlihat Kota Batu berada di kuadran I artinya tingkat IPMnya tinggi sekaligus memiliki Indeks Pendidikan yang tinggi pula.

**Gambar 2.10.**

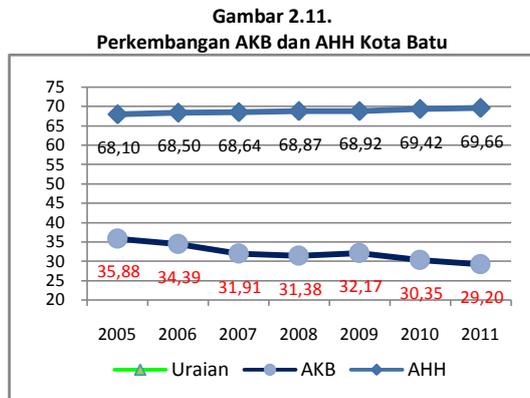
**Sebaran posisi Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Bappeprov Jatim, 2010

## b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya tercermin dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu) seperti terlihat pada Gambar 2.11.



Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendah angka kematian dan semakin meningkatnya harapan untuk hidup. AHH penduduk Kota Batu pada tahun 2011 mencapai 69,66 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah sekitar 70 tahun. Sedangkan AKB mencapai 29,20 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 29-30 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu

yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. Meskipun AKB masih sedikit di bawah Jawa Timur, Tabel 2.22 menunjukkan Perkembangan AHH dan AKB di Kota Batu Tahun 2007-2011 yang terus mengalami perbaikan.

**Tabel 2.22.**  
**Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi Kota Batu Tahun 2007-2011**

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP	ANGKA KEMATIAN BAYI
2007	68,64	31,91
2008	68,87	31,38
2009	68,92	32,17
2010	69,42	30,35
2011*)	69,66	29,20

Sumber : Hasil Susenas 2005 – 2010 dan proyeksi 2011

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

meningkat. Hal ini lebih memperkuat fakta bahwa komitmen Pemerintah Kota Batu adalah konsisten dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan sebaran posisi Indeks Kesehatan Kota Batu dalam konteks Provinsi Jawa Timur, ditunjukkan pada Gambar 2.12. berikut. Pada gambar tersebut terlihat Kota Batu berada di kuadran IV artinya tingkat IPMnya tinggi Indeks Kesehatan masih relatif rendah..

Tabel 2.22. mengkonfirmasi salah satu kinerja bidang kesehatan di Kota Batu dimana *sejak tahun 2007 AHH meningkat 0,37% per tahun dan sebaliknya AKB mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,20% per tahun.* Dengan laju perkembangan ini diharapkan ke depan indikator ini akan lebih baik dan bahkan mampu melampaui kinerja Jawa Timur. Gambar di atas menunjukkan bahwa baik Indeks Harapan Hidup maupun Indeks Pendidikan memiliki kecenderungan

**Gambar 2.12.**

**Sebaran posisi Indeks Kesehatan di Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Bappeprov Jatim, 2010

**c. Kemiskinan**

Kemiskinan menyebabkan sebagian penduduk menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Rendahnya daya beli yang dimiliki oleh penduduk miskin, menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Naiknya harga kebutuhan pokok yang didorong oleh kenaikan harga BBM, menyebabkan pendapatan masyarakat miskin hanya tercurahkan untuk membeli barang pokok. Sehingga mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu (dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat) mencanangkan berbagai program pengaman sosial guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk di antaranya adalah memberdayakan masyarakat miskin, agar memiliki kemandirian ekonomi untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

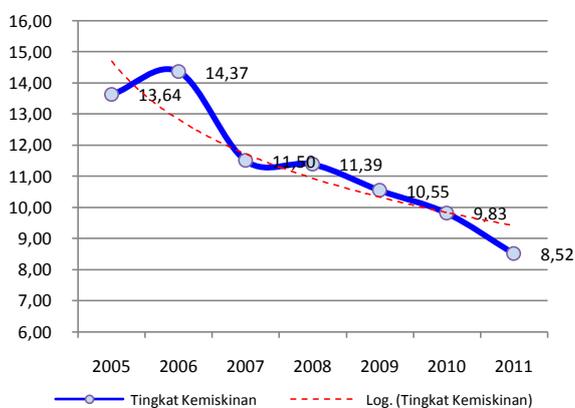
Pada tahun 2007 BPS Propinsi Jawa Timur mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Batu adalah 17.300 orang atau sebesar 9,71% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 207.166,00 lebih tinggi dari Kota Malang yang pada periode yang sama mencapai Rp. 201.031,00. Garis kemiskinan Kota Batu menduduki peringkat ke 4 (empat) di seluruh Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan penduduk Kota Batu menduduki peringkat ke 4 (empat) terkecil di seluruh wilayah propinsi Jawa timur setelah Kota Madiun (7,07%), Kota Malang (7,19%), dan Kota Surabaya (7,98%). Di bawah peringkat Kota Batu terdapat Kota Mojokerto (10,46%), Kota Blitar (12,02%), dan Kabupaten Malang (15,66%).

Pada tahun 2009, berdasarkan data dari BPS Kota Batu besarnya penduduk miskin di Kota Batu adalah 5.817 KK di antara seluruh jumlah 55.136 KK. Angka tersebut merupakan angka murni yang dijadikan dasar untuk penyaluran Raskin Kota Batu tahun yang sama. Berdasarkan data itu, maka tingkat kemiskinan di Kota Batu pada tahun 2009 mencapai 10,55%. Gambar 2.13. menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Batu tahun 2008 cukup tinggi yakni 12,59% dan di atas garis batas nasional sebesar 11,00%. Hal ini

disebabkan karena terjadinya serangkaian kenaikan harga bahan pokok terutama BBM yang dipicu dengan merebaknya dampak krisis keuangan global. Selain itu garis kemiskinan Kota Batu (sebagai Pusat Pariwisata di kawasan) merupakan urutan ke 4 tertinggi di Jawa Timur seperti dikemukakan di atas. Akan tetapi pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kota Batu telah jauh mengalami penurunan sampai di bawah garis batas nasional.

Pada tahun 2010 jumlah keluarga miskin yang meliputi mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin diperkirakan mencapai 5.635 Kepala Keluarga atau 9,83%. Hal ini berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 jumlah tersebut menurun menjadi 5.506 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 20.010 jiwa. Jumlah ini

**Gambar 2.13.**  
**Persentase Penduduk Miskin**  
**Di Kota Batu Tahun 2005-2011**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2010 dan Hasil Analisis

mengalami penurunan rata-rata 5,97% per tahun. Dengan demikian angka kemiskinan di Kota Batu tahun 2011 tercatat sebesar 8,52%. Secara kumulatif jumlah keluarga miskin di Kota Batu mengalami penurunan berkelanjutan dengan tingkat penurunan rata-rata -6,35% per tahun sejak tahun 2005. Apabila dihitung jumlah keluarga miskin berdasarkan garis kemiskinan BPS, maka tingkat kemiskinan di Kota Batu, berdasarkan data yang direlease oleh Bappeprov Jatim, tahun 2010 bahkan mencapai 4,81% dan merupakan angka TERENDAH di antara semua pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh provinsi Jawa Timur. Pada saat yang sama pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Batu yakni Kota Malang sebesar 5,58%, Kabupaten Malang sebesar 13,57%, dan Kabupaten Mojokerto sebesar 13,24%. Hal ini merupakan catatan prestasi yang perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Program pengentasan kemiskinan tetap relevan sepanjang waktu. Pemerintah Kota Batu menekankan upaya program pengentasan kemiskinan dengan berbagai langkah yang kreatif, guna memperkecil kemiskinan dan kesenjangan sosial termasuk upaya membuka lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi upaya pengentasan kemiskinan ini akan terus dilakukan secara berkala. Di antara program yang rutin dilaksanakan terkait dengan hal ini adalah program Raskin. Pemerintah Kota menyalurkan Program Raskin. Program Raskin ini untuk kecamatan Batu ditujukan untuk 2213 KK, Kecamatan Junrejo 1944 KK, sedang Kecamatan Bumiaji 1660 KK. Total penerima Raskin di Kota Batu mencapai 5817 KK. Selain itu pemerintah Kota di tahun 2011 juga melakukan Program Bedah Rumah, dan melanjutkan program Jaminan Layanan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Program pengaman sosial bagi masyarakat miskin, berintikan tiga hal utama, yakni: 1) membantu masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan, melalui pencaangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pemberian bea siswa untuk murid yang berasal dari keluarga kurang mampu. 2) meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan bagi penduduk miskin, melalui program pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan 3) menciptakan kemandirian ekonomi, baik melalui stimulan program padat karya (untuk meningkatkan daya beli) maupun program

pemberdayaan. Gambar 2.14. menunjukkan posisi Kota Batu dari sisi indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka secara konparatif terhadap pemerintah daerah lainnya di wilayah provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.14



Sumber: Bappeprov Jatim, 2010

#### d. Kesempatan Kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya partisipasi angkatan kerja secara langsung dapat menggerakkan perekonomian. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dievaluasi apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingginya partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara langsung dapat menggerakkan perekonomian. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dievaluasi apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk

yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.

Dibandingkan tahun 2010 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu dari sebesar 64,70 menjadi 66,47 artinya bahwa dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, 66 persen di antaranya termasuk angkatan kerja. Kenaikan TPAK ini disebabkan karena semakin banyak penduduk Kota Batu yang mendapat pekerjaan sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kota Batu terutama di bidang pariwisata, perdagangan, dan jasa. Namun demikian TPAK Kota Batu pada saat ini masih di bawah TPAK Jawa Timur sebesar 69,49%.

Angka TKK tahun 2010 sedikit mengalami penurunan persentase, terlihat pada table 1.10 pada tahun 2010 TKK Kota Batu sebesar 92,10 persen, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 92,86 persen. TKK tahun 2010 sebesar 92,10 persen artinya bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja, 92 di antaranya sudah bekerja. Kondisi ini membaik pada tahun 2011 di mana TKK meningkat menjadi 93,61 persen yang disebabkan semakin besarnya arus investasi yang masuk ke Kota Batu pada tahun tersebut.

Dari hasil Susenas 2010, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Batu yang terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) sebanyak 94.744 atau 92,10 persen terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2011 menjadi 96.491 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,84%. Lapangan pekerjaan di Kota Batu umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08%, pada sektor pertanian 20,66%, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54%.

**Tabel 2.23.**  
**Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Batu**  
**Tahun 2007-2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>*)</sup>
Penduduk Angkatan Kerja	97.413	97.259	101.372	102.872	104.644
Jumlah yang bekerja	87.323	88.555	94.136	94.744	96.491
Jumlah Penganggur	10.090	8.704	7.104	8.128	8.001
Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%)	66,10	65,84	69,13	64,70	66,47
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	89,64	96,11	92,97	92,10	93,61
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,36	8,95	7,03	7,90	7,65

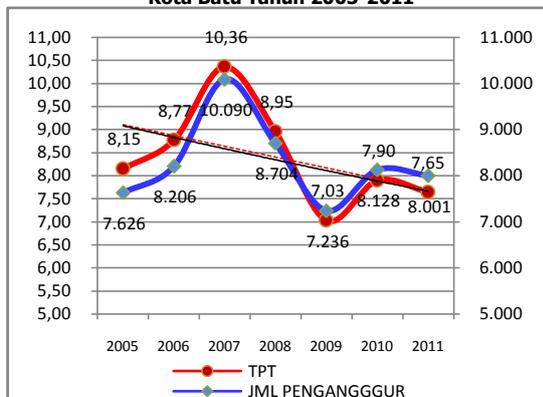
Sumber : Susenas 2007- 2010

\*) hasil proyeksi

Masih terkait dengan hal di atas, pada tahun 2007 jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batu sebanyak 10.090 orang kemudian turun menjadi 8.704 orang pada tahun 2008 dan 7.104 tahun 2009. Angka ini sedikit meningkat kembali menjadi 8.128 orang pada tahun 2010. Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batu untuk mampu menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang berfluktuasi tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 8.001 atau sebesar 7,65% (Tabel 2.23).

Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kota Batu karena dibukanya beberapa tempat pariwisata dan hotel. Sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja. Di masa mendatang diharapkan kondisi pengangguran semakin berkurang karena pemerintah kota Batu masih melakukan pembangunan tempat-tempat wisata, hotel dan mengembangkan kegiatan perekonomian yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang selama ini cenderung berorientasi ke sektor pertanian menjadi tenaga kerja yang siap pakai di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta agro industri. Berdasarkan fakta di lapangan, hal ini lebih memperkuat paradigma agropolitan yang harus diwujudkan di seluruh wilayah Kota Batu.

**Gambar 2.15**  
**Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kota Batu Tahun 2005-2011**



Sumber : Bappeprov Jawa Timur, 2010 – Data diolah

Gambar 2.15. memperjelas perkembangan tingkat pengangguran terbuka antar waktu, persentasenya, serta tren/kecenderungannya. Meskipun masih di bawah angka TPT Jawa Timur yang mencapai 4,16% pada tahun 2011, Pemerintah Kota Batu telah berhasil menurunkan persentase tingkat pengangguran terbuka dari 10,36% pada tahun 2007 menjadi 7,65% pada tahun 2011 dengan laju penurunan rata-rata 7,03% per tahun.

#### e. Kriminalitas

Kondisi KAMTIBMAS secara umum di Kota Batu masih tergolong kondusif hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendah angka kriminalitas bila dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Jawa Timur. Di samping itu pula ditunjang oleh adanya tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat akan pentingnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam mendukung program Kota Batu sebagai Kota Wisata, hal itu dapat dilihat dari adanya beranekaragaman masyarakat baik suku, agama dan adat istiadat. Dalam menunjang KAMTIBMAS di Kota Batu telah ada POLRESTA Kota Batu yang ditunjang dengan 3 buah POLSEK dan BABINKAMTIBMAS, ditambah adanya Polisi Pariwisata yang khusus melakukan pengamanan di tempat-tempat pariwisata, selain itu ada KORAMIL dan juga didukung oleh SATPOL PP dan SAR penanggulangan Bencana. Pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu yaitu Pengamanan Kegiatan, Pengamanan Unjuk Rasa terpadu, Pengamanan Bencana Alam, Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Pengawasan Perijinan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kodim dan Polres.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda harus dilakukan melalui upaya sosialisasi perda, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan perda secara proporsional dan profesional. Dari sisi substansi pengaturan perlu juga dilakukan reformasi pendekatan penegakan peraturan dari hanya melalui pendekatan *punishment*, perlu dikembangkan pemberian *reward* bagi yang melaksanakan perda dengan baik. Tabel 2.24. menunjukkan jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Batu tahun 2008-2010 yang

menunjukkan kecenderungan yang masih fluktuatif. Secara umum kasus kriminalitas pada periode tersebut didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, perjudian, dan penipuan.

**Tabel 2.24.**  
**Banyaknya Kejahatan Menurut Jenis Tindakan Pidana**  
**Tahun 2008-2010**

No.	Jenis Tindak Pidana	2008	2009	2010
1	Pembunuhan	-	-	0
2	Penganiayaan Berat	8	6	14
3	Perkosaan	-	-	4
4	Penghinaan	-	2	1
5	Perjudian	19	34	18
6	Pemalsuan	1	-	0
7	Pemerasan	1	8	3
8	Pembakaran	11	6	4
9	Pencurian Dengan Kekerasan	7	9	6
10	Pencurian Kendaraan Bermotor	66	122	67
11	Pencurian Kawat Telepon	7	3	3
12	Uang Palsu	-	-	0
13	Pencurian Hewan Ternak	2	10	2
14	Pencurian Dengan Pemberatan	60	103	78
15	Pencurian Biasa	11	41	0
16	Pencurian Kayu / Ilegal Logging	1	2	7
17	Penggelapan	8	3	4
18	Pengeroyokan	3	10	10
19	Penipuan	24	43	23
20	Pengrusakan	2	1	2
21	Penadahan	-	1	0
22	Narkoba	10	15	13
23	Lain - Lain	-	5	-
<b>Kota Batu</b>		<b>241</b>	<b>424</b>	<b>259</b>

Sumber : Polri Daerah Jawa Timur Wilayah Malang Resor Batu, 2011

Pada tahun 2008 tingkat kriminal di Kota Batu sebesar 241 kasus dan tahun 2009 meningkat tajam menjadi 424 kasus kemudian turun menjadi 259 kasus pada tahun 2010. Di sisi lain, jumlah kasus narkoba pada tahun 2008 sebanyak 10 kasus, sedangkan tahun 2009 menjadi 15 kasus atau meningkat sebanyak 5 kasus (50%) dan turun menjadi 13 kasus pada tahun 2010 atau turun 10,33%.

### 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi umum Sosial Budaya di Kota Batu terutama di bidang kesenian dan olahraga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Batu memfasilitasi warga

masyarakat mengembangkan kebebasan berkreasikan dalam seni budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana seni budaya, dan pengembangan event wisata budaya. Tabel 2.25. menunjukkan banyaknya organisasi kesenian dan budaya di Kota Batu per kecamatan dalam kondisi terakhir.

**Tabel 2.25.**  
**Organisasi Kesenian dan Budaya Kota Batu**  
**Tahun 2010**

No.	Jenis Organisasi	Batu	Junrejo	Bumiaji	Jumlah
1	Reog	5	1	7	13
2	Pencak Silat	18	11	11	40
3	Karawitan	7	0	6	13
4	Orkes Melayu	18	2	4	24
5	Campursari	11	3	5	19
6	Kuda Lumping	21	7	16	44
7	Keroncong	2	0	0	2
8	Ketoprak	1	0	0	1
9	Sanggar Tari	9	1	0	10
10	Teater	2	0	0	2
11	Ludruk	3	1	0	4
12	Hadrah	4	1	1	6
13	Sanduk	10	2	5	17
14	Gema Sholawat	22	37	29	88
15	Sanggar Seni	3	3	1	7
16	Pedalangan	1	1	5	7
17	Pecut/Topeng	1	0	0	1
18	Elekton	1	0	2	3
19	Bantengan	23	9	13	45
20	Gong	0	0	0	0
21	Wayang Orang	0	1	0	1
22	Gambus	1	1	2	4
23	Mocopat	1	0	0	1
24	Kentrung	0	0	1	1
25	Debus	0	0	1	1
26	Drum Band	0	1	0	1
27	Leang leong	0	1	0	1
28	Reog Kendang	0	1	0	1
29	Galeri	1	0	0	1
	<b>Kota Batu</b>	<b>165</b>	<b>84</b>	<b>109</b>	<b>358</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, 2011

Di seluruh wilayah Kota batu terdapat sekitar 358 organisasi seni dan budaya yang tersebar sebanyak 165 organisasi di kecamatan Batu, 84 organisasi di kecamatan Junrejo dan 109 organisasi di kecamatan Bumiaji. Banyaknya dan beragamnya organisasi seni dan budaya tersebut menggambarkan keragaman budaya yang sudah semestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang sehingga terjaga kelestariannya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Batu melakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun nasional, meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, dan pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi. Olahraga yang banyak menyedot perhatian masyarakat pada saat ini adalah sepak bola dimana Kota Batu memiliki Perstuan Sepak Bola Kota Batu (Persikoba) yang saat ini tampil di Divisi Satu. Namun demikian olah raga lainnya juga cukup marak di Kota Apel ini seperti Badminton, Bola Basket, Paralayang, Bersepeda, Beladiri, dan sebagainya. Beberapa kali even nasional maupun internasional dilaksanakan di Kota Batu seperti Paralayang yang diikuti atlit mancanegara. Kota Batu juga memiliki 3 (tiga) orang atlit yang mewakili di tingkat SEA Games dan bahkan 2 orang di antaranya berhasil meraih medali emas.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Pelayanan Dasar

#### a. Pendidikan dasar dan menengah

Sekolah adalah sarana pendidikan yang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang handal dalam menyukseskan pembangunan. Sekolah TK, SD, SLTP, hingga SMU sudah tersedia memadai di Kota Batu baik itu sekolah negeri Madrasah maupun swasta. Sekolah SD dan SLTP tersebar di masing-masing kecamatan secara merata. Jumlah SD Negeri di Kota Batu yang tersebar masing-masing di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (27 Sekolah); Kecamatan Junrejo (15 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (23 Sekolah). Jumlah SMP negeri di Kota Batu sebanyak 7 sekolah yakni di Kecamatan Batu (2 Sekolah); Kecamatan Junrejo (1 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (4 Sekolah). Hanya ada 2 Sekolah SMU Negeri di Kota Batu yang terdapat masing-masing terdapat di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Selain itu terdapat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebanyak 3 sekolah yang juga tersebar merata di tiga kecamatan. Selain sekolah-sekolah negeri tersebar sekolah-sekolah swasta lainnya di masing-masing kecamatan sampai saat ini Perguruan Tinggi negeri belum tersedia di Kota Batu. Tabel 2.26 menunjukkan indikator Pemerataan Pendidikan.

**Tabel 2.26**  
**Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Tahun 2008/2009**

No	Indikator	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1.	Rasio			
	-Siswa/sekolah	228	331	313
	-Siswa/Kelas	34	36	31
	-Siswa/Guru	20	14	9
	-kelas/R.Kelas	1.03	2.66	1.12
	-Kelas/Guru	0.59	1.00	0.29
2.	Angka Melanjutkan	-	99.63	89.20
3.	Kepadatan Penduduk	0.14	0.11	0.07

Sumber : Lakip Dinas Pendidikan Kota Batu, 2009

Rasio murid taman kanak-kanak terhadap sekolah sebesar 71,45 yang berarti untuk setiap sekolah mem-bimbing sebanyak 71 orang siswa taman kanak-kanak di Kota Batu. Hal ini menggambarkan beban sekolah untuk memberikan pendidikan dasar cukup berat, namun dilain pihak rasio ini menunjukkan perkembangan di bi-dang pendidikan karena animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pra sekolah semakin meningkat.

Selanjutnya, meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS Kota Batu untuk kelompok umur sekolah dasar (7-12 tahun) pada tahun 2007 sebesar 99,41 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia sekolah dasar nyaris semuanya sekolah di usia ini yaitu sebesar 99 lebih anak sedang sekolah. Selanjutnya APS untuk usia SMP (13-15 tahun) sebesar 93,82 persen pada tahun 2007, APS untuk usia SMA (16-18 tahun) sebesar 73,14 persen. Apabila diperhatikan semua usia sekolah, tampak bahwa semakin tinggi usia sekolah Angka Partisipasi Sekolahnya semakin kecil. Dari Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase APS Kota Batu mengalami peningkatan pada kelompok umur sekolah dasar (7-12 tahun), kelompok umur usia SMP (13-15 tahun) dan kelompok usia SMA (16-18 tahun).

**Tabel 2.27.**  
**Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Kota Batu Tahun 2005 s/d 2009**

Usia Sekolah	2005	2006	2007	2008	2009
7 – 12	97,46	99,12	99,41	99,18	99,18
13 - 15	90,21	91,74	93,82	92,49	92,49
16 - 18	69,26	58,68	73,14	70,26	70,26

*Sumber : Hasil Susenas 2005 - 2008 dan Lakip Dinas Pendidikan 2009*

Selama lima tahun terakhir ini, Kota Batu masih menghadapi persoalan pendidikan yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, masih lebarnya kesenjangan partisipasi dalam pendidikan, Fasilitas pendidikan menengah belum merata, kualitas pendidikan relatif masih perlu ditingkatkan, Keterbatasan pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah, serta Manajemen pendidikan belum efektif dan efisien. Melihat beberapa permasalahan pendidikan tadi, Pemerintah Kota Batu memfokuskan kebijakan program pendidikan pada aspek kualitas dan kuantitas melalui prioritas program.

## **b. Kesehatan**

Pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan yang berlangsung, ber-tujuan untuk mencapai kemam-puan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bila-mana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Sarana kesehatan ter-sebut berupa penyediaan sarana Ru-mah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan lain-lain.

Kemudian sebagai penunjang adalah pengadaan tenaga kesehatan. dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Batu proporsi terbesar adalah Posyandu yaitu sebanyak 200 lokasi. Hampir semua RW atau paling tidak dusun di Kota Batu mempunyai Posyandu yang diharapkan aktif melakukan kegiatan terutama penangan / pemantauan kesehatan ibu dan balita.

Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kota batu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 Rumah Sakit Paru-paru
- 2 Rumah Sakit Hasta Brata
- 3 Rumah Sakit Baptis
- 4 Rumah Bersalin Diponegoro
- 5 RS Poliklinik Ikatan Haji
- 6 RS. Islam Sajid
- 7 Rahma Husada
- 8 Puskesmas Junrejo
- 9 Puskesmas Bumiaji
- 10 Puskesmas Beji
- 11 Puskesmas Batu
- 12 Poliklinik Punten
- 13 PMI Kecamatan Batu
- 14 Laboratorium Prodia
- 15 Laboratorium Darsono
- 16 Klinik Bersalin Gantisih
- 17 Klinik Al-Irsyad
- 18 BKIA Margi Rahayu
- 19 Balai Pengobatan YPII
- 20 Balai Pengobatan Elim
- 21 Balai Pengobatan Bathesda
- 22 Apotik Sehat
- 23 Apotik Kimia Farma An Nur
- 24 Apotik Anugra Farma
- 25 Apotik Diponegoro

Fasilitas yang lain antara lain puskesmas sebanyak 4 buah tersebar di 3 Kecamatan di Kota Batu. Berikutnya Rumah Sakit Umum sebanyak 5 buah yaitu RS Paru, RS Hasta Brata, RS Ety Asharto dan RS Haji di Kecamatan Batu dan RS Baptis di Kecamatan Junrejo, Rumah Sakit Bersalin berjumlah 10 buah. Sedangkan untuk tenaga medis yang di bawah Dinas Kesehatan Kota Batu terdiri dari 114 Dokter, 220 perawat, 87 bidan, 20 ahli gizi dan 275 tenaga lainnya.

**Tabel 2.28.**  
**Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Batu**  
**Tahun 2008-2010**

No.	Tenaga Kesehatan	2008	2009	2010
1.	Dokter/ <i>Physicians</i>	127	114	
	a. Umum/ <i>General dan Spesialis/Specialist</i>	68	55	61
	b. Gigi/ <i>Dentish</i>	13	15	16
	c. Spesialis	46	44	55
2.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	3	3	15
3.	Perawat/ <i>Nurses</i>	200	220	220
4.	Bidan/ <i>Midwives</i>	72	87	90
5.	Tenaga Gizi / <i>Nutrisionis</i>	17	20	16

6.	Sarjana Keperawatan	-	-	-
7.	Tenaga Farmasi	27	27	33
8.	Sarjana Farmasi dan Apoteker	-	-	-
9.	Tenaga Sanitarian	6	6	9
10.	Tenaga Terapi Fisik/ <i>Fisioterapi</i>	-	-	-
11.	Tenaga Medis Lainnya	26	26	26
12.	Tenaga Lainnya	216	216	
	<b>Kota Batu</b>	<b>1413</b>	<b>1260</b>	<b>541</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2011

### c. Lingkungan hidup

Wilayah Kota Batu merupakan daerah penyangga hulu DAS Brantas dimana 14 Kabupaten / Kota di Jawa Timur menggantungkan hidupnya. Terjadinya degradasi lingkungan seperti menurunnya kualitas dan kuantitas air di Kota Batu akan mengganggu daerah lainnya. Selain itu seringkali pula muncul permasalahan sampah yang terkadang sulit dikendalikan. Upaya penanganan sampah dan usaha penanganan masalah lingkungan hudaup sangat digalakkan di Kota Batu. Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang juga menjadi bagian penting bagi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat Kota Batu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ketiga unsur ini memiliki fungsi yang sangat vital ketika manusia ingin mencapai tujuan hidup layak, aman dan sejahtera.

Program Pembangunan Perumahan di Kota Batu diindikasikan dengan menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan semakin banyaknya sampah buangan merupakan salah satu permasalahan pembangunan perumahan yang mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat khususnya MBR, Masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah perkotaan, lemahnya manajemen teknis pelayanan kebersihan, belum optimalnya pengelolaan TPA serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan kebersihan, serta Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Selama ini persoalan Lingkungan Hidup di Kota Batu meliputi menurunnya kondisi hutan, meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai, masih tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, makin meningkatnya pencemaran air, menurunnya kualitas udara di perkotaan, lemahnya penegakan hukum pembalakan liar, rendahnya kapasitas pengelola kehutanan, belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan.

Mengingat kondisi fisik dasar wilayah Kota Batu sebagian besar berupa kawasan pegunungan dan perbukitan dengan kondisi topografi sebagian besar bergelombang, terjal dan curam, maka untuk ke depannya di dalam pengembangan kawasan permukiman perlu diarahkan sesuai dengan Rencana Pemanfaatan Ruang. Dalam penataan permukiman dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan prosentase bangunan yang ber IMB, capaiannya masih rendah atau hanya 946 bangunan yang ber IMB atau 2,04% dari jumlah bangunan yang ada sebanyak 46.276 bangunan. Jumlah ini naik sebesar 188,82% dibanding tahun lalu

sebanyak 625 bangunan yang ber IMB. Ruas jalan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu 'Jalan Kota' dan 'Jalan Desa'.

Pemukiman di wilayah Kota Batu terdiri atas 2 jenis yaitu jenis permukiman/perumahan penduduk dan villa. Bangunan permukiman tersebut hampir semuanya merupakan bangunan permanen dengan kondisi bangunan yang beragam. Kawasan perumahan/permukiman penduduk umumnya tersebar merata di setiap wilayah yang ada Kota Batu, dengan pola linier. Kepadatan paling tinggi berada di Kecamatan Batu yaitu di Kelurahan Pesanggrahan tepatnya di sekitar Jalan Panglima Sudirman, Jalan Hasanudin, Jalan Samadi, dan Jalan Cempaka. Untuk wilayah di Kelurahan Ngaglik, kawasan permukiman tersebar di sekitar Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ikhwan Hadi, Jalan Suropati, dan Jalan Abdulgani.

Kawasan permukiman di wilayah Kelurahan Sisir, berada di sekitar jalan Diponegoro, Jalan Minswarso, Jalan Kapten Ibnu, Jalan K.H Agus Salim, Jalan Diran dan untuk Kelurahan Temas yaitu di sekitar Jalan Patimura, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Dewi Sartika. Jumlah bangunan tempat tinggal di wilayah Kecamatan Batu secara keseluruhan sebesar 18.924 unit. Untuk kawasan permukiman yang terdapat pada Kecamatan Bumiaji dan Junrejo, jumlahnya relatif sedikit. Hal ini di sebabkan karena banyaknya kawasan pertanian yang ada di daerah tersebut. Di wilayah Kecamatan Bumiaji bangunan tempat tinggal hanya sekitar 12.741 unit dan wilayah Kecamatan Junrejo sekitar 10.157 unit. Sedangkan untuk kawasan villa lebih banyak tersebar di Kecamatan Batu terutama di Kelurahan Songgokerto yaitu di sekitar Jalan Mawar, Jalan Flamboyan dan daerah sekitar Songgoriti.

Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi sebesar 56,80% dan masyarakat yang terlayani air bersih sebesar 93,73%. Jumlah jaringan air bersih tahun 2006 sebanyak 143 jaringan sedangkan tahun 2005 sebanyak 141 jaringan atau meningkat 1,42%. Sedangkan masyarakat yang terlayani air bersih sampai dengan tahun 2005 sebesar 134.269 jiwa atau sebesar 79,67% dari jumlah penduduk Kota Batu sebanyak 168.544 jiwa. Peningkatan kondisi jaringan irigasi tahun 2006 sebesar 8,33% atau sebanyak 12 buah dibanding tahun 2005 sebanyak 9 buah. peningkatan intensitas tanam pada lahan sawah di Kota Batu yang diairi tahun 2005 seluas 2.528 Ha dibanding luas sawah yang ada di Kota Batu seluas 2.681 Ha atau sebesar 94,29%. Hal ini karena adanya alih fungsi dari areal sawah ke areal permukiman. Pada tahun 2005 intensitas tanam baik tanaman Padi, Jagung dan Palawija tidak mengalami kenaikan, yaitu dua kali setahun untuk tanaman Padi, satu kali untuk Jagung dan tiga kali untuk jenis Palawija.

Seperti diuraikan sebelumnya, sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 111 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan.

Usaha perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah dengan rehabilitasi lingkungan serta kegiatan penataan pengelolaan DAS Brantas dengan mereboisasi hutan, reboisasi DAS Brantas dan reboisasi sumber mata air. Adapun kegiatan nyata yang telah dilakukan adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengelolaan hutan rakyat di mana capaian luas hutan rakyat meningkat dari 250 ha pada tahun 2003 menjadi 500 ha pada tahun 2004 dan tahun 2005 menjadi 520 ha serta Gerakan Penghijauan dengan dicanangkan Program Batu Hijau Lestari.

Upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka dilakukan penataan ruang dengan kegiatan pokok Penyusunan Rencana Tata Ruang

Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang terkait dengan perijinan peruntukan ruang dan bangunan. Untuk mengoptimalkan penataan ruang di Kota Batu telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu di mana Kota Batu terbagi dalam beberapa struktur pusat pelayanan yang pembagiannya berdasarkan adanya potensi kecenderungan (*trend oriented*) juga pada pembentukan struktur ruang yang optimal (*target oriented*) sesuai dengan potensi, kondisi daya dukung lahan dan skenario pembangunan, arahan distribusi penduduk, arahan pemanfaatan ruang serta jaringan jalan yang sudah terbentuk maupun yang akan dikembangkan.

Di sisi lain, secara umum kualitas udara di wilayah Kota Batu masih baik dan di bawah Baku Mutu Udara Ambien, baik di lingkungan pemukiman maupun prasarana wilayah dan pelayanan umum. Parameter CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> serta Pb pada sebagian besar wilayah dapat dikategorikan masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambien, namun parameter debu dan kebisingan pada beberapa tempat nilainya melampaui Baku Mutu yang ditetapkan, khususnya titik/lokasi yang berdekatan ataupun berasal dari sumber bergerak (*mobile source*) berupa arus lalu lintas yang padat, yang terjadi pada pagi dan siang hari.

Kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu sumber polutan di wilayah Kota Batu, hal ini terkait dengan umur dan jenis mesin dari kendaraan yang masih layak jalan. Uji kir yang dilaksanakan setiap tahun hanya memeriksa kelayakan komponen kendaraan, sehingga belum mampu menelaah emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan. Masih rendahnya kegiatan pengujian emisi oleh pemilik kendaraan merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran udara sumber emisi bergerak, baik dari kendaraan jenis truk, bus, pick up, mobil penumpang, sepeda motor serta kendaraan bermotor lainnya

Masalah pengelolaan sampah juga mendesak untuk dipecahkan, terlebih ketika Pemerintah Kota menetapkan target untuk meraih piala adipura pada tahun 2009. Tumpukan sampah yang menggunung bisa mengakibatkan pencemaran udara (berupa bau busuk), menurunkan kualitas kesehatan lingkungan (sumber jangkitan penyakit) dan mengganggu keindahan kota. Oleh karena itu pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga menjadi tuntutan tersendiri bagi upaya meraih kembali piala adipura melalui peningkatan tata kelola persampahan.

Sumber limbah padat di wilayah Kota Batu umumnya berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, industri, komersial, taman, jalan dan sungai. Mengingat produksi sampah yang lebih besar daripada kapasitas pengelolaan sampah, maka upaya untuk mengurangi produksi sampah merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Kampanye *reduce*, *reuse* dan *recycle* dalam setiap penggunaan barang merupakan tindakan nyata untuk mengurangi produksi sampah.

Sejak tahun 2009, Pemerintah Kota mengangkat isu lingkungan dalam kampanye yang bertajuk "Batu Hijau" (*Batu Goes Green*). Dalam konteks pengurangan produksi sampah, kampanye tersebut dimaknai dengan melakukan upaya-upaya riil untuk mengurangi semaksimal mungkin penggunaan barang yang menghasilkan sampah non organik dan tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini, prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* menjadi relevan untuk menekan produksi sampah dan meningkatkan kelestarian lingkungan, dengan mengurangi konsumsi energi. Sehingga konsep pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana.

Issue strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan, maka menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar dengan terjadinya banjir dan tanah longsor. Tabel 2.29. menunjukkan perkembangan luas kawasan hutan di wilayah Kota batu tahun 2008-2010.

**Tabel 2.29.**  
**Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi (Ha)**  
**Tahun 2008-2010**

Kecamatan		Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Hutan Produksi	Hutan Lain-lain
<b>2010</b>					
1.	Batu	387.2	0.0	728.6	-
2.	Junrejo	918.2	0.0	392.9	-
3.	Bumiaji	1,664.4	4,641.2	2,338.6	-
<b>Jumlah</b>		<b>2,970</b>	<b>4,641</b>	<b>3,460</b>	<b>0</b>
<b>2009</b>					
1.	Batu	383.0	-	728.6	4.20
2.	Junrejo	918.2	-	392.9	-
3.	Bumiaji	1,400	4,641	1,614	-
<b>Jumlah</b>		<b>2,701</b>	<b>4,641</b>	<b>2,735</b>	<b>4</b>
<b>2008</b>					
1.	Batu	601.1	-	972.6	-
2.	Junrejo	937.2	-	405.1	-
3.	Bumiaji	1,561.3	5,342.5	1740.5	-
<b>Jumlah</b>		<b>3,099.6</b>	<b>5,342.5</b>	<b>3,118.2</b>	<b>-</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota batu, 2011

Salah satu penyebab terjadinya bencana adalah adanya efek pemanasan global. Pemanasan global merupakan peningkatan secara gradual temperatur permukaan global akibat efek emisi gas-gas rumah kaca (terutama CO<sub>2</sub>) dari aktivitas manusia (antropogenik). Musim kemarau yang cenderung lebih panjang di Kota Batu serta interval waktu pergantian musim yang tidak beraturan dalam tahun-tahun terakhir, menunjukkan tanda-tanda pemanasan global mungkin sudah mulai terlihat di Indonesia, tak terkecuali Kota Batu.

#### d. Sarana dan prasarana umum

Pola jaringan jalan Kota Batu membentuk pola jaringan dengan jalan utama membentuk pola linier konsentris. Konstruksi jaringan jalan di Kota Batu sebagian besar merupakan jalan aspal dengan kondisi baik, terutama yang melintasi jalur-jalur utama Kota Batu seperti Jalan P. Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Abdul Gani, Jalan Dewi Sartika dan jalan utama lainnya. Panjang jalan berdasarkan pengelolaan dan jenisnya di Kota Batu yaitu jalan kabupaten panjang sekitar 242,96 Km dan jalan propinsi panjang 39,5 Km. Fasilitas transportasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Kota Batu selama 7 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sistem jaringan jalan regional (jalan kolektor primer dan lokal primer) Kota Batu secara keseluruhan membentuk pola radial atau memusat ke pusat kota (alun-alun dan sekitarnya), yaitu dari arah Utara (dari Cangar, Sidomulyo, dan Giripurno, Pandanrejo, Bumiaji), arah Selatan (dari Junrejo, Tlekung, Oro-oro Ombo, Temas), arah Barat (dari Songgokerto dan Pesanggrahan), arah Timur (dari Dadaprejo, Mojorejo, Beji, dan Temas). Sedangkan sistem jaringan jalan kota (arteri sekunder dan kolektor sekunder) membentuk pola *grid* yang dominan berada di Kecamatan Batu. Sedangkan jalan-jalan desa (jalan lokal sekunder dan lingkungan) didominasi pola linier dan *grid*.

Seiring dengan semakin meningkatkan pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional jalan propinsi dan kotamadya harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kotamadya Batu mencapai 490,83 Km, terbagi atas jalan propinsi sepanjang 19,00 km dan jalan Kotamadya 471,83 km.

**Tabel 2.30.**  
**Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Permukaan Jalan**  
**Tahun 2008-2010**

Kategori		2008			2009			2010			
		Nasio nal	Propi nsi	Kota	Nasi onal	Propi nsi	Kota	Nasi onal	Propi nsi	Kota	
I.	<b>Jenis Permukaan</b>										
	1.	Aspal	-	19.00	308.24	-	19.00	308.24		19.00	308.24
	2.	Kerikil	-	-	74.50	-	-	74.50			77.50
	3.	Tanah	-	-	39.09	-	-	39.09			36.09
	4.	Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	50.00			50.00
	<b>Jumlah</b>		-	<b>19.00</b>	<b>421.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>
II.	<b>Kondisi Jalan</b>										
	1.	Baik	-	-	95.83	-	-	95.83			110.83
	2.	Sedang	-	19.00	202.18	-	19.00	202.18		19.00	197.18
	3.	Rusak ringan	-	-	84.83	-	-	109.83			104.83
	4.	Rusak berat	-	-	38.99	-	-	63.99			58.99
	<b>Jumlah</b>		-	<b>19.00</b>	<b>421.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>
III.	<b>Kelas Jalan</b>										
	1.	Kelas I	-	19.00	-	-	19.00	-		19.00	-
	2.	Kelas II	-	-	39.95	-	-	39.95			39.95
	3.	Kelas III	-	-	-	-	-	-			-
	4.	Kelas IIIA	-	-	130.03	-	-	130.03			130.03
	5.	Kelas IIIB	-	-	251.85	-	-	251.85			251.85
	6.	Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-			-
	7.	Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	50.00			50.00
	<b>Jumlah</b>		-	<b>19.00</b>	<b>421.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>	-	<b>19.00</b>	<b>471.83</b>

Jika diamati menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 66,67 persen dari total panjang jalan. Berikutnya berupa kerikil sebesar 15,18 persen dan tanah sebesar 7,96 persen.

Gambaran mengenai kondisi permukaan jalan yang dibawah wewenang Daerah Tingkat I, maupun di bawah wewenang Tingkat II disajikan pada Tabel 2.30. Jika dilihat dari kondisinya, pada tahun 2009 sekitar 19,52 persen termasuk dalam kategori baik, 45,06 persen kategori sedang, 22,38 persen rusak ringan dan sisanya masuk kategori rusak berat.

Selanjutnya sarana infrastruktur irigasi. Sumber irigasi yang ada di Kota Batu berasal dari Sumber Brantas, Kali Brantas dan Sumber Metro. Sumber Brantas melayani 18 desa dengan baku sawah teknis 909 Ha, semi teknis 124 Ha dan non teknis 58 Ha. Kali Brantas melayani 14 desa dengan baku sawah teknis 810 Ha, sawah semi teknis 459 Ha. Sumber Metro melayani 4 desa dengan baku sawah teknis 218 Ha, semi teknis 4 Ha dan non teknis 31 Ha.

Berdasarkan kondisi saluran irigasi dibedakan atas saluran irigasi teknis, irigasi semi teknis dan irigasi non teknis. Sistem drainase di kawasan perkotaan belum berfungsi dengan baik, khususnya di beberapa tempat sistem drainasenya perlu penataan, mengingat pada musim penghujan daerah tersebut sering terjadi genangan, seperti di sekitar kawasan alun-alun kota.

Sistem persampahan di Kota Batu dikumpulkan secara komunal oleh petugas persampahan yang selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) setempat. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah sarana kebersihan di Kota Batu berupa sarana pengangkutan sampah yaitu *amroll truck* sejumlah 7 buah, *dump truck* sejumlah 5 buah, *open truck* sejumlah 1 buah, *shovel* sejumlah 1 buah dan motor gerobak sejumlah 1 buah. Jumlah tong sampah sebanyak 155 unit yang tersebar di jalan-jalan protokol di antaranya di Jl. Diponegoro sejumlah 45 unit, Jl. Gajah Mada sejumlah 8 unit, Jl. Panglima Sudirman sejumlah 51 unit, Alun-alun Kota Batu sejumlah 20 unit, Kompleks Pertokoan Plaza sejumlah 2 unit, Jl. Brantas sejumlah 14 unit, PMK sejumlah 1 unit dan Jl. Trunojoyo sejumlah 14 unit. Jumlah sarana gerobak sampah sebanyak 56 unit. Sedangkan jumlah prasarana kebersihan berupa TPS di Kota Batu adalah 12 unit dengan kondisi baik dan TPA berjumlah 1 yang berlokasi di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu dengan luas  $\pm 1,2$  Ha.

Melengkapi ketersediaan infrastruktur layanan umum, penduduk juga memerlukan infrastruktur sosial terutama fasilitas peribadatan. Penduduk Kota Batu menganut berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara damai. Seperti halnya agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, penduduk Kota Batu sebagian besar memeluk agama Islam yaitu 172.982 jiwa. Berikutnya agama Kristen 5.986 jiwa, agama Katolik 3.653 jiwa, agama Budha 1.147 jiwa serta Hindu 342 jiwa.

Sarana yang dimiliki untuk menunjang kehidupan beragama terlihat dari banyaknya sarana ibadah. Sejalan dengan banyaknya penganut agama Islam, jumlah sarana ibadah terbanyak adalah masjid dan surau/langgar yang dapat dijumpai pada setiap desa di Kota Batu. Jumlah masjid dan langgar yang berada di Kota Batu masing-masing tercatat sebanyak 139 buah dan 428 buah. Berikutnya Gereja berjumlah 37 buah, Vihara berjumlah 7 buah dan Pura berjumlah 2 buah.

Fasilitas peribadatan yang ada di kota Batu berupa masjid sejumlah 138 unit, langgar/musholla sejumlah 397 unit, Gereja sejumlah 14 unit, Wihara sejumlah 5 unit dan Pura sejumlah 1 unit yang cenderung menyebar di setiap kecamatan. Sebagian besar penduduk Kota Batu beragama Islam, hal ini bisa dilihat dari penyebaran jumlah fasilitas peribadatan yang mendominasi adalah masjid dan langgar/ musholla.

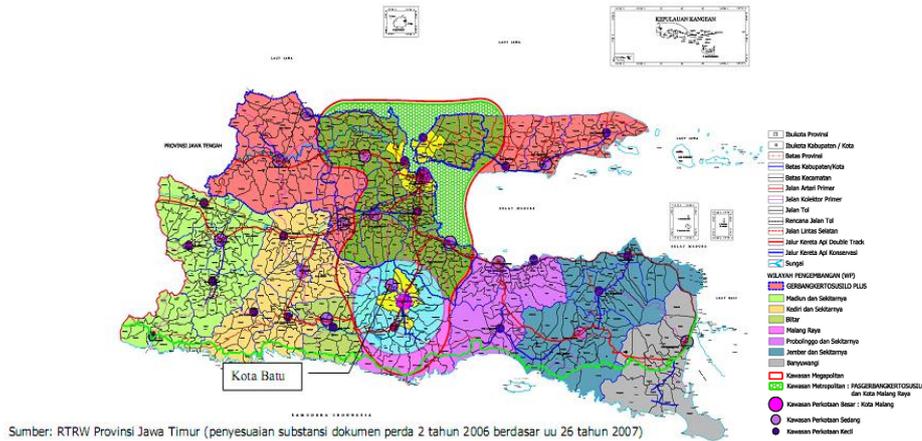
Pelayanan dasar Pemerintah Kota Batu mengenai urusan yang terkait dengan pembangunan kesalehan sosial ini ditunjukkan dengan indikator Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk tahun 2011 sebesar 3,22 per Seribu Penduduk. Besaran rasio ini menunjukkan bahwa setiap 3 tempat ibadah akan dipergunakan oleh 1.000 penduduk pada suatu wilayah di Kota Batu.

#### **e. Penataan ruang**

Kota Batu termasuk dalam Orde IIB, yakni Kota - Perkotaan yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan. Berdasarkan potensi perkembangan kota - perkotaan di Jawa Timur, maka Kota Batu termasuk sebagai Perkotaan Metropolitan Malang Raya dengan jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa yang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen dan sekitarnya. Fungsi SWP Malang Raya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri. Fungsi pusat pengembangan

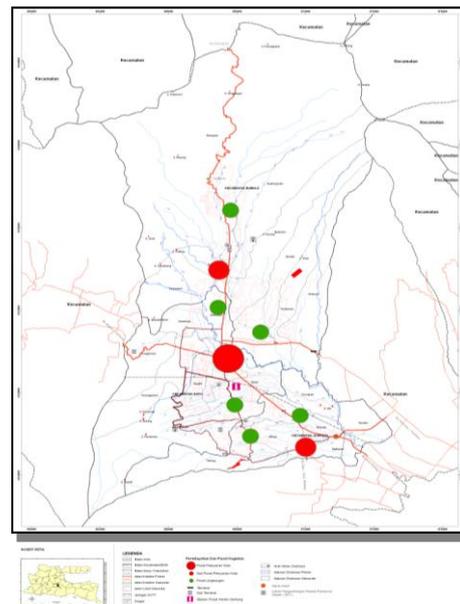
adalah: Pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, prasarana wisata. Gambar 2.16 menunjukkan peta rencana struktur ruang perkotaan provinsi Jawa Timur.

**Gambar 2.16**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Perkotaan Provinsi Jawa Timur**



Sistem dan fungsi perwilayahan Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWK direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWK di wilayah Kota Batu. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWK satu dengan pusat kegiatan BWK lainnya dan antara psuat kegiatan dengan kawasan agropolitan disetiap BWK. Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan. Peta struktur ruang Kota batu disajikan pada Gambar 2.17.

**Gambar 2.17**  
**Peta Struktur Ruang Kota Batu**



**a. BWK I**

BWK I sebagai pusat kota dengan pusat pelayanan berada di Kelurahan Sisir dan Kelurahan Ngaglik. BWK I Kecamatan Batu meliputi wilayah administarsi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, dan Desa Sidomulyo. BWK I memiliki luas wilayah 45,46 km2 merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tertinggi. Fungsi BWK I sebagai pusat pelayanan skala

kota yang meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, komersial modern, wisata dan akomodasi skala regional dan fasilitas pelayanan skala Kota Batu.

#### **b. BWK II**

BWK II sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo. BWK II Kecamatan Junrejo meliputi wilayah administrasi Desa Tlekung, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Pendem dan Desa Dadaprejo. BWK II memiliki luas wilayah 25,65 km<sup>2</sup> merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan sedang.

Pusat BWK II Kecamatan Junrejo terdapat di Desa Junrejo. Fungsi BWK II yang berperan sebagai sub pusat pelayanan kota yang meliputi : pusat pelayanan perkantoran pemerintahan dan militer, fasilitas pelayanan (kesehatan, pendidikan tinggi), perkebunan dan industri kecil (kerajinan).

#### **c. BWK III**

BWK III sebagai kawasan pengembangan agropolitan dan agrotourism dengan pusat pelayanan di Desa Punten. BWK III Kecamatan Bumiaji meliputi wilayah administrasi Desa Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, dan Desa Sumberbrantas. BWK III memiliki luas wilayah 127,98 km<sup>2</sup> merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan rendah dan dinamisasi oleh kawasan pertanian. Pusat BWK III Kecamatan Bumiaji terdapat di Desa Punten. Fungsi BWK III yang berperan sebagai sub pusat pelayanan kota yang meliputi: ekotourism dan agrotourism, perkebunan dan hortikultura, fasilitas pelayanan (pendidikan), perdagangan regional agribisnis, dan pusat pelayanan transportasi regional.

#### **f. Perhubungan**

Sebagai pusat aglomerasi perkotaan, Kota Batu memerlukan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat di bidang perdagangan, industri hasil pertanian (agroindustri), dan jasa karena Kota Batu memberikan pelayanan sebagai pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik bagi warga kota sendiri maupun masyarakat di daerah-daerah sekitarnya. Pusat-pusat perdagangan dan jasa yang saat ini berorientasi di pusat kota dan berjajar di jalan-jalan protokol utama sudah saatnya harus disebar kepusat-pusat pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah yang kurang berkembang agar tercapai pemerataan fasilitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah-wilayah *hinterland* kota.

Pola pergerakan kendaraan yang saat ini *linear concentric* harus segera dirubah menjadi *radial concentric*, artinya pemerintah kota harus segera mengembangkan jalan-jalan *inner ringroad* dan *outer ringroad* sebagai pemecah pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal. Segera direalisasikan pengembangan jaringan jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat, serta Lingkar Utara. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dengan proporsi mencapai 82,54%. Moda transportasi massal yang nyaman menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk direalisasikan. Agar masyarakat tetap nyaman bermobilisasi dengan menggunakan transportasi massal, antara lain adalah Jalur-jalur Bus Kota, sehingga kesemrawutan lalu lintas dapat ditekan juga secara umum terjadi penghematan penggunaan BBM yang berdampak pada pengeksploitasian SDA secara bijak.

Berbagai permasalahan terkait dengan perhubungan yang masih terjadi dan ditemui di langan antara lain:

- a) Kondisi kantor yang kurang memadai dikarenakan bangunan sudah terlalu tua, sehingga tingkat kerusakan yang sudah berat membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk pembenahannya.
- b) Kelengkapan sarana perkantoran yang kurang memadai, juga mempengaruhi kinerja pegawai Contoh. Kurangnya kelengkapan Computer, kurangnya meubelair (meja, kursi, lemari arsip).
- c) Lokasi perkantoran yang terpencar menghambat koordinasi dan kecukupan data-data manakala diperlukan secara mendadak ( Kasi pengujian di Karanglo, Bidang Postel berlokasi di Jalan TVRI Dusun Dresel).
- d) Pelaksanaan semua kegiatan tidak mengalami hambatan yang berarti. Permasalahan yang tersisa adalah tidak semua wilayah dapat terpenuhi alat perlengkapan dan fasilitas jalannya dikarenakan minimnya anggaran
- e) Sering terjadi kemacetan khususnya di hari libur di beberapa titik Kota batu
- f) Belum lengkapnya Data manajemen Lalu lintas Di Kota batu
- g) Banyaknya pengguna jalan yang kurang mematuhi peraturan lalu-lintas
- h) Kurangnya disiplin bagi pengguna jalan untuk tertib berlalu-lintas
- i) Masih banyak jukir yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas
- j) Masih tertibnya jukir dalam penyetoran retribusi parkir kepada dinas perhubungan
- k) Maraknya jukir-jukir liar
- l) Banyaknya lahan parkir yang tidak memenuhi syarat/rusak terutama pada area parkir pasar batu
- m) Pemanfaatan lahan parkir sebagai tempat PKL di Pasar Batu

### **2.3.2. Pelayanan Penunjang**

#### **a. Penanaman modal**

Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa dengan menarik minat investor dan menanamkan investasinya ke Kota Batu sebanyak-banyaknya, akan sangat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya investasi yang masuk ke Kota Batu tentu saja berdampak multiplier effect yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya terobosan dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Batu dilakukan melalui kajian peluang investasi sektor pariwisata dan pertanian Kota Batu, kajian peluang investasi/peluang bisnis Kawasan Songgoriti, kerjasama dengan pemerintah daerah lain di bidang ekonomi, kerjasama pemerintah daerah dengan pengusaha, Fasilitasi/ Pembentukan Perkuatan Kerjasama dengan Dunia Usaha yang melibatkan 100 orang pelaku usaha, Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi, dan penyusunan profil investasi Kota Batu.

Guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif Pemerintah Kota Batu memberikan jaminan kemudahan kepada para calon investor. Empat jaminan kemudahan itu yaitu Kemudahan perizinan, Kemudahan penyediaan tanah atau lahan, Kemudahan ketersediaan energi listrik dan Kemudahan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan penyelesaian masalah perburuhan secara demokratis.

Jaminan lain yang diberikan yaitu iklim investasi Kota Batu yang lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah lain, juga Sumber Daya Alam yang memadai, Sumber Daya Manusia yang cukup banyak dan suasana sosial politik yang relatif kondusif.

Namun demikian berbagai permasalahan masih ditemui dan terjadi di lapangan akibat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kota Batu, antara lain:

- a) Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kota Batu dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor
- b) Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi, karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD).
- c) Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan.
- d) Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kota Batu.
- e) Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah
- f) Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM
- g) Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung
- h) Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan

#### **b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yakni rendahnya produktivitas, masih terbatasnya akses ke sumber daya produktif dan rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, rendahnya kinerja koperasi, serta masih kurang kondusifnya iklim usaha. Agar koperasi semakin berkembang di Kota Batu, tahun 2011 Pemerintah Kota Batu berupaya menjalin jaringan kerjasama kemitraan antar koperasi untuk memperluas pemasaran hasil usaha koperasi yang melibatkan 20 koperasi se kota batu dengan biaya APBD Kota Batu sebesar Rp.53.800.300,00.

Jenis usaha koperasi di Kota Batu sebagian besar berupa Koperasi serba Usaha yakni 82 unit dengan anggota sebanyak 25.353 orang, kemudian Koperasi Jasa dan sejenisnya sebanyak 52 unit dengan anggota 4.957 orang, dan berikutnya adalah Koperasi Konsumsi yang beranggotakan 470 orang. Tabel 2.31. menunjukkan perkembangan koperasi di Kota batu tahun 2008-2010. Sampai dengan saat ini Kota Batu belum memiliki koperasi produksi.

**Tabel 2.31.**  
**Koperasi Dirinci Menurut Sifat Usaha**  
**Tahun 2008-2010**

Sifat Usaha		Koperasi			Anggota		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1.	Produksi	-	-	-	-	-	
2.	Konsumsi	-	16	16	-	411	470
3.	Jasa Dan Sejenisnya	52	52	52	4,614	4,761	4,957
4.	Industri Kerajinan	1	1	1	20	20	54
5.	Serba Usaha	82	82	82	19,303	19,582	19,872
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>23,937</b>	<b>24,774</b>	<b>25,353</b>

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kota Batu, 2011*

Koperasi dan UMKM yang jumlahnya cukup memadai merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan ekonomi di pedesaan, dengan terus memberdayakan subsistem lainnya agar berjalan dengan baik. Tujuan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berkesinambungan diharapkan akan menumbuhkan investasi di pedesaan, meningkatkan daya saing antar daerah pedesaan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah desa serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Koperasi aktif 30 unit, tidak aktif 45 unit, kop baru 4 unit sehingga total 133 unit. Sedangkan jumlah bank / LKM 28 unit Jumlah BPR/LKM, 12 di antaranya BPR, dan 3 koperasi.

Melihat permasalahan Koperasi dan UMKM di Kota Batu, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Batu menginisiasi pembentukan LKM melalui pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) di setiap desa dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 25 juta per kelompok wanita, yang diharapkan mampu berperan sebagai lembaga pembiayaan alternatif untuk memberdayakan ekonomi produktif masyarakat miskin di pedesaan. Sampai dengan tahun 2011, jumlah Kopwan yang terbentuk yaitu sebanyak 27 Kopwan yang tersebar di 24 desa/kelurahan. Dalam rangka mewujudkan koperasi wanita yang berdaya saing, maka pada tahun 2011 telah terlaksana Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dengan biaya APBD Kota Batu sebesar Rp.21.689.800,00.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menggerakkan sektor riil yaitu perkuatan kapitalisasi bagi pengembangan modal usaha koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yaitu melalui program dana bergulir dengan bunga lunak dan pembentukan PT JAMKRIDA. Hal tersebut dipandang sangat penting mengingat peran UMKM terhadap pembentukan PDRB Kota Batu cukup signifikan.

Sektor Koperasi dan UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup besar, walaupun memiliki kontribusi nilai tambah yang lebih kecil dari pada skala usaha besar. Untuk itu, UMKM harus mendapat perhatian khusus dalam strategi pembangunan karena sektor ini dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Peningkatan peranan UMKM akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha. Pemenuhan hak atas pekerjaan ini harus disertai dengan penyiapan pendidikan yang lebih berkualitas melalui perbaikan kurikulum baik di lembaga formal maupun non formal.

Dari sisi usaha perdagangan yang sebagian besar merupakan UMKM, pPada tahun 2008, jumlah usaha perdagangan di Kota Batu yang memiliki SIUP berjumlah 198 usaha. Dari jumlah tersebut sekitar 149 usaha merupakan usaha kecil, 43 usaha menengah dan sisanya usaha besar. Walaupun jumlah usaha perdagangan besar di Kota Batu kurang dari 10 persen,

namun dilihat dari kemampuan dalam menyerap tenaga kerja peranannya tidak dapat diabaikan. Pada periode yang sama, jumlah usaha yang berbadan hukum perorangan merupakan jumlah usaha perdagangan yang memiliki ijin SIUP terbanyak.

Pada tahun 2008 jumlah usaha yang berbadan hukum perorangan tercatat sebanyak 151 usaha. Berikutnya CV sebanyak 79 usaha, PT sebanyak 18 usaha dan sisanya badan hukum koperasi dan firma. lembaga keuangan non bank yang turut menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Batu adalah koperasi. Namun dalam mengembangkan usahanya koperasi masih menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu ketergantungan pada modal. Sebagaimana diketahui, modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong usaha. Perkembangan koperasi pri-mer menunjukkan peningkatan selama periode ini. Pada tahun 2008 telah terbentuk sebanyak 135 unit koperasi primer dengan modal sebesar 70,47 milyar dan Sisa Hasil Usaha mencapai 1,699 milyar. Perkembangan dan jenis usaha perdagangan UKM tahun 2008-2010 terlihat pada Tabel 2.32. berikut.

**Tabel 2.32.**  
**Pemilik Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan**  
**Menurut Jenisnya**  
**Tahun 2008-2010**

No.	Jenis Usaha	2008			2009			2010		
		Mikro	Menengah	Kecil	Mikro	Menengah	Kecil	Mikro	Menengah	Kecil
1.	Pracangan	-	-	1	-	-	-	0	0	0
2.	Bahan Bangunan	1	8	12	2	6	16	0	1	12
3.	Palawija	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	Makanan/Minuman	-	5	34	-	5	59	20	3	56
5.	Mebel	-	1	5	1	-	4	0	0	1
6.	Tekstil, Sepatu, dan Pakaian	1	2	10	-	2	6	1	1	14
7.	Palenan	-	-	3	-	-	1	0	0	0
8.	Emas dan Perhiasan	2	-	-	-	-	2	0	1	1
9.	TV, Radio, dan Tape	-	5	13	-	-	-	0	0	0
10.	Alat-Alat Olahraga	-	-	1	-	-	-	0	0	1
11.	Lain-Lain	2	22	70	11	36	117	8	36	203
<b>Kota Batu</b>		<b>6</b>	<b>43</b>	<b>149</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>205</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>288</b>

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kota Batu, 2011*

Untuk mendukung agenda Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Kota Batu melakukan upaya terobosan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha. 2.33. mencatat besarnya kredit untuk UKM yang diberikan oleh kalangan perbankan di Kota Batu tahun 2008-2010. Berbagai program dan kegiatan selama tahun 2011 antara lain Pembinaan Pengembangan Usaha bagi 40 Pelaku UMKM, Pendampingan Bagi 20 anggota Kelompok/sentra Peternak Kelinci, Pemberian dana bergulir terhadap 200 pelaku UKM, Penyediaan ruang Pamer Produk UMKM dan Klinik bagi UMKM, Partisipasi pada pameran produk unggulan daerah di tingkat regional.

**Tabel 2.33.**  
**Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekonomi**  
**Tahun 2008-2010**

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah Kredit		
		2008	2009	2010
1	Pertanian	8,218	108,169	180,937
2	Pertambangan		0	0
3	Perindustrian	653	7,262	11,532
4	Listrik, Gas dan Air		43	0
5	Konstruksi		3,858	57,853
6	Perdagangan	49,744	711,208	1,004,899
7	Pengangkutan		2,828	4,362
8	Jasa - Jasa	31,083	450,988	244,737
9	Lainnya	11,604	163,702	231,810
	<b>Jumlah</b>	<b>101,302</b>	<b>1,448,058</b>	<b>1,736,130</b>

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kota Batu, 2011*

#### c. Kependudukan dan Catatan sipil

Kependudukan pada umumnya merupakan dan menjadi kontroversi tersendiri di berbagai daerah tidak terkecuali di Kota batu. Jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2011 berdasarkan data sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebanyak 202.527 jiwa. Jumlah dimaksud terdata melalui SIAK per 30 Desember 2011. Namun demikian, Badan Pusat Statistik Kota Batu melaporkan jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk (secara menyeluruh) adalah 190.062 jiwa dengan sex ratio 97,97 yang telah dipublikasikan secara nasional oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Terlepas dari perbedaan tersebut, peraturan perundangan yang berlaku telah menetapkan bahwa data BPS merupakan data yang dianggap valid sehingga Pemerintah Pusat menetapkan data BPS tersebut sebagai satu-satunya data yang dapat dipakai untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Program yang telah dilakukan adalah (1) Peningkatan SDM Dalam Rangka Pelaksanaan Alih Program SIMDUK ke SIAK; (2) Penyuluhan Kependudukan Dalam Rangka Peralihan Program SIMDUK Ke SIAK; (3) Pengadaan blangko kutipan akte dan buku Register Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja; (4) Pengadaan komputer Pendokumentasian Penelahaan Data Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2009 untuk urusan ini diantaranya adalah:

- a) Tertibnya Administrasi Kependudukan
- b) Terlaksananya kegiatan e-KTP dengan tertib dan lancar
- c) Meningkatnya kemudahan browser database kependudukan
- d) Bertambahnya tenaga operator pelaksanaan e-KTP
- e) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya e-KTP

- f) Meningkatnya kepemilikan KTP elektronik bagi masyarakat Kota Batu
- g) Meningkatnya pelayanan pencetakan dokumen pencatatan sipil
- h) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan yang memungkinkan pemerintah Kota Batu memiliki database kependudukan yang lengkap dan akurat.
- i) Adanya Laporan Identifikasi Distribusi Penduduk tahun 2010 untuk pelaksanaan monitoring perkembangan penduduk;
- j) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota batu
- k) Terdapatnya Laporan Perkembangan Penduduk di 24 desa/kelurahan

Terkait dengan bidang kependudukan beberapa masalah yang ditemui antara lain:

- a) Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil, karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan.
- b) Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No.23 tahun 2009 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2008.
- c) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta catatan sipil
- d) Banyaknya pemecahan Kartu Keluarga (KK)
- e) Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah di bawah tangan, akta nikah hilang/rusak).
- f) Pelaksanaan proses KTP secara on line di tingkat kecamatan belum sempurna karena pemasangan tower di masing-masing kecamatan belum terlaksana sehingga menggunakan sarana telepon.
- g) Adanya masa berlaku KTP habis dan usia wajib KTP bagi pemula.
- h) Belum meratanya pemetaan secara menyeluruh di wilayah desa dan kelurahan.
- i) Belum tersedia papan data untuk menyajikan informasi perkembangan penduduk.

#### **d. Ketenagakerjaan**

Selama ini permasalahan tenaga kerja di Kota Batu meliputi Pertambahan Angkatan Kerja yang lebih besar dari pada lapangan kerja, Rendahnya Kualitas dan Ketrampilan Tenaga Kerja, Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Rendahnya Mutu dan Relevansi Pendidikan terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja, Kurangnya Informasi Pasar Kerja dan Rendahnya Efektifitas Bursa Kerja serta Terbatasnya Jaringan Pelayanan Bursa Kerja.

Mencermati beberapa persoalan lapangan kerja di Kota Batu, prioritas pembangunan tahun 2011 dilaksanakan melalui strategi kebijakan dan program antara lain Program peningkatan kapasitas kelembagaan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengembangan industrial dan syarikat kerja, Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, serta Perluasan dan penempatan tenaga kerja.

Prioritas pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batu pada tahun 2012 hanya tersisa sebanyak Enam koma Lima Persen (6,50 Persen) saja

dari jumlah angkatan kerja di Kota Batu. Untuk mewujudkan hal ini pada tahun 2011 Pemerintah Kota Batu melaksanakan melalui 3 (Tiga) strategi yaitu Perluasan lapangan kerja, Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan serta Memberdayakan ekonomi rakyat miskin.

#### **e. Pemberdayaan perempuan dan PA**

Kebijakan yang berpihak pada peningkatan peran kaum perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan, telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan gender ini, masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari angka partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan, perempuan dalam posisi manajer, staf teknis, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah dilakukan, namun demikian jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak semakin berkurang.

Kemiskinan di Kota Batu akan menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun di masa mendatang jumlah kemiskinan dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin seperti kenaikan harga BBM secara langsung akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin.

Permasalahan perempuan dan kesetaraan gender di Kota Batu adalah rendahnya kualitas dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih banyaknya Peraturan perundangan yang bias gender, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta terbatasnya akses sumber daya pembangunan.

Melihat persoalan ini peningkatan kualitas dan peran perempuan dan kesetaraan gender dilaksanakan melalui dua prioritas yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.

Didasarkan pada peningkatan peran wanita dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha yang dilakukan secara berkelompok bersama sesama kaumnya.

Salah satu programnya yaitu pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi pada diri perempuan, sehingga dirinya memungkinkan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Pendekatan pembangunan dengan memberdayakan perempuan secara merata dan adil, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Fokus kebijakan Pemerintah Kota Batu terhadap pengarusutamaan gender ditetapkan menjadi salah satu strategi pokok dalam pembangunan Kota Batu. Untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender, Pemerintah Kota Batu pada tahun 2011 melaksanakan berbagai kegiatan melalui kegiatan gerakan pemberdayaan kepada Kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Batu.

Sasaran Pendidikan Keluarga Sejahtera (PKK) ini penting karena memiliki peranan penting terhadap jalannya program-program pemerintah. PKK juga memiliki jaringan sampai Dasa Wisma di tingkat Rukun Tetangga (RT). Selain itu, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersinergi dengan PKK masing-masing telah menjalankan program dengan hasil yang baik.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan dan membangun kemandirian perempuan dilakukan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan, pemanfaatan maupun pengolahan potensi lokal yang semula tidak bernilai ekonomi dirubah menjadi barang olahan yang bernilai produktif untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Selain itu, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dilaksanakan juga melalui Peran PKK untuk memberikan dukungan solusi terhadap kebijakan dan program prioritas sesuai dengan isu dan kebutuhan, dengan sasaran untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pola asuh yang sehat, sosialisasi Keluarga Berencana (KB) serta penanganan masalah gizi buruk.

Akses pelayanan kesehatan dan pola asuh yang sehat dilaksanakan melalui pemberian gizi keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah gizi masyarakat adalah rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi, cara pandang terhadap pangan yang masih terfokus pada penampilan dan cita rasa. Bahkan faktor pendidikan juga berpengaruh pada pola konsumsi pangan dalam keluarga.

Masalah gizi juga dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ikan pada setiap keluarga yang masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah gizi keluarga adalah dengan menggalakkan masyarakat suka mengkonsumsi ikan. Sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat besar bagi masyarakat Kota Batu, karena ikan mengandung protein tinggi yang menyehatkan hingga bisa mendukung SDM unggul.

Capaian kinerja agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan sebagai bagian dari pelayanan dasar Pemerintah Kota Batu, ditunjukkan dengan indikator Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Batu Tahun 2011 sebanyak 15 Kasus di mana hanya 1 kasus yang dilimpahkan sampai ke tingkat pengadilan.

#### **f. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program KB adalah salah satu program pro rakyat untuk penanggulangan kemiskinan dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju keluarga bahagia sejahtera, di samping berfungsi untuk mengendalikan kelahiran. Pemerintah Kota Batu perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan KB yang lebih berkualitas dengan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling sebagai kebutuhan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui KB serta dalam upaya pengendalian penduduk Kota Batu.

Secara lebih spesifik tujuan dari kegiatan ini adalah: (a) meningkatkan mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan dan pembinaan program KB, (b) Meningkatkan kesertaan ber KB melalui peningkatan akses dan pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan lainnya, (c) Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB, (d) Meningkatkan advokasi dan KIE program KB khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau, serta (e) Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun di dalam keluarga.

Pembangunan bidang sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini

menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Peran yang diambil pemerintah kota dalam upaya pengentasan ini lebih banyak pada fungsi koordinasi dan distribusi sumber daya, mengingat masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sasaran bidang sosial yang hendak diwujudkan adalah: "Meningkatnya kesejahteraan sosial Masyarakat". Melalui program "Peningkatan kesejahteraan keluarga prasejahtera dan sejahtera I alasan ekonom serta pemberdayaan Masyarakat".

Meskipun telah melakukan upaya-upaya pengentasan masyarakat PMKS dan Keluarga Pra Sejahtera, pada tahun 2005 jumlah komunitas PMKS masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat terutama pada keluarga yang rawan masalah ekonomi, keluarga yang berumah tidak layak huni dan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya angka urbanisasi dan di lain pihak lapangan pekerjaan terbatas; rendahnya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar; adanya pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak penganggur. Di samping itu kondisi perekonomian yang semakin sulit karena adanya kenaikan BBM melemahkan daya beli masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Di samping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pencandu narkotik dan obat terlarang.

Pada tahun 2009, jumlah penduduk yang mengunjungi puskesmas berjumlah 90.651 pasien dengan komposisi 31.795 pasien mengunjungi Puskesmas Batu, 24.053 pasien mengunjungi puskesmas Junrejo dan sisanya mengunjungi puskesmas Bumijati. Disisi lain jumlah ibu, bayi dan anak yang mengunjungi puskesmas dan rumah sakit berjumlah 41.426 pasien dengan komposisi 6.965 ibu hamil, 8.706 bayi dan sisanya anak-anak.

Dengan karakteristik penduduk Kota Batu yang memiliki struktur umur penduduk berusia muda, maka perlu adanya pengendalian kelahiran melalui gerakan KB nasional. Pada Tahun 2009, jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Batu sebanyak 37.369 orang atau meningkat 0,7 persen.

Keputusan untuk ber-KB dan pemilihan jenis kontrasepsi kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jumlah anak, pendidikan, kegiatan ekonomi, budaya setempat dan nilai anak. Modus jenis kontrasepsi yang digunakan adalah suntik yaitu sekitar 10.904 orang. Dan urutan berikutnya adalah cara IUD (sekitar 25,96 persen), pil (15,00 persen), susuk (14,72 persen), Kontap OW/OP (5,02 persen) dan sisanya menggunakan kondom.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah:

- a. Jumlah kepala keluarga meningkat 1,71% dari 53.998 KK pada tahun 2008 menjadi 54.922 KK pada tahun 2009. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2009 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.
- b. Jumlah akseptor KB pada tahun 2009 meningkat 2,59%, yaitu dari 26.456 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 27.141 akseptor, rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2009 adalah 1:1, artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur.

- c. Jumlah penduduk miskin menurun 10,09% dari 6.470 KK pada tahun 2008 menjadi 5.817 KK pada tahun 2009.

**g. Komunikasi dan informatika**

Di sektor informasi cetak (koran) masyarakat di Kota Batu sudah dapat merasakan fasilitas tersebut baik yang berskala lokal maupun nasional. Sedangkan untuk sektor informasi elektronik sampai dengan tahun 2004 tercatat 13 pemohon yang mengajukan pendirian pemancar baik untuk televisi, radio maupun telekomunikasi. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan semakin beragamnya jumlah stasiun televisi (stasiun pemancar) yaitu RCTI, METRO TV, TV ONE, SCTV, ANTV, INDOSIAR, TRANS TV, JTV, BATU IV, ATV dan lain sebagainya. Sedangkan sarana informasi elektronik lainnya yaitu internet, sampai saat ini fasilitas yang ada masih terbatas di lingkungan perkotaan berupa WIFI dan *Hotspot*.

Penggunaan jaringan telepon di Kota Batu terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2003 jumlah pelanggan sebanyak 28.797 pelanggan dan pada tahun 2004 sebanyak 36.649 pelanggan. Jenis pelanggan telepon pada tahun 2004 untuk rumah tangga sebanyak 30.928 pelanggan, sosial sebanyak 93 pelanggan, bisnis sebanyak 2.264 pelanggan, TUC sebanyak 1.875 unit, TUK sebanyak 790 unit, Wartel A sebanyak 60 unit, wartel B sebanyak 17 unit dan warnet sebanyak 12 unit. Saat ini perkembangan telepon seluler sangat mendukung penyediaan fasilitas komunikasi, sehingga bisa mengurangi permasalahan di bidang komunikasi.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2009 dari urusan ini di antaranya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana pendukung untuk mewujudkan kualitas mutu siaran / ATV, dengan rincian:
  - a) Menunjang kegiatan peliputan khusus / pembangunan sebanyak 59 kali;
  - b) Menunjang kegiatan produksi sebanyak 170 kali;
  - c) Menunjang kegiatan penyiaran rutin sebanyak 3.780 kali
- b. Tersedianya tabloid daerah yakni majalah Panderman.
- c. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.
- d. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual.

**h. Pertanahan**

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2009 dari urusan ini di antaranya adalah:

- a. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Batu.
- b. Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di wilayah Kota batu
- c. Meningkatkan pemahaman akan peraturan dan administrasi pertanahan

**i. Pemberdayaan masyarakat dan desa**

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat kecil yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sosial, terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aset, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.

Strategi ini dilaksanakan dengan melalui pengurangan beban hidup, peningkatan pendapatan, pengumpulan aset bagi orang miskin dan penguatan kelembagaan.

Permasalahan kemiskinan yang masih mendera masyarakat Kota Batu antara lain terbatasnya akses penduduk terhadap aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi, Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih. Selain itu, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam, masih lemahnya jaminan rasa aman, dan partisipasi, besarnya beban tanggungan keluarga serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu tahun 2011 dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan dalam program/kegiatan antara lain klaster pemberdayaan masyarakat, yang dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, terdapat juga Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan bagi Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) agar masyarakat kelompok sasaran dapat keluar dari status kemiskinan dengan menggunakan Potensi dan SDM yang dimiliki. Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat tersebut antara lain Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPKM), Program Penguatan Unit Penguatan Keuangan (UPK), serta Program Sektor lainnya, dengan hasil pemberdayaan (empowerment) komunitas masyarakat pada 24 Desa/Kelurahan. Kemudian, terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas), Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu), dan Unit Pengelola Kegiatan Pokmas (UPKP).

#### **j. Keamanan dan ketertiban masyarakat (PELAYANAN)**

Di era transparansi, proses demokratisasi serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi, segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan dan distorsi tidak dapat tersalurkan dan terselesaikan secara memadai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gejolak emosional, kerusuhan sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan telah mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan hambatan intern di daerah, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Batu menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri yang membawa implikasi dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pergeseran nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, secara berangsur-angsur mengakibatkan timbulnya budaya atau kebiasaan hidup tidak tertib, dan tidak jarang masyarakat melakukan tindakan-tindakan dengan caranya sendiri.

Krisis di berbagai dimensi yang berkepanjangan dan belum menunjukkan adanya penyelesaian yang menyeluruh, merupakan tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota

Batu yang semakin menyebar keseluruh aspek kehidupan. Hal ini tetap akan menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam upaya menciptakan ketertiban di masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta kriminalitas di Kota Batu yaitu belum optimalnya penanganan kriminalitas, masih maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba serta masih perlu ditingkatkannya kepatuhan terhadap hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kebijakan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2011 diarahkan untuk Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran Narkoba serta Mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban serta kriminalitas lebih didasarkan kepada skala prioritas kebutuhan, dalam arti apabila kondisinya dalam kategori rawan, diperlukan pengamanan dari pihak POLRI dan pada tingkatan tertentu dapat melibatkan TNI. Dalam rangka tindakan pencegahan, pelibatan aparat keamanan pada tingkatan pre-emptif dan preventif melalui pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah dengan mengedepankan fungsi fasilitator dan dinamisator. Berbagai fasilitas terkait bidang keamanan dan ketertiban tersebut antara lain adalah:

- 1 Pos Polantas Batu Plaza
- 2 Pos polantas Songgoriti
- 3 Pos Polantas Perempatan BCA
- 4 Pos Polantas Pasar Besar
- 5 Polsek Junrejo
- 6 Polsek Bumiaji
- 7 Koramil Junrejo
- 8 Koramil Batu
- 9 Koramil Bumiaji
- 10 Pos Polantas Punten
- 11 Pos Polantas Pendem
- 12 Polsek Batu
- 13 Polresta Batu-Junrejo
- 14 Arhanud

Selain adanya berbagai pos dan personil keamanan dan ketertiban tersebut Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah Kantor Kesatuan Bnagsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat bersama Satuan Polisi Pamong Praja juga menggalang Kekuatan Potensi Hansip di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Tabel 2.34. berikut adalah Kekuatan Potensi Pertahanan Sipil di Kota Batu.

**Tabel 2.34.**  
**Kekuatan Potensi Hansip Dirinci Menurut Pendidikan**  
**Tahun 2008-2010**

Jenis Pendidikan		2008	2009	2010
1.	<i>Suskapin :</i>			
	Hansip	14	28	23
	Wanra	-	-	-
2.	<i>Suskalak :</i>			
	A	87	174	91
	B	95	190	140

3.	<i>Latihan Dasar</i>			
	Hansip	64	128	185
	Wanra	-	-	-
	Kamra	-	-	-
4.	<i>Cadnas :</i>			
	Pacad	-	-	-
	Tacad	-	-	-
5.	<i>Suskapokgas</i>	-	-	-
6.	<i>Suskasatgas</i>	-	-	-
7.	<i>Suskabinhan</i>	-	-	-
8.	<i>Suspim</i>	-	-	-
	Jumlah	260	520	439

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan Satpol PP Kota Batu, 2011

Di sisi lain, Kondisi geografis Kota Batu yang berada di dataran tinggi dan merupakan sumber sungai Brantas merupakan faktor yang menyebabkan Kota Batu rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor. Selain karena perilaku manusia, bencana alam juga merupakan sumber ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan ancaman bencana alam. Mereka hanya dapat mengelola risiko tersebut, yakni meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.

Sebagai upaya untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh bencana alam, maka Pemerintah Kota Batu merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang merugikan bagi keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah membentuk satuan tugas penanggulangan bencana di setiap kecamatan, yang ditunjang dengan pembentukan tim SAR (*search and rescue*) Kota Batu juga pasukan pemadam kebakaran (damkar) Kota Batu. Disamping itu, penanganan bencana alam juga melibatkan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Batu, Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR).

Selain itu, Pemerintah Kota Batu juga menjalin kerja sama secara aktif dengan jajaran institusi militer dan institusi kepolisian se-Kota Batu, dalam format Bapeltibda, untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat yang mendukung pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Batu. Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini di antaranya adalah:

- a. Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan
- c. Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan
- d. Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras
- e. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa
- f. Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM
- g. Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana
- h. Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 1,35 per 10.000 penduduk
- i. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk adalah 122,3 per 10.000 penduduk
- j. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18,03 buah per desa atau kelurahan.

### k. Pemuda dan olahraga

Pemuda Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda Kota Batu adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik.

Selain itu, ada dua kecenderungan yang saling bertentangan yang menjadi tantangan kepemudaan yakni persaingan dan kerjasama. Untuk menang dalam persaingan, selain perlu efisiensi, juga butuh keunggulan kompetitif dari sumberdaya lokal. Salah satu faktor produksi yang penting dari sumberdaya lokal adalah SDM. Tanpa SDM yang baik yang bernilai tambah, sulit bagi suatu daerah memenangkan persaingan global sekalipun memiliki sumberdaya alam yang banyak. SDM yang baik akan dapat dihasilkan jika pola pembinaan generasi muda diciptakan melalui suasana sehat, dinamis, dan demokratis sehingga generasi muda bisa berkembang tanpa perlu direkayasa. Tabel 2.35. menunjukkan bahwa terdapat 24 organisasi pemuda yang tersebar di 3 kecamatan di wilayah Kota Batu. Sebagian besar organisasi tersebut berbentuk organisasi Karang Taruna.

**Tabel 2.35.**  
**Jumlah Organisasi Pemuda**  
**Tahun 2008-2010**

<b>Kecamatan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1. Batu	8	8	8
2. Junrejo	7	7	7
3. Bumiaji	9	9	9
<b>Kota Batu</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batu, 2010*

Di bidang olahraga, Pemerintah Kota Batu melakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional ma2.4.2upun nasional, meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, Fasilitas gedung olah raga di Kota Batu seperti Gedung Ganesha dan Stadion Sepakbola Brantas memerlukan perbaikan (renovasi), Telah dilakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun nasional meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, Di antara sarana dan prasarana olahraga di Kota batu adalah sebagai berikut:

- 1 Stadion junrejo
- 2 Stadion Gelora Brantas
- 3 Stadion bumiaji
- 4 Songgoriti ( lap tenis )

- 5 Songgoriti ( renang )
- 6 Selecta ( renang )
- 7 Lap. sepakbola Sumberejo
- 8 Lap Sepakbola Translok
- 9 Lap sepakbola Sidomulyo
- 10 Lap bolavolly stadion brantas
- 11 Gunung Banyak (terbang layang)
- 12 GOR Ganesha

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

### **2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam struktur perekonomian. Sektor ini relatif merupakan sektor yang tidak mendapat perhatian serius dalam aksi pemba-ngunan. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan l65ain tidak satupun yang menguntungkan. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Kota Batu tergantung padanya. Secara umum kontribusi sektor pertanian Kota Batu dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto tidaklah sebesar sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Akan tetapi menilai sektor ini hanya dari sisi makro tersebut akan menjerumuskan kita pada penilaian yang salah pada struktur ekonomi Kota Batu secara umum. Hal ini mengingat besarnya tenaga kerja yang ditampung oleh sektor ini juga fungsi strategis dan besarnya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan. Keuntungan tersebut yang harus digali untuk meningkatkan peran sektor pertanian pada pendapatan regional namun disisi lain kepentingan petani sebagai produsen juga diperhatikan.

Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kota Batu pada tahun 2011 sebesar Tujuh koma Tigapuluh Delapan (7,38) Persen, capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Tujuh koma Nol Satu (7,01) Persen. Pertumbuhan tahun 2011 ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diperkirakan sebesar 7,15 persen dan telah mencapai peringkat ke 4 (empat) pertumbuhan ekonomi Nasional.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 7,38 Persen ini, menunjukkan adanya peningkatan perekonomian yang ditimbulkan berkembangnya ekonomi masyarakat Kota Batu, khususnya semakin menguatnya sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, meningkatnya perekonomian Kota Batu merupakan implikasi dari berbagai kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Batu maupun Provinsi Jawa Timur serta kinerja sektor swasta yang menguntungkan, sehingga bisa menciptakan kondisi perekonomian Kota Batu yang semakin membaik.

Ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan signifikan, pada tahun 2011 mencapai sebesar Tiga Trilyun Tujuhratus Sembilanpuluh Sembilan Milyar Rupiah (Rp.3,799 Trilyun) meningkat sebesar Limaratus Empatpuluh Tujuh koma Sembilanpuluh Lima Milyar Rupiah (Rp.547,95 Milyar) atau naik 16,85 Persen dari tahun 2010 sebesar Tiga Trilyun Duaratus Limapuluh Satu koma Limapuluh Satu Milyar Rupiah (Rp.3,251 Trilyun). Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Kota Batu Tahun 2011 sebesar 1,53 Trilyun Rupiah meningkat sebesar Seratus Empat koma Semnilanpuluh Enam Milyar Rupiah (Rp.104,96 Milyar) atau naik 7,38 Persen dibandingkan tahun 2010 sebesar Satu koma Empatratrus Duapuluh Dua Trilyun Rupiah (Rp.1,422 Trilyun).

Selain itu, dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang merupakan sektor-sektor

strategis dan potensial di Kota Batu, nampak bahwa kontribusi pertumbuhan sektor PDRB mengalami perubahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Batu ini terutama didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 6,82 Persen, sektor Jasa-jasa 11,01 Persen, dan sektor Keuangan 7,78 Persen. Khusus sub sektor Pariwisata juga mencatat perkembangan yang signifikan di tahun 2011 di mana kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara meningkat dari 2.178.794 orang menjadi 2.584.777 orang pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 18,63 Persen.

#### **2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

##### **a. Aksesibilitas daerah**

Keterbatasan layanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih menjadi permasalahan bagi Kota Batu yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh sudah terlewatnya umur teknis jalan pada sebahagian ruas jalan sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil, serta tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST).

Selain itu, ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, serta pengamanan jalan juga belum lengkap sehingga masih belum cukup mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah timur Jawa Timur.

Penataan trayek angkutan dalam kota dan luar kota, juga belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi optimasi fungsi terminal induk di Kelurahan Sisir dan sub-sub terminal pendukungnya. Masih rendahnya komitmen berbagai pihak untuk menaati peraturan trayek angkutan umum, ditengarai menjadi penyebabnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan melibatkan *stakeholders* angkutan umum di Kota Batu.

Pada aspek sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Penyediaan air baku untuk menunjang kegiatan pertanian maupun kebutuhan domestik masih belum optimal. Bencana tanah longsor yang masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan.

##### **b. Penataan wilayah**

Berdasarkan pola penggunaan lahan di wilayah Kota Batu lahan terbangun hanya sekitar 9,57 persen atau sekitar 1.906,40 Ha dari seluruh pola penggunaan lahan yang ada. Hal ini karena wilayah Kota Batu sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit dan terjal, sehingga penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan non terbangun seperti kegiatan kehutanan dan pertanian. Konsentrasi penggunaan lahan terbangun yang terbesar, berada di wilayah Kecamatan Batu yang merupakan pusat kegiatan dan aktifitas kota. Lahan terbangunnya sebesar 834,38 Ha dengan persentase sekitar 4,19 persen dari seluruh luas wilayah kota.

Berdasarkan luas dan jenis penggunaan lahan di Kota Batu terbesar adalah hutan sebesar ± 6.554,22 Ha atau 32,92 persen, sedangkan penggunaan lahan non terbangun

lainnya yaitu tegalan ± 5.067,60 Ha atau 25,45 persen semak belukar ± 2.704,05 Ha atau 13,6 persen sawah irigasi ± 2.515,27 Ha atau 12,63 persen kebun sawah tadah hujan ± 93,23 Ha atau 0,46 persen dan RTH atau lahan kosong ± 190,54 atau 0,95 persen Lahan terbangun terbesar berada di Kecamatan Batu ± 707,21 Ha atau 3,56 persen dari luas keseluruhan. Untuk Kecamatan Junrejo dan Bumiaji penggunaan lahan terbesar adalah non terbangun yaitu hutan, sawah irigasi dan tegalan.

Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, menyebabkan permintaan lahan semakin meningkat, sedangkan ketersediaan lahan yang strategis di pusat kegiatan ekonomi relatif terbatas. Kombinasi ketiga faktor tersebut menyebabkan tingginya harga lahan di perkotaan. Mahalnya harga lahan di kawasan strategis, menyebabkan tumbuhnya lokasi permukiman yang kurang sehat dengan kondisi pencahayaan dan kualitas sanitasi yang rendah. Artinya, kondisi tersebut tidak memenuhi standar sebagai rumah sehat, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penghuninya.

Tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya perlu mendapat perhatian serius. Alih fungsi yang terjadi kerap mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Seringkaliantisipasi dalam perencanaan tata ruang lebih lambat dari pada perkembangan kondisi yang terjadi begitu cepat sehingga respon yang diberikan terkesan terlambat.

Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan akan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, yang juga berarti akan terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan di Kota Batu terutama terjadi pada berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan air, perambahan daerah/kawasan hilir sungai. Fakta ini menjadi indikasi rentannya kondisi lahan Kota Batu terhadap degradasi lingkungan.

Pembangunan kawasan pemukiman baru yang tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), berpotensi menimbulkan gangguan bagi kelestarian lingkungan hidup. Sistem drainase yang buruk akan meningkatkan ancaman terjadinya banjir ketika musim hujan tiba, terlebih lagi sebagian besar wilayah Kota Batu merupakan dataran rendah. Proporsi yang tidak seimbang antara penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau dengan kawasan permukiman merupakan ancaman bagi kapasitas resapan air, sehingga akan menurunkan kadar air tanah.

Hal-hal tersebut di atas antara lain terjadi karena belum berfungsinya aspek pengendalian dalam penyelenggaraan penataan ruang. Melalui perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu dengan diberlakukannya UU nomor 26 tahun 2007, diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada undang-undang tersebut Pemerintah Kota antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis daerah sesuai dengan kepentingan di tingkat kota dan kewenangannya.

### **c. Fasilitas bank dan non bank**

Salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah adalah tersedianya dana cukup di lembaga keuangan. Posisi dana yang ada di perbankan di Kota Batu pada bulan Desember 2009 tercatat sebesar 117,189 milyar dengan komposisi 37,21

persen untuk jenis giro, 23,60 persen untuk jenis deposito dan sisanya sebesar 39,20 untuk jenis tabungan.

Dana masyarakat yang terkumpul pada bank-bank pemerintah maupun swasta sebagian besar disalurkan kembali untuk membiayai sektor perdagangan sebesar 49,11 persen. Berikutnya sektor jasa-jasa (31,14 persen), lainnya (19,75 persen) serta sisanya sektor lainnya. Tabel 2.36. merangkum banyaknya kantor bank di Kota Batu menurut jenis bank tahun 2007-2010.

**Tabel 2.36.**  
**Jumlah Kantor Bank Menurut Jenis Bank**  
**Tahun 2007-2010**

Jenis Bank		2007				2008				2009				2010			
		KP	K C	K C P	K K	KP	K C	K C P	K K	KP	K C	K C P	K K	KP	K C	K C P	K K
<b>1.</b>	<b>Konvensional</b>	8	2	7	5	8	2	7	5	9	4	11	3	9	4	11	3
1.1.	Umum	-	1	7	3	-	1	7	3	0	1	11	2	0	1	11	2
1.2.	BPR	8	1	-	2	8	1	-	2	9	3	0	1	9	3	0	1
<b>2.</b>	<b>Syariah</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	2	0	1	1	2	0	2	1
1.1.	Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	0	2	1
1.2.	BPR	2	-	-	-	2	-	-	-	2	0	0	0	2	0	0	0
<b>Kota Batu</b>		<b>10</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

Sumber: BPS Kota Batu, 2011

Sementara itu lembaga keuangan non bank yang turut menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Batu adalah koperasi. Namun dalam mengembangkan usahanya koperasi masih menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu ketergantungan pada modal. Sebagaimana diketahui, modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan bagi koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Secara umum lembaga keuangan yang terdapat di Kota Batu adalah sebagai berikut:

- 1 PT. BPR Syariah Bumi Rinjani
- 2 Koperasi Wahana Masyarakat
- 3 Koperasi Mitra Usaha
- 4 Koperasi Citra Mandiri
- 5 BTPN
- 6 BPR Wahana Dhana
- 7 BPR Tripakarti Dhanatama
- 8 BPR Sumberdana Makmur
- 9 BPR Rinjani Batu
- 10 BPR Pancadana Batu
- 11 BPR Guna Artha Mas
- 12 BPR Dwi Cahaya Nusaperkasa

- 13 BPR Delta Malang
- 14 BPR Artorejo
- 15 BPR Artha Mandiri
- 16 BNI Syariah
- 17 Bank Rakyat Indonesia
- 18 Bank Mandiri
- 19 Bank Lippo
- 20 Bank Krisman
- 21 Bank KBPR Pancadana Batu
- 22 Bank Jatim Diponegoro
- 23 Bank Jatim Dewi Sartika
- 24 Bank Danamon
- 25 Bank Bukopin
- 26 Bank Buana
- 27 Bank Negara Indonesia
- 28 Bank Central Asia

**d. Ketersediaan air bersih**

Kota Batu banyak terdapat sungai dan anak sungai, sehingga kecil kemungkinan terjadi banjir. Hal ini sangat didukung dengan kawasan non terbangun yang mempunyai fungsi sebagai daerah peresapan air. Hulu sungai Brantas terletak di dusun Sumber Brantas Desa Tulungrejo. Sampai saat ini, wilayah Kota Batu telah diinventarisasi terdapat 111 sumber mata air produktif. Sumber mata air Kota Batu yang mempunyai debit cukup besar antara lain: 1. Mata Air Gemulo, 2. Mata Air Banyuning, 3. Mata Air Ngesong, 4. Mata Air Binangun, dan 5. Mata Air Darmi.

Berdasarkan kondisi hidrologi, Kota Batu merupakan daerah resapan sehingga tidak akan kekurangan air bersih/minum karena di Kota Batu banyak tersebar sumber mata air. Selain itu di sumber air ini selain dimanfaatkan untuk kebutuhan internal kawasan, juga melayani kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Sumber air ini sebagian dimanfaatkan oleh PDAM Kota Batu, PDAM Kabupaten Malang dan PDAM Kota Malang, swasta, masyarakat (HIPPA) dan Irigasi (HIPPA).

Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 111 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Perkembangan pelanggan dan pemakaian air PDAM Kota batu disajikan pada Tabel 2.37.

**Tabel 2.37.**  
**Perkembangan Pelanggan dan Pemakaian Air PDAM Kota Batu**  
**Tahun 2008-2010**

Tahun	Pelanggan	Pemakaian	
		Volume M <sup>3</sup>	Nilai ( Rp)
2008	9,209.00	2,287,604.00	3,102,630,730.00
2009	9,315.00	2,309,699.00	3,192,723,000.00
2010	9,498.00	2,428,114.00	3,451,740,030.00

Sumber: PDAM Kota Batu, 2011

Di Kota Batu banyaknya volume air bersih pada Tahun 2009 mencapai 2.309.699 M<sup>3</sup>. Dan meningkat menjadi 2.428.114 M<sup>3</sup> pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, sekitar 88,68 persen di antara dikonsumsi kelompok non niaga, sekitar 4,15 persen dikonsumsi kelompok niaga, dan 4,18 persen dikonsumsi kelompok sosial Sedangkan kelompok lain proporsinya masih sangat kecil.

#### e. Fasilitas Listrik dan Telepon

Kontribusi perusahaan Industri pengolahan dalam pembelian listrik dari PT PLN adalah cukup besar artinya, karena sekitar 5.526 juta kwh berasal dari golongan tarif industri. Ini berarti jumlah listrik yang dibeli kelompok golongan industri mencapai 6,3 persen dari seluruh listrik yang terjual atau berada di urutan keempat setelah golongan rumah tangga, bisnis dan pemerintah. Tahun 2009, jumlah pemakaian listrik oleh kelompok golongan rumah tangga tercatat sebesar 55,252 juta kwh atau sekitar 63,35 persen. Sisanya dibeli oleh kelompok golongan bisnis, pemerintah dan sosial yang masing-masing kelompok tersebut mengkonsumsi sekitar 19,19 persen, 6,24 persen dan 3,84 persen. Tabel 2.38. dan 2.39. menunjukkan banyaknya pelanggan, pemakaian, dan daya listrik PLN yang terpai pada tahun 2010.

**Tabel 2.38**  
**Banyaknya Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Listrik**  
**Yang Terjual Menurut Golongan**  
**Tahun 2010**

Golongan Tarif		Pelanggan	Pemakaian	Nilai
			(Kwh)	(000)
Sosial/Social	S1	120	12,480	1,759,850
	S2	15,096	3,496,837	2,138,906,851
	S3	-	-	-
Rumah Tangga/ Household	R1	625,368	55,409,793	30,708,175,089
	R2	4,921	1,735,507	1,640,980,540
	R3	596	557,703	712,981,835
Bisnis/Business	B1	24,794	2,781,174	2,087,713,020
	B2	5,038	15,472,740	17,390,929,220
	B3	15	440,928	476,895,960
Industri/Industries	I1	845	594,750	515,760,515
	I2	350	3,450,309	3,201,038,565
	I3	11	1,694,360	1,848,316,940
Pemerintah/ Office	P1	1,300	1,000,663	1,089,546,132
	P2	2,557	4,639,941	3,288,387,185
Multiguna	M	-	143,942	192,056,550
<b>Kota Batu</b>		<b>681,011</b>	<b>91,431,127</b>	<b>65,293,448,252</b>

Sumber: PT. PLN (Persero) UPP-TR Batu

**Tabel 2.39**  
**Banyaknya Pelanggan, Daya, dan Pemakaian Listrik**  
**Yang Terjual Menurut Golongan**  
**Tahun 2010**

Tahun	Pelanggan	Daya (VA)	Pemakaian	Nilai
			(Kwh)	(000)
2008	54574.16667	41861450	81232617	54912382609
2009	55458.41667	54695855	87215550	5052094218
2010	<b>56,560</b>	<b>692,968,310</b>	<b>91,438,782</b>	<b>65,340,297,000</b>

Sumber: PT. PLN (Persero) UPP-TR Batu

Pada periode yang sama, perkembangan pelanggan telepon pada tahun 2009 mengalami penurunan yaitu dari 18.914 menjadi 15.664 pelanggan. Penurunan terjadi pada pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,90 persen dan 27,00 persen dibanding periode sebelumnya. Tabel 2.40 merangkum banyaknya pelanggan telpon di Kota Batu selama tahun 2008-2010.

**Tabel 2.40**  
**Banyaknya Pelanggan Telepon di Kota Batu**  
**Tahun 2008-2010**

Tahun	Rumah Tangga	Sosial	Bisnis
2008	16109	84	1496
2009	13,360	59	1,294
2010	10,432	56	1,686

Sumber: PT. Telkom Batu

#### f. Ketersediaan restoran

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Jawa Timur, Kota Batu memiliki banyak fasilitas restoran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Selain terdapat di hampir setiap hotel dan penginapan, beberapa restoran berdiri secara mandiri dengan ciri dan karakter khas masing-masing. Beberapa di antara fasilitas restoran berkelas yang ada di Kota Batu sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1 Warung Watu Lontar
- 2 Sate Hotplet
- 3 Rumah Makan Slamet Noto Roso
- 4 Rumah Makan Khas Jawa
- 5 Rumah Makan Hot Cwie Mie
- 6 Rumah Makan Cafe Pantara
- 7 Rumah Makan Ayam Goreng Pemuda
- 8 Rumah Makan Ayam Goreng Kalasa
- 9 Rumah Makan Al-Madinnah
- 10 Restaurant Bougenville

- 11 Restaurant Batu Suki Restaurant Batu Suki
- 12 Ikan Segar Mojo Asri
- 13 Depot Jeddah
- 14 Rumah Makan Flamboyan
- 15 Warung Jamiah, dll.

**g. Ketersediaan penginapan**

Jumlah hotel dan penginapan yang tercatat BPS Kota Batu pada tahun 2009, sebanyak 402 buah. Diantaranya 49 berupa hotel berbintang dan melati, 5 losmen, 67 villa dan sisanya penginapan biasa. Sedangkan jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan wisatawan baik domestik maupun asing sebanyak 3.470 unit dan 5.442 unit.

Terkait dengan hal di atas, maka tabel 2.41. menunjukkan berbagai sarana komodasi penunjang pariwisata di Kota Batu pada tahun 2010 yang terdiri dari hotel, losmen maupun villa yang keberadaannya menyebar secara merata di 3 wilayah kecamatan.

**Tabel 2.41.  
Sarana Akomodasi di Kota Batu Berdasarkan Jenis  
Tahun 2010**

No	Hotel	Losmen	Villa
1	Hotel Wijaya	Penginapan Jatim Park	Wisma Ijen
2	Hotel Victory	Losmen Wisma Rukmi	Villa Wiji Utami
3	Hotel Trisno	Losmen Trisno	Villa Wiji Utama
4	Hotel Trisno Putro	Losmen Pendowo	Villa Uka-Uka
5	Hotel Tawang Argo	Hotel Wisma Indah	Villa Tri Lestari
6	Hotel Surya Indah		Villa Tri Langgeng
7	Hotel Sumber Manjing		Villa Tiga Bersaudara
8	Hotel Songgoriti		Villa Tekada
9	Hotel Seulawah		Villa Supo
10	Hotel Selecta		Villa Sukaria
11	Hotel Santoso		Villa Sri Rejeki
12	Hotel Royal Orchid		Villa Sinar kasih II
13	Hotel Ragil Kuning		Villa Shela
14	Hotel Putri Bulan		Villa Santoso
15	Hotel Purnama		Villa Sanggrahan
16	Hotel Perdana		Villa Samad
17	Hotel Pendowo		Villa Sakura
18	Hotel Panderman		Villa Sakib
19	Hotel Palereman Soerabaia		Villa Rosa
20	Hotel Palembang Sari		Villa Restu
21	Hotel Nirwana		Villa RANI
22	Hotel Mutiara Batu		Villa RAMI
23	Hotel Mustika sari		Villa Ramayana
24	Hotel Monalisa		Villa Putra Supo
25	Hotel Metropole		Villa Pondok santai Jaya
26	Hotel Mentari		Villa Olly
27	Hotel Kusuma Agro Wisata		Villa Murbei
28	Hotel Klub Bunga		Villa Mulai
29	Hotel Kawi		Villa Moro Seneng
30	Hotel Kartika Wijaya		Villa Mika

31	Hotel Kartika Raya	Villa Merah Muda
32	Hotel Kamisato	Villa MeldāMilla Lestari
33	Hotel Jaya	Villa Langeng Mulyo
34	Hotel Indah Sayekti	Villa Kusuka
35	Hotel Imam Bonjol	Villa Kapada
36	Hotel Grawidya	Villa Hujau
37	Hotel Grand Palembang	Villa Griyo Mulyo
38	Hotel Garuda	Villa Graha Flora
39	Hotel Brintik	Villa Gloria
40	Hotel Batu Permai	Villa Galuh
41	Hotel Batu Inn	Villa Estevani
42	Hotel Baru	Villa Dwi Putra
43	Hotel Aster	Villa Duta
44	Hotel Asida	Villa Dore
45	Hotel Arumdaluh	Villa Division
46	Hotel Arjuno	Villa Dicky
47	Hotel Alamanda	Villa Denna
48	Hotel Agro Wisata Punten Mandiri	Villa Caterina
49	Hotel Agro Bukit Cemara Emas	Villa Cak RI
50		Villa Bukit Dieng
51		Villa Biru
52		Villa Arto Moro
53		Villa Apple Green
54		Villa APEL
55		Villa Anugrah
56		Villa ANI
57		Villa Andika
58		Villa Amigo
59		Villa Amanda
60		Villa Agung
61		Villa Agung Setia
62		Villa Abadi
63		Villa 356
64		Villa 99
65		Pondok Wisata
66		Penginapan Songgoriti

Sumber: Dinas Dinas Pariwisata Kota Batu, 2010

Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2009 tercatat 537.723 pengunjung. Dari jumlah tamu yang menginap di hotel bintang sebanyak 5.385 orang (3,21 persen) tamu asing dan sebanyak 162.624 orang (96,79 persen) merupakan tamu domestik. Dipihak lain jumlah tamu asing yang datang pada hotel melati tercatat sebanyak 59 orang (0,02 persen), sementara tamu domestik 369.655 orang (99,98 persen).

Selama tahun 2009, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang 47,91 persen. Adapun TPK hotel melati sebesar 36,33 persen. Rupanya pola TPK untuk hotel berkelas bintang agak berbeda dengan hotel kelas melati. TPK yang paling tinggi atau “*Peak Seasons*” untuk hotel berbintang pada Bulan Nopember, sementara untuk hotel dengan kelas melati hampir tidak mengenal istilah tersebut. Karena TPK untuk hotel kelas melati menunjukkan angka yang hampir rata atau “*flat*” pada setiap bulannya.

Indikator tingkat produkti-vitas hotel digambarkan dari jumlah malam dari setiap tamu menginap yang biasa disebut rata-rata malam tamu (*Guest night*). Jumlah malam tamu yang

tercatat pada hotel adalah sebesar 429.108 yang terdiri dari 133.596 hotel berbintang (31,13 persen) dan hotel non bintang sebesar 295.512 (68,87 persen).

Sejalan dengan jumlah tamu yang menginap di hotel dan pengi-napan, gambaran kegiatan pariwisata di Kota Batu dapat didekati dari jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek wisata. Pada Tahun 2009, jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisman yang mengunjungi obyek wisata di Kota Batu tercatat sebanyak 1.906.170 pengunjung.

Ini berarti meningkat sebesar 61,52 persen dibanding periode sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan pada enam obyek wisata di Kota Batu meningkat. Wisatawan yang mengunjungi Jatim Park dan Selecta masing-masing meningkat sebesar 19,90 persen, dan 55,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Fasilitas tempat rekreasi dan obyek wisata yang ada di Kota Batu baik yang sudah, sedang dan belum berkembang terdiri dari 2 (dua) jenis wisata yaitu wisata alam dan wisata budaya. Obyek wisata yang sudah berkembang untuk wisata alam antara lain : 1) Kusuma Agrowisata, 2) Tahura di kawasan Gunung Arjuno, 3) Selekt, 4) Songgoriti, 5) Cangar, dan 6) Tanaman Hias. Sedangkan untuk wisata budaya adalah : 1) wisata antar desa dan 2) Candi Suko. Obyek wisata yang sedang berkembang untuk wisata alam adalah: 1) Wisata Perkemahan (Cangar, Gabes, Sumber Darmi), 2) Paralayang dan Gantole, 3) Wisata gua (Cangar, Junrejo), sedangkan untuk wisata budaya adalah wisata makam ritual (mbah Batu). Adapun obyek wisata yang belum berkembang untuk wisata alam adalah Wisata Hutan dan Wisata Air Terjun. Sedangkan fasilitas gedung kesenian yang terdapat di Kota Batu berjumlah 2 buah yaitu: 1) Singhasari dan, 2) Galeri Seni (Pondok Seni). Pemanfaatan dan perawatan fasilitas kesenian tersebut sampai saat ini masih belum optimal dan terjadi alih fungsi pada salah satu fasilitas tersebut yang menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ruang apresiasi seni di Kota Batu. Sedangkan Obyek Wisata yang berbasis Pertanian di Kota Batu antara lain:

1. Tanaman Hias di sepanjang jl. Bukit Berbunga Desa Sidomulyo
2. Pasar Bunga dan STA (Sub Terminal Agribisnis) Desa Sidomulyo
3. Wisata Ikan (kolam dan kuliner) di PBI (Pasar Benih Ikan) Desa Sidomulyo.
4. Wisata Selekt dengan pedagang bunga dan buah apel serta pangan olahan untuk oleh-oleh.
5. Wisata hutan rakyat di Cangar Desa Sumberbrantas.
6. Wisata Bunga Potong (Krisan) di Perusahaan Inggau Laut Desa Tulungrejo.
7. Wisata Bunga Potong (Mawar) di Desa Gunungsari.
8. Wisata petik Apel, Jambu biji dan Strawberi di Kusuma Agrowisata Batu.
9. Wisata Desa Ternak Sapi Perah di Desa Oro-oro Ombo.

#### **2.4.3. Iklim Investasi**

Kegiatan investasi di Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan angka sebesar 10,65% (yoy). Pertumbuhan investasi tersebut antara lain terindikasi dari nilai realisasi investasi PMA yang tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan Nilai realisasi investasi di Jawa Timur diperkirakan terus mengalami peningkatan mengingat tingginya potensi sektor pertambangan, khususnya gas dan panas bumi. Diiringi gencarnya peran yang dilakukan pemerintah daerah di Jawa Timur

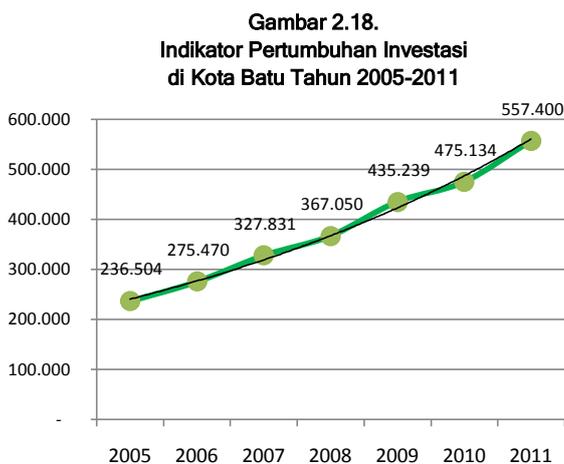
dalam mendorong masuknya investor baru di daerah ini, di antaranya pengurusan perizinan yang tidak memakan waktu lama.

Indikator lainnya juga mengindikasikan hal yang sama, sebagaimana tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit investasi yang merupakan salah satu sumber pembiayaan investasi yang meningkat dari 15,15% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 26,06% (yoy).

Di Kota Batu, indikator investasi menggambarkan besarnya nilai investasi dan jumlah investor yang masuk di Kota Batu. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan semakin meningkat pula kondisi perekonomian. Gambaran tentang besarnya dan pertumbuhan

investasi, antar waktu dapat didekati dengan besarnya posisi kredit investasi yang diberikan oleh kalangan perbankan kepada masyarakat Kota Batu setiap tahun. Bank Indonesia melaporkan besarnya posisi kredit investasi di Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2005-2011 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.18.

Dari Gambar 2.18 tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan investasi tahun 2009 adalah 18,58% dibanding tahun lalu. Sedangkan laju pertumbuhan investasi antar waktu sejak tahun



Sumber: Bank Indonesia, 2011

2005-2011 mencapai 16,47%. Kondisi ini ditunjang pula dengan semakin besarnya distribusi kredit perbankan di Kota Batu pada tahun 2011. Berdasarkan laporan Bank Indonesia laju pertumbuhan kredit di Kota Batu tahun ini sebesar 43,01% (yoy) dengan porsi terbesar terletak pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mencapai Rp. 132.265 juta dengan *growth* 111,82% seperti terlihat pada Tabel 2.42.

**Tabel 2.42.**  
**Distribusi Kredit Perbankan di Kota Batu (Rp Juta)**

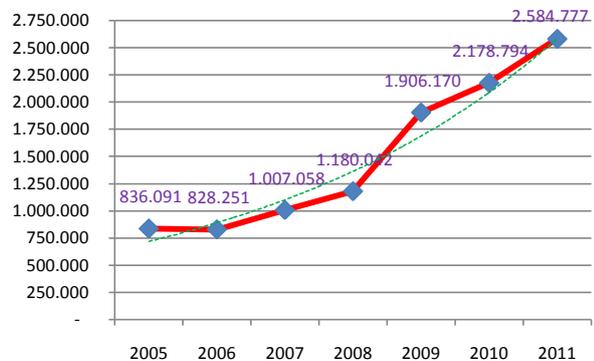
URAIAN	2010	2011 NOV	PROPORSI	GROWTH
<b>Total Kota Batu</b>	<b>249,670</b>	<b>357,041</b>	100.00%	43.01%
<b>Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha</b>				<b>33.85%</b>
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	14,834	15,922	4.46%	7.33%
Pertambangan dan Pengalihan	-	7		
Industri Pengolahan	4,381	21,454	6.01%	389.71%
Listrik, Gas dan Air Bersih	186	145	0.04%	-22.04%
Konstruksi	71,248	37,654	10.55%	-47.15%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	62,441	132,265	37.04%	111.82%
Konstruksi	1,530	1,809	0.51%	18.24%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,566	1,754	0.49%	-68.49%
Jasa-jasa	12,667	20,356	5.70%	60.70%

<b>Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha</b>				
	76,817	125,675	35.20%	<b>63.60%</b>
Rumah Tinggal	21,997	40,800	11.43%	85.48%
Flat dan Apartemen	-	-	0.00%	0.00%
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	-	3,757	1.05%	0.00%
Kendaraan Bermotor	5,401	13,040	3.65%	141.44%
Lainnya	49,420	68,078	19.07%	37.75%

Sumber: Bank Indonesia, 2012

Angka-angka tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batu untuk membangun perekonomian dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kota Batu di antaranya dengan menjaga dan terus memperbaiki iklim investasi. Oleh karena itu, pada tahun ini dicanangkan untuk melaksanakan *review* dan revisi beberapa peraturan daerah yang dirasakan kurang mendukung iklim investasi. Revisi Perda tentang pajak semata-mata menjadikan iklim investasi di kota ini semakin kondusif bukan semata-mata memihak pengusaha tertentu. Itu karena ketika iklim investasi kondusif, maka aneka usaha bisa bertahan selamanya. Pada tahun 2011 tercatat setidaknya 2 (dua) investasi besar dilakukan di Kota Batu yakni pembangunan Hotel Singhasari dan Batu Town Square.

**Gambar 2.19.**  
Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu Tahun 2005-2011



Sumber: BPS Kota Batu dan Hasil analisis, 2012

Salah satu kekuatan iklim investasi Kota Batu terletak pada sektor pariwisata. Para investor yang datang, tentunya sebagian merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata, seperti objek wisata, hotel, rumah makan atau usaha lain. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu memiliki komitmen dan kepedulian tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Karena komitmen itulah, dunia pariwisata terus berkembang.

Besar kredit investasi ini diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata oleh investor di antaranya adalah Jatim Park, Batu Night Spectacular, dan Museum Satwa serta semakin banyaknya kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara. Selain itu pada tahun 2009 Kota Batu ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Festival Film Indonesia (FFI) yang menjadikan Kota Batu semakin banyak dikenal dan semakin menarik wisatawan. Gambar 2.19 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 836.091 sedangkan tahun 2008 sebanyak 1.180.042 wisatawan dan pada tahun 2009 tercatat meningkat menjadi tidak kurang dari 1.906.170 wisatawan atau meningkat sebesar 62,24%. Pada tahun 2010 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mencatat kunjungan wisatawan sebesar 2.178.794 orang atau meningkat 8,88%. Pada Tahun 2011 kunjungan wisatawan meningkat kembali menjadi 2.584.777 wisatawan.

Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispartabud) pada tahun ini juga menggelar Batu Flower Festival (BF2) ke-3, pada Sabtu 8 Oktober 2011 di Stadion Gelora Brantas Kota Wisata Batu. Momen ini dihadiri tamu dari Komunitas Kawanua

Bakudapa se Dunia. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebagai refleksi perwujudan Kota Batu sebagai sentra wisata di Jawa Timur, serta ikonnya Kota Wisata sebagai penghasil berbagai macam bunga segar dari seluruh dunia dan penghasil buah apel. Acara BF2 di tahun 2011 merupakan kali ke tiga. Namun acara BF2 ke-3 adalah paling spektakuler dibanding selama 2 tahun sebelumnya. Karena, acara BF2 didatangi para tamu komunitas kewanua ke-3 se dunia yang berjumlah ribuan orang serta berbagai undangan dari kalangan pemerintahan dari berbagai daerah kabupaten kota se Jatim, dan seluruh komponen tokoh dan anggota masyarakat di Kota Wisata Batu. Even tersebut akan mampu mempromosikan Kota Batu sebagai Kota Wisata dan mampu mengembangkan marketing dan daya saing hasil bunga dari masyarakat Kota Wisata Batu ke seluruh dunia.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota batu dalam mengemban visi dan misi pengembangan pariwisata berbasis agropolitan tersebut telah mebuahkan hasil dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatwan, berkembangnya agrobisnis, serta semakin dikenalnya Kota Batu di dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Batu menerima penghargaan dari Gubernur Jatim melalui ajang Anugerah Wisata Nusantara (AWN) Jatim 2011. Di samping itu, Kusuma Agrowisata Hotel juga ikut meraih AWN kategori hotel berwawasan lingkungan dan obyek wisata Selecta mendapat nominasi satu kategori obyek wisata pilihan.

Pada tahun 2011 pula Kota Batu masuk dalam daftar tujuh keajaiban Jatim versi JTV. Atas keberhasilan itu, Kota Batu berhak atas penghargaan dari JTV pada malam anugerah yang berlangsung di Alun-Alun Kota Batu. Semua komponen stakeholder sudah berupaya membangun Kota Batu supaya lebih baik. Mereka memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata. Pembangunan bukan hanya dilakukan di tengah perkotaan, tetapi juga masuk ke pelosok desa. Mereka juga sudah mengangkat semua potensi untuk pengembangan wisata. Selain objek wisata buatan seperti Selecta, Jatim Park, BNS, ada juga wisata berbasis alam seperti rafting dan paralayang. Perkembangan yang ada di Kota Batu ini semakin menarik wisatawan dari seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi itu juga menjadikan investor semakin tertarik untuk mengembangkan usaha di Kota Batu. Sampai dengan saat ini masih banyak pelaku usaha wisata yang ingin masuk untuk menanamkan modalnya di Kota Batu

#### **a. Keamanan dan ketertiban**

Terbinanya kerukunan antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan. Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Kota Batu sangat harmonis. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadatan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat berjalan baik. Secara kualitas, kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat religiusitas masyarakat tetap terjaga, kerukunan antar umat beragama juga sangat baik, tercermin dari tidak adanya kejadian konflik yang berlatar belakang agama dan tidak adanya konflik dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari peran tokoh dan pemuka agama untuk bersatu padu membina kerukunan antar umat beragama yang terakumulasi dalam forum-forum keagamaan seperti Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (PAUB), Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) dan forum-forum lainnya yang secara rutin mengadakan koordinasi dan pertemuan untuk tetap terbina kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing pemeluknya.

Stabilitas keamanan dan ketertiban yang relatif baik dan terjaga. Tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang berbau SARA dan yang menimbulkan kerusuhan massal

berkepanjangan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Kota Batu yang relatif baik, kehidupan beragama yang cukup religius, adanya toleransi dan kerukunan yang relatif tinggi, semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang masih terjaga. Tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif tidak begitu ketat menjadikan masyarakat Kota Batu relatif dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dan potensi konflik yang berkembang di masyarakat. Tindak kriminalitas dan tingkat kejahatan relatif rendah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja untuk Peningkatan Supremasi Hukum dan HAM di Kota Batu, di antaranya tercermin dari penurunan Tingkat Kriminal sebesar 38,92 Persen, Jumlah Pemakai Penyalahgunaan Narkotika atau Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang semula sebanyak 15 orang di tahun 2010 menjadi 13 orang di tahun 2011 serta 3 kali kegiatan dalam upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan kerjasama Bagian Hukum dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Batu, Badan Narkotika Kota Batu, Kantor Kepolisian Resort Kota Batu, dan Pengadilan Negeri

#### **b. Kemudahan perijinan**

Regulasi pelayanan perijinan dan pemberian insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu akan direpson positif oleh pelaku bisnis dengan investasi yang menguntungkan. Iklim investasi di Kota Batu akan berkembang secara dinamis.

Dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Kota Batu akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlihat nyata dalam praktek pembangunan kota.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Pemerintah Kota Batu sejak tahun 2009 telah mengembangkan sistem pelayanan birokrasi satu atap dan lebih cepat. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Batu pada awal tahun 2011 dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Perijinan termasuk Penanaman Modal.

Tujuan pembentukan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perijinan dalam berbagai bentuk seperti mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting dan dapat menekan biaya pelayanan ijin usaha, sehingga Pemerintah Kota Batu telah mewujudkan transparansi dan keterbukaan. Selain itu, juga bertujuan untuk meminimalisir interaksi antara pemohon dengan petugas perijinan dan sekaligus untuk menghindari pungutan-pungutan tidak resmi kepada masyarakat yang akan mengurus perijinan yang dibutuhkan.

Dalam upaya persiapan penyerahan kewenangan seluruhnya Pemerintah Kota Batu telah melakukan pembenahan dan pemenuhan segala persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, mulai dari persyaratan fisik bangunan kantor pelayanan terpadu, persyaratan unit layanan maupun kualitas pelayanan perijinan.

Kebijakan peningkatan pelayanan perijinan di Kota Batu ini membuktikan bahwa proses perijinan di Kota Batu telah memiliki standar pelayanan minimal, sehingga memiliki kepastian dalam pelayanan yaitu kepastian waktu, kepastian prosedur atau persyaratannya.

### c. Status desa

Keberpihakan pemerintah daerah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketinggalan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antara wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat kota cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan. Untuk itu, perlu didukung dengan adanya skema pemberian dana anggaran, termasuk jaminan pelayanan publik dan perintisan.

Pada tahun 2010 seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kota Batu yang berjumlah 24 desa / kelurahan telah mencapai staus Swasembada sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.43.

**Tabel 2.43**  
**Klasifikasi Desa/Kelurahan Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2010**

Kecamatan		Swadaya	Swakarsa	Swasembada	Jumlah
1.	Batu	-	-	8	8
2.	Junrejo	-	-	7	7
3.	Bumiaji	-	-	9	9
<b>Kota Batu</b>		-	-	<b>24</b>	<b>24</b>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Kota dan Kabupaten Malang serta Kabupaten Mojokerto. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat kesejahteraan (*prosperity approach*) juga menggunakan pendekatan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan kawasan utara Kota Batu.

#### 2.4.4. Sumberdaya Manusia

##### a. Kualitas tenaga kerja

Sebagian besar penduduk Kota Batu telah menamatkan SMA sederajat, hal tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat SMA sederajat tahun 2006 sebesar 21,80 persen meningkat menjadi 23,48 persen pada tahun 2007. Penduduk Kota Batu secara umum untuk usia 15 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah, tidak pernah tamat SD dan tamat SD persentasenya mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.44. memberikan gambaran kondisi penduduk Kota Batu usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang telah ditamatkan.

Berdasarkan Tabel 2.44. diperoleh informasi bahwa sebanyak 68,2% penduduk Kota batu masih berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia di era globlasasi dan di masa-masa mendatang. Rendahnya kualitas SDM akan mempengaruhi keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota batu di masa depan.

**Tabel 2.44.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas**  
**menurut Pendidikan Yang Ditamatkan**  
**Kota Batu Tahun 2006 s/d 2009**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Tdk/blm pernah sekolah	4,00	4,96	3,94	3,45	3,45
Tidak belum tamat SD	13,03	11,89	12,89	13,30	13,30
Tamat SD	33,48	35,91	29,01	28,90	28,90
Tamat SLTP	22,23	22,84	23,91	22,96	22,96
Tamat SMTA	20,20	20,41	23,61	24,24	24,24
Tamat PT	7,06	3,99	6,65	7,15	7,15
Jumlah	100,00	100,00	100,01	100,00	100,00

*Sumber : Hasil Susenas 2005 - 2008 dan Lakip Dinas Pendidikan 2009*

Kondisi ini bisa menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir terjadi penurunan persentase penduduk berpendidikan rendah yang diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk berpendidikan yang lebih tinggi.

#### **b. Tingkat ketergantungan**

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,45 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,55 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,81 persen. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 35,13 persen. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 47,92 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 48 orang bukan usia produktif ( 0 - 14 tahun) dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio 2 : 1.

Perkembangan indikator makro sebagai representasi dari keberhasilan maupun keterhambatan, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan di Kota Batu. Elaborasi atas fokus di atas, mengarah pada pencapaian tujuan hakiki dari pembangunan, yakni peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun demikian pencapaian indikator-indikator pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh komponen-komponen utama, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan daya beli; melainkan juga dipengaruhi oleh keseluruhan bidang pembangunan. Oleh karena itu indikator pembangunan mencakup beberapa bidang makro, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang.

Sementara itu, patut disadari oleh para pemangku-kepentingan bahwa keberhasilan pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan

yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kota, akan tetapi dipengaruhi pula oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan ataupun didanai oleh berbagai level pemerintahan, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain itu partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, juga memiliki kontribusi positif bagi pencapaian kinerja pembangunan di Kota Batu.

Tabel 2.42. berikut menunjukkan hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diuraikan pada paparan di atas:

**Tabel 2.42.**

**ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Unit	Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								Estimasi
Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi								
1.	Indikator Makro							
1.1.	Pertumbuhan PDRB ADHB		17.80	(85.12)	14.23	17.06	12.95	16.56
	PDRB (ADHB) (Juta)		1,499,019	1,758,225	2,008,493	2,351,082	2,655,639	3,095,372
	PDRB (ADHK) (Juta)		952,545	1,018,210	1,087,490	1,162,187	1,240,527	1,325,775
	Pertumbuhan PDRB ADHK		6.40	6.89	6.80	6.87	6.74	6.94
	Kota Malang		6.67	5.97	6.22	6.13	5.03	
	Kabupaten Malang		5.05	5.33	6.15	5.53	4.40	
	Kabupaten Mojokerto		6.93	5.13	5.78	5.69	5.03	
	Kontribusi PDRB ADHB terhadap Jatim		0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	
	Kontribusi PDRB ADHK terhadap Jatim		0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	
	PDRB Jatim ADHB		403,392,351	470,627,494	534,919,333	619,003,566	684,230,934	
	PDRB Jatim ADHK		256,374,727	271,249,317	287,814,184	304,798,967	320,210,548	4.00 -4.50
	PDRB / Kapita Jatim ADHB		11,057,370	12,826,920	14,498,200	16,687,050	18,350,760	
	Laju inflasi		9.73	6.96	9.53	5.82	7.25	6.12
1.3.	PDRB per kapita (Rp. Juta)		7,503,333	8,608,465.0	10,153,642.0	11,449,129.0	12,865,486.0	13,246,700.0
1.3.	PDRB per kapita		8,253,101	9,526,785	10,799,162	12,518,208	14,006,240	1,945,485
	Jumlah Penduduk		181,631	184,556	185,986	187,813	189,604	1,591,054
	Laju Pertumbuhan Penduduk		-88.34	1.61	0.77	0.98	0.95	739.15
	Jumlah Kepala Keluarga (KK)		45,028	45,028	50,920	51,142	55,136	57,350
			4.03	4.10	3.65	3.67	3.44	27.74
	Jumlah PAD (Juta)		8,415	11,066	13,283	14,203	17,387	17,736
	Rasio PAD/APBD		4.97	4.93	4.83	4.57	4.72	4.32
	Realisasi APBD (Juta)		169,242	224,298	274,965	311,061	368,478	410,225
	Peranan APBD terhadap PDRB (%)		11.29	12.76	13.69	13.23	13.88	14.02
1.4.	Indeks Gini							
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia							
1.6.	Indeks ketimpangan Williamson (IK Reg)		116.31	116.31	115.93	115.81	116.5	115.31
	IDW Jatim						115,10 - 115,30	114,70 - 115,10
	<b>Indeks Paritas Daya Beli (PPP)</b>		<b>60.20</b>	<b>61.14</b>	<b>62.69</b>	<b>63.79</b>	<b>64.65</b>	<b>66.04</b>
	Kota Malang		64.11	64.28	64.51	65.44	66.24	
	Kabupaten Malang		59.35	59.65	60.92	62.02	62.72	
	Kabupaten Mojokerto		60.33	60.78	61.93	63.19	64.01	
	IDB Jatim		<b>60.60</b>	<b>61.46</b>	<b>62.56</b>	<b>63.92</b>	<b>64.77</b>	
1.7.	Persentase penduduk di atas garis		-7.53	-8.51	96.87	-129.09	-14.34	86.01

	kemiskinan							
	Jumlah penduduk miskin (KK)	195,302	200,270	5,817	430,269	216,789	222,520	
	Pra KS+KS1	195,302	200,270	211,013	430,269	216,789		
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8.15	8.77	10.36	8.95	7.14	#VALUE!	
	Kota Malang	14.38	14.31	11.27	11.14	10.44		
	Kabupaten Malang	7.08	7.85	6.44	6.22	6.35		
	Kabupaten Mojokerto	7.55	7.99	6.68	7.04	5.54		
	TPT Jatim	5.82	5.74	6.01	4.84	5.08	6,00-6,20	
	Tingkat Kemiskinan	13.64	14.37	11.50	11.39	10.55		
	Pra KS (Tab. 4.3.6)	6,141	6,470	5,858	5,827	5,817	#VALUE!	
	Persentase Pdd Miskin Jatim					16,50- 16,90	15,50-16,50	
1.8.	Angka kriminalitas yang tertangani	637	2,187	1,005	956	898	995	
1.9.	<b>IPM Kota Batu</b>	<b>69.51</b>	<b>69.59</b>	<b>71.37</b>	<b>73.33</b>	<b>73.74</b>	<b>74.72</b>	
	Kota Malang	73.85	75.34	75.72	76.19	76.58		
	Kabupaten Malang	66.92	68.39	69.07	69.55	69.89		
	Kabupaten Mojokerto	70.26	70.61	71.99	72.51	72.84		
	<b>IPM Jatim</b>	<b>66.84</b>	<b>66.87</b>	<b>68.06</b>	<b>68.92</b>	<b>70.98</b>	69,00 -69,50	
	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (AMH)	<b>93,69</b>	<b>96,13</b>	<b>97,54</b>	<b>97,30</b>	<b>97,97</b>	99.65	
	Angka buta huruf (ABH)	<b>6,31</b>	<b>4,87</b>	<b>2,46</b>	<b>2,70</b>	<b>2,03</b>	0.29	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	<b>7,72</b>	<b>7,70</b>	<b>8,40</b>	<b>8,20</b>	<b>8,30</b>	#VALUE!	
	<b>Indeks Pendidikan</b>	81.04	81.04	83.07	83.08	83.38	<b>84.36</b>	
	Kota Malang	84.84	88.58	88.79	88.79	88.87		
	Kabupaten Malang	71.12	74.03	74.25	74.25	74.40		
	Kabupaten Mojokerto	77.29	77.23	79.76	79.76	79.84		
	IP Jatim	<b>72.22</b>	<b>73.40</b>	<b>73.61</b>	<b>73.73</b>	<b>74.57</b>		
1.3.	Angka partisipasi kasar:				82.95	85.43	87.59	
1.3.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		105.22	103.58	122.50	125.34	107.70	
1.3.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		99.03	94.59	83.50	109.02	95.97	
1.3.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C		63.74	62.23	44.22	45.97	59.12	
1.4.	Angka Partisipasi Murni:							
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97.46	99.12	99.41	99.18	95.40	96.78	
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	90.21	91.74	93.82	92.49	98.00	77.61	
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	69.26	58.68	73.14	70.26	66.20	41.67	
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	35.88	34.39	31.91	31.38	32.17	30.16	
	Kota Malang	34.02	32.53	30.13	29.90	29.30		
	Kabupaten Malang	39.60	39.18	38.93	33.79	33.46		
	Kabupaten Mojokerto	32.90	31.79	31.02	29.43	29.27		
	AKB Jatim	36.65	35.32	32.93	31.58	31.41		
2.2.	Kematian ibu melahirkan (0.000 kelahiran hidup)	1	0	5	2	97	80	
2.3.	Angka usia harapan hidup	<b>68,10</b>	<b>68,50</b>	<b>68,64</b>	<b>68,87</b>	<b>68,92</b>	67.00	
	<b>Indeks Harapan Hidup</b>	71.75	72.17	72.74	73.12	73.20	<b>73.75</b>	
	Kota Malang	72.60	73.17	73.86	74.35	74.65		
	Kabupaten Malang	70.28	71.50	72.03	72.38	72.56		
	Kabupaten Mojokerto	73.17	73.83	74.29	74.58	74.66		
	IHH Jatim	<b>72.45</b>	<b>72.67</b>	<b>73.17</b>	<b>73.50</b>	<b>73.58</b>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk		0.78	1.15	1.35	0.31	0.27	
		141	143	140	157	174		

3.	Pertanahan							
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan		n.a	17%	16%	17%	18%	18%
4.	Ketenagakerjaan							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja							
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian							
1.2.	Jumlah gedung kesenian							
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	a. Jumlah klub olahraga					58	58	60
2.2.	b. Jumlah gedung olahraga					1	1	1
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah		97,46	99,12	99,41	99,18	101,99	102,28
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			52,65	56,76	96,61	96,30	96,46
1.1.3.	Rasio guru/murid					17,09	17,07	17,05
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata			37,85	37,93	24,36	24,11	23,90
1.2.	Pendidikan menengah pertama: (SLTP/MTs)							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah		90,21	91,74	93,82	92,49	99,62	86,77
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah					96,61	96,30	96,46
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid					16,13	15,75	15,56
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata					38,03	35,9	34,89
1.3.	Pendidikan menengah atas : (SMA/SMK/MA)							
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah		69,26	58,68	73,14	70,26	86,44	69,17
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah					48,14	52,65	56,76
1.3.3.	Rasio guru terhadap murid					14,02	14,4	14,73
1.3.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata			37,85	37,93	37,75	37,85	37,93
1.3.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)			99,65	99,65	99,65	99,65	99,65
1.4.	Fasilitas Pendidikan:							
1.4.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			77,93	81,03	74,38	77,93	81,03
1.4.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			82,83	83,51	82,02	82,83	83,51
1.4.2.	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik				86,85	80,78	81,2	81,62
1.5.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.5.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			51,2	52,24	50,18	51,29	52,24
1.6.	Angka Putus Sekolah:							
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI			0,08	0,06	0,10	0,08	0,06
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			0,68	0,61	0,6	0,68	0,61
1.6.3.	Angka Putus Sekolah			1,53	1,49	1,55	1,53	1,49

	(APS) SMA/SMK/MA							
1.7.	Angka Kelulusan:							
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99.75	99.75	99.68	99.75	99.75	99.75
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		95.74	96.1	93.6	95.74	96.1	96.1
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		95.08	95.32	95.55	95.08	95.32	95.32
1.7.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99.68	99.69	97.26	99.68	99.69	99.69
1.7.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		87.57	87.97	88.36	87.57	87.97	87.97
1.7.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		73.25	78.14	67.86	73.25	78.14	78.14
2.	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita		1:37	1:37	1:37	1:37	1:37	1:37
	Jml Posyandu	184	188	188	186	200		
	Jml Balita	15,589	19,098	19,294	19,117			
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk	30.56	34.46	29.03	28.75	3.16	4	
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	0.55	0.60	0.59	0.27	0.58	0,007	
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	60.56	63.40	174.21	195.94	194.09	0,06	
	Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk	-	23.84	23.66	14.38	17.40		
	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	415.13	547.26	540.90	144.82	468.87		
	Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	-	0.76	0.65	0.12	0.46		
	Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk	-	17.88	15.59	9.05	15.82		
	Jml Rumah Sakit	10	11	11	5	11		
	Jml Puskesmas, Pustu, Pusling	185	212	180	180	20		
	Jml Tenaga Medis	110	117	324	368	368		
	Keperawatan (perawat dan bidan)	754	1010	1006	272	889		
	Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)	0	44	44	27	33		
	Tenaga kesehatan	0	17	18	3	13		
	Sanitarian	0	39	30	6	22		
	Ahli gizi	0	33	29	17	30		
	Jml tenaga medis	220	317	198	205	#REF!		
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		84.2	100 <sup>a</sup>	40,1 <sup>a</sup>	49,1 <sup>a</sup>	32 <sup>**</sup>	
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90.66	98.29	97.30	97.77	99.97	72,7	
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		33.64	51.15	61.57	0.78	0.68	
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		85.76	91.42	82.61	0.46	0.38	
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		77.13	84.83	96.69	29,24%	15,39%	

2.13.	Cakupan kunjungan bayi			58.34	47.90	60.16	72,00%	67,10%
2.14.	Cakupan puskesmas			187,5%	187,5%	187,5%	187,5%	187,5%
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas			48,38%	48,38%	48,38%	48,38%	48,38%
3.	<b>PekerjaanUmum</b>							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			73.07	43.80	22.72	86.49	87.32
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi			60%	70%	75%	80%	80%
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			60%	70%	75%	80%	80%
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			65	70	75	75	80
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			40	45	45	45	50
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			40	45	45	45	50
3.7.	Rasio rumah layak huni			20	20	25	30	35
3.8.	Rasio permukiman layak huni			20	20	25	30	35
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4			0.0008	0.0006	0.0005	0.0004	0.0003
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)			73.07	75.74	85.14	86.49	87.32
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam )			82.50	83.00	87.50	89.00	90.00
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)			19,100	19,700	21,400	21,400	21,400
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar			40	45	40	30	20
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar							
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			45	50	55	60	60
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota							
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik			95	98	99	99	100
3.18.	Lingkungan Pemukiman			38.175	45.81	54.972	65.967	79.16
	Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill							
	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai			20	30	40	60	60
4.	<b>Perumahan</b>							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	27,197		27,744	28,579	29,565	31,354	32,026
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	250,569		255,393	263,935	270,737	284,472	290,745
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	98,23		98,60	98,38	98,53	82,35	448890
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh			46.92	47.95	58.5	713.7	87.075
4.5.	Rumah layak huni			469.2	479.522	585.016	713.72	870.739

5.	<b>Penataan Ruang</b>							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		37%	40%	40%	40%	38%	
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		658	597	1,665	1,475	2,295	
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya							
6.	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd		t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	
7.	<b>Perhubungan</b>							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum		1,537,539	1,255,914	1,568,444	1,584,129	1,599,970	
7.2.	Rasio ijin trayek		0.00032	0.00033	0.00034	0.00034	0.00035	
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum		9,834	9,889	9,944	9,999	10,054	
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		8	8	8	8	8	
7.5.	Angkutan darat		0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum		68.9%	67.9%	67.9%	66.4%	65.4%	
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		20 menit					
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum		37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu		0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	
8.	<b>Lingkungan Hidup</b>							
8.1.	Persentase penanganan sampah		20	20	25	28	30	
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum							
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata			10	12	14	20	
8.4.	Pencemaran status mutu air		63	68	78	89	89	
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air		60	63	65	67	68	
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		40	53,3	55,55	60	68	
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		30%	25%	20%	20%	28%	
8.8.	Penegakan hukum lingkungan		50	62,5	80	72,72	70	
	Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil		60	70	75	80	80	
9.	<b>Pertanahan</b>							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat		11%	12%	11%	12%	12%	
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara			100%		100%	100%	
9.3.	Penyelesaian izin lokasi		0	0	0	39,0%	97,0%	

10.	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		1:1,42	1:1,34	1:1,16	1:1,07	1:1,03	
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran		7,44	26,70	46,00	65,00	84,60	
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah		0,12	0,142	0,164	0,186	0,206	
10.4.	Kepemilikan KTP (%)		34.36%	43.26%	51.78%	60.50%	70.15%	
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		2.09%	2.95%	3.00%	2.98%	2.51%	
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	
11.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		14.95	47.46	47.32	48.70	14.95	
	Juml Pegawai			2,421	2,428	3,497		
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		85.05	85.00	85.00	86.00	85.05	
11.3.	Rasio KDRT	0.33	0.020	0.010	0.080	0.005	0.005	
		15	9	4	37	75	29	
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur							
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)						16	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)						38.23	
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		82,6	81,28	85,5	87,44	89,3	
12.	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	
12.2.	Rasio akseptor KB		78.73	75.47	73.58	73.6	74.01	
	Rasio Akseptor KB/Cakupan peserta KB aktif (dari Juml PUS)	79.47	78.73	75.47	73.58	73.6	74.01	
	Peserta KB Aktif	251,692	256,213	24,750	242,979	247,582	251,810	
	Jml PUS	316,695	325,452	326,969	330,233	336,377		
12.4.	RASIO Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	107.53	108.51	3.13	229.09	114.34	13.99	
13.	<b>Sosial</b>							
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi							
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial							
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial							
	Jumlah sarana peribadatan			555	616	613		
14.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	62	61	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun							

14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja		66.78	64.72	66,10	65,84	69,13	
	Penduduk Usia Kerja (>15th)		93.578	93.612	97.413	97.259	101.372	
	Penduduk yg bekerja		85.952	85.406	87,323	88,555	94,136	
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan							
	Tingkat Kesempatan Kerja		91,85	91,23	89,64	96,11	92,97	
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)		8,15	8,77	10,36	8,95	7,03	#VALUE!
	Jumlah Penganggur		7.626	8.206	10.080	8.704	7.236	
	TPT Jawa Timur (%)		5.82	5.74	6.01	4.84	5.08	
14.6.	Keselamatan dan perlindungan							
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah							
15.	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
15.1.	Persentase koperasi aktif			95.00%	66.67	66.67	67.63	67.16
	Jumlah Koperasi				135	135	139	
	Koperasi aktif				90	90	94	
	Kop melaksanakan RAT							37.70
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM			20	20.1	20.4	20.7	20.8
15.3.	Jumlah BPR/LKM		57	57	57	57	57	57
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil			-	-	8	13	24
16.	<b>Penanaman Modal</b>							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			-	-	-	-	40
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			-	-	-	-	748.28
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja			-	-	-	-	236
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			-	-	-	-	-
17.	<b>Kebudayaan</b>							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya							
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya							
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan							
18.	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda							
18.2.	Jumlah organisasi olahraga							
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)							
18.6.	Lapangan olahraga							
19.	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP							20%
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah							20%
20.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan</b>							

	<b>Persandian</b>							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		1:0,96	1:0,93	1:0,86	1:0,84	1:0,81	
	Jumlah Pol PP			27	27	67		
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		60	55,79	51,9	44,4	39,2	
	Jumlah Linmas			19	19	14		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan					651	651	
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah		tidak	tidak	tidak	ada	ada	
20.7.	Penegakan PERDA		85%	86%	87%	88%	87%	
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten		72%	74%	75%	76%	77%	
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten							
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		42%	43%	44%	45%	46%	
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Cukup	62%	70%	84%	89%	89%	
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat				2,50	2,50	2,50	
	Opini Audit BPK atas LKPD <sup>5</sup>	Wajar dengan Pengecualin	Wajar dengan Pengecualian	Wajar dengan Pengecualian	Tidak Wajar	Tidak Wajar	Tidak Wajar	
21.	<b>Ketahanan Pangan</b>							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan		-	-	-	-	1	
21.2.	Ketersediaan pangan utama	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	
22.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)					70	70	
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK					70	70	
22.3.	Jumlah LSM					0	1	
22.4.	LPM Berprestasi					15	20	
22.5.	PKK aktif					90	90	
22.6.	Posyandu aktif					90	60	
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat					60	65	
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat					15	20	
23.	<b>Statistik</b>							
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

	Dokumen IPM		ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Dokumen Indeks Gini		tidak ada					
	Dokumen ICOR		tidak ada					
	ICOR Jatim		3.09	3.18	3.05	3.04	3.6	
	Dokumen ILOR		tidak ada					
	ILOR Jatim		0.07	0.02	0.05	0.01	0.03	
	Dokumen Input - Output		tidak ada					
	Dokumen Indikator Kesejaht Rakyat		tidak ada					
	Dokumen Indeks Kepuasan Publik		tidak ada					
24.	<b>Kearsipan</b>							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku			30%	30%	30%	30%	30%
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		Cukup	30%	30%	40%	40%	40%
25.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi			12	57	115	124	190
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk							
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal			15	15	15	15	15
25.4.	Jumlah penyiaran radio			12	12	12	12	12
	Jumlah penyiaran TV lokal					1	1	1
25.5.	Website milik pemerintah daerah		tidak ada	1	5	12	43	46
25.6.	Pameran/expo							
26.	<b>Perpustakaan</b>							
26.1.	Jumlah perpustakaan umum pemerintah daerah			1	1	1	1	1
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			34,600	37,092	40,029	40,029	47,648
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			34,600	37,092	40,029	40,829	47,648
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	<b>Pertanian</b>							
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		20.48	20.38	20.34	19.51	18.70	
	Pertumbuhan Sektor Pertanian		4.86	5.83	6.31	6.12		
	Jumlah Produksi Padi (ton)				5,958.46	7,688.00		
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			58.90	59.93	60.36	62.51	63.45
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		49.80	49.59	49.53	49.28	49.18	49.23
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			25.01	25.25	25.29	25.30	25.30
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB			9.53	9.29	9.04	8.99	8.99
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB							3.25
1.6.	Cakupan bina kelompok petani			25.03	25.17	25.35	25.75	25.95
2.	<b>Kehutanan</b>							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			0,8	0,85	0,9	1,01	1,01
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			0,08	0,06	0,05	0,04	0,04
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB			1,05	1,06	1,06	1,06	1,06
3.	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
3.1.	Pertambangan tanpa							

	ijin							
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	4	4.02	4.04	4.06	4.08		
4.	<b>Pariwisata</b>							
4.1.	Kunjungan wisata Domestik+Manca Negara		828,251	990,684	1,007,058	1,180,042	1,906,170	
	Jumlah obyek wisata	5	5	6	6	7		
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB							
5.	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
5.1.	Produksi perikanan		66,748	66,748	66,532	44,847	57,877	
5.2.	Konsumsi ikan		28	28	28	38	29	
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan		19	20	21	21	25	
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan		144.4	163.2	192	240	201.6	
	Nilai tukar nelayan (NTN)							
6.	<b>Perdagangan</b>							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	46.76	46.22	45.79	46.47	47.46	23,79	
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan		-	-	-	11.497.875	13.840.650	
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal							
	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	21.74	22.33	22.75	22.89	22.93		
7.	<b>Perindustrian</b>							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7.73	7.7	7.61	7.53	7.29	5.65	
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri							
7.3.	Pertumbuhan Industri.	3.00	3.55	4.07	4.16	4.83	4.83	
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin							
8.	<b>Ketransmigrasian</b>							
8.1.	Transmigran swakarsa							
8.2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB							
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	363,230	IPM-Batu	
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	IPM-Batu	
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	<b>Pertanian</b>							
2.1.	Nilai tukar petani		110,05	110,1	110,17	110,25	110,51	
3.	<b>Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>							
	Produksi Daging (Ton/tahun)		7247	6972	5802	6739	5,618	
	Produksi Telor (Ton/tahun)		6901	6471	9064	4615	7,099	
	Produksi Susu (Ton/tahun)		371104	425000	642791	260000	377,710	
	Mortalitas Ternak (Angka Kematian)		0.4	0.5	0.65	0.6	0.5	

	Ternak)							
	Kejadian Penyakit			5	5.5	5.5	7	7
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	<b>Perhubungan</b>							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan			0.008	0.008	0.008	0.009	0.010
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			1,537,539	1,255,914	1,568,444	1,584,129	1,599,970
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			1,537,539	1,255,914	1,568,444	1,584,129	1,599,970
2.	<b>Penataan Ruang</b>							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW		Cukup	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup
2.2.	Luas wilayah produktif		RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW
2.3.	Luas wilayah industri		RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW
2.4.	Luas wilayah banjir		RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW
2.5.	Luas wilayah kekeringan		RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW
2.6.	Luas wilayah perkotaan		RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW	RTRW
3.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang			40	24	24	31	42
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang				3	3	3	3
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran							
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel						402	
4.	<b>Lingkungan Hidup</b>							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih		98,23	98,60	98,38	98,53	82,35	55,84
			27,197	27,744	28,579	29,565	31,354	32,026
5.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik							
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik		556.47	567.19	518.33	529.38	515.95	506.97
			250,569	255,393	263,935	270,737	284,472	290,745
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon							
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Angka kriminalitas		637	2,187	1,005	956	898	995
1.2.	Jumlah demo							
1.3.	Lama proses perijinan						80	85,71
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah							
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			1	8	1	4	2
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa			62%	70%	84%	89%	89%

Fokus Sumber Daya Manusia									
1.	<b>Ketenagakerjaan</b>								
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk						86.93		
1.2.	Rasio ketergantungan			NA	45.6	39.2	35.18	34.2	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						10	20	

*Sumber: Data dirangkum dari berbagai sumber, 2009*

## BAB III

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 40 menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) antara lain mencakup analisis isu-isu strategis. Dalam upaya menganalisis isu-isu strategis tersebut maka digunakan metoda SWOT.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan.

Isu-isu strategis daerah pada dasarnya adalah masalah/persoalan atau agenda yang perlu/harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah selang waktu 20 tahun. Strategis tidaknya suatu isu tentu harus dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Batu.

#### 3.1 Analisis SWOT / Analisis ALI dan ALE

Analisis lingkungan strategis dengan pendekatan SWOT dilakukan dalam upaya untuk mengidentifikasi semua faktor yang mendukung dan menghambat terhadap pencapaian tujuan, baik yang berkenaan dengan Analisis Lingkungan Internal (ALI) maupun Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. *Pertama*, adalah strategi S - O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. *Kedua*, adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. *Ketiga*, adalah strategi S - T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. *Keempat*, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan.

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Kota Batu, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

##### 3.1.1. Lingkungan Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelemahan.

*Pertama*, faktor kekuatan. Kota Batu memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan:

##### 1. Potensi Alam

Selain sektor pertanian, Kota Batu memiliki potensi alam lainnya, yaitu di bidang Pariwisata terutama wisata alam. Potensi alam ini pada kenyataannya belum

dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Batu. Selain potensi pariwisata, Kota Batu juga memiliki potensi alam lainnya, seperti potensi di bidang sumberdaya air, agroindustri, dan kerajinan.

2. Ketersediaan sumber daya buatan (infrastruktur) yang ada dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah.

3. Jumlah Penduduk yang Cukup Besar

Jumlah penduduk di Kota Batu menurut hasil sensus pada tahun 2009 adalah 189.489 jiwa. Secara ekonomi, ini merupakan salah satu potensi untuk menggerakkan berbagai kekuatan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh Kota Batu sendiri.

4. Banyaknya Tokoh yang Berpengaruh

Di Kota Batu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Pengaruh itu bahkan tidak hanya untuk komunitasnya sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah dilakukan. Karakteristik masyarakat yang memiliki dasar nilai-nilai keagamaan yang kuat, merupakan modal dasar paling penting untuk dapat mewujudkan suatu entitas kota yang bermartabat yang menjunjung tinggi budaya luhur sehingga tercipta masyarakat berparadigma global dengan kearifan lokal berdasarkan imtaq dan iptek. Upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan SDM baik dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, yang bermoral, berbudaya memberikan peluang bagi meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kota yang berkualitas dan bersih dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*clean government and good governance*).

5. Heterogenitas Budaya Masyarakat

Karakteristik masyarakat Kota Batu yang religius dan heterogen, mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Keragaman budaya Kota Batu merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan.

6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kota Batu

7. Kekuatan Birokrasi

Keputusan-keputusan politik, berupa kebijakan-kebijakan publik, yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bermakna secara berarti tanpa diimplementasikan. Untuk itu, birokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Kota Batu memiliki potensi birokrasi yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat.

*Kedua*, faktor kelemahan. Di samping memiliki kekuatan, Kota Batu juga memiliki kelemahan-kelemahan.

1. Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian Rendah

Kota Batu memiliki kelemahan berkaitan dengan pemanfaatan pasca panen. Keragaman hasil hortikultura, misalnya, masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan secara optimal yang memungkinkan adanya nilai tambah (*added values*) dari produk-produk itu. Hal ini masih diperparah dengan adanya degradasi kualitas lahan pertanian terutama produk hortikultura apel yang menjadi andalan Kota Batu.

2. Pembangunan yang Masih Belum Merata

Tingkat pembangunan di Kota Batu tidak merata. Terdapat disparitas antar daerah, khususnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Di tingkat kecamatan, pembangunan juga masih belum merata. Ada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki dinamika perkembangan ekonomi lebih baik, seperti di kecamatan kota dan Genteng, sementara itu ada kecamatan-kecamatan lain yang memiliki kelambatan di dalam perkembangan ekonomi.

3. Rendahnya Pendapatan per Kapita

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Batu termasuk kategori tinggi di Jawa Timur namun pendapatan per kapita penduduk masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Berdasarkan data Bappeprov Jatim, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota batu sebesar 5,02% dengan pendapatan per kapita Rp. 14,97 juta, sementara rata-rata Jawa Timur pertumbuhan ekonominya sebesar 4,88% dengan pendapatan per kapita Rp. 19,57 juta. Hal ini juga tercermin dari rendahnya posisi indeks paritas daya beli masyarakat yang masih berada di kuadran 4 (IPM tinggi namun daya beli rendah)

Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2011 mencapai Rp.17,92 Juta meningkat Rp. 824,35 ribu per kapita dibandingkan tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp. 17,09 Juta atau naik 4,82 Persen. Sedangkan jumlah PDRB per Kapita ADHK tahun 2011 mencapai Rp. 7,60 Juta meningkat 1,64 Persen atau Rp. 122,27 ribu per kapita dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 17,09 Juta.

Meskipun kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian kinerja PDRB per kapita ADHK tahun 2011 sebesar Rp. 7.600.000,00 menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK masih belum mencapai nilai varian target yang ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp. 9.000.000,00.

4. Masih Relatif Tingginya Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kota Batu tergolong tinggi meskipun cenderung menurun. Pada tahun 2005 jumlah penganggur terbuka di Kota Batu sebanyak 7.626 orang kemudian meningkat menjadi 8.206 orang pada tahun 2006. Angka ini meningkat kembali menjadi 10.080 orang pada tahun 2007. Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batu untuk mampu menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 8.704 orang dan pada akhir tahun 2009 turun lagi menjadi 7.069 orang. Angka ini sedikit meningkat kembali menjadi 8.128 orang pada

tahun 2010 dan pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 8.001 orang atau sebesar 7,65%.

5. Masih Kurangnya Infrastruktur

Infrastruktur di Kota Batu, khususnya infrastruktur fisik, masih tergolong kurang memadai. Jalan poros maupun jalan tembus dirasa masih kurang terutama pada saat libur sekolah maupun hari-hari besar. Kemacetan cukup parah sering terjadi sehingga menjadikan pengunjung Kota Batu maupun pengguna transportasi lainnya merasa tidak nyaman. Panjang jalan berdasarkan pengelolaan dan jenisnya di Kota Batu yaitu jalan kabupaten panjang sekitar 242,96 Km dan jalan propinsi panjang 39,5 Km. Fasilitas transportasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Kota Batu selama 7 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, infrastruktur pokok lainnya, seperti dam dan saluran irigasi juga perlu perbaikan-perbaikan. Padahal, infrastruktur demikian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor-sektor terkait lainnya. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan sangat diperlukan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

6. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tergolong rendah. Rata-rata setiap tahun masih kurang dari Rp. 20 milyar. Bahkan pada tahun 2010 realisasi PAD hanya sebesar Rp. 17,74 milyar sedangkan total pendapatan dalam APBD sebesar Rp. 410,22 milyar atau sekitar 4,32%. Hal ini membuat pemerintah Kota Batu masih belum bisa maksimal di dalam membiayai program-program pembangunan yang direncanakan. Selain itu, realitas demikian juga menunjukkan bahwa di dalam masalah sumber keuangan, Kota Batu masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK.

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu masih rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat/propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rendahnya rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Batu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi.

7. Meningkatnya Dekadensi Moral

Dalam dekade belakangan, kecenderungan munculnya dekadensi moral cenderung meningkat di Kota Batu, seperti adanya penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah, dan pornografi di kalangan remaja.

8. Cenderung Ditinggalkannya Budaya Lokal

Kota Batu memiliki budaya lokal yang khas, mulai seni musik, seni suara, dan menari. Tetapi, budaya demikian mulai tidak lagi mempunyai daya tarik bagi kalangan muda.

Sebagaimana di daerah-daerah lain, kalangan muda di Kota Batu lebih menyukai budaya modern, bahkan budaya asing.

### 3.1.2. Lingkungan Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan kesempatan dan faktor-faktor ancaman atau tantangan.

*Pertama*, faktor peluang.

#### 1. Arus Manusia, Barang, dan Arus Modal antara Bali dan Provinsi Jawa Timur

Posisi geografis Kota Batu yang berada di persimpangan Malang-Kediri-Jombang-Surabaya, menjadi lintasan utama arus penumpang dan barang di Provinsi Jawa Timur. Lokasi Kota Batu sebagai salah satu titik pusat kegiatan di kawasan sekitarnya utamanya kawasan pusat Satuan Pengembangan Wilayah (SWP) Jawa Timur bagian selatan menjadikan Kota Batu mempunyai posisi yang sangat strategis berkaitan dengan aspek lokasi. Kota Batu memiliki potensi untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan masyarakat dan Kota Batu. Dengan demikian, arus manusia, barang dan modal itu tidak hanya melewati Kota Batu, melainkan seharusnya memberi imbas positif dalam menggerakkan perekonomian di Kota Batu.

#### 2. Sumber Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kota Batu memperoleh dana perimbangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, baik berupa DAU maupun DAK. Selain itu, Kota Batu juga memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari berbagai instansi di pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan program-program yang mereka lakukan di daerah.

#### 3. Arus Investasi

Iklim investasi di Indonesia membaik di dalam tahun-tahun belakangan. Iklim demikian telah membuat banyak investor, baik domestik maupun asing, mulai melirik kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketertarikan ini tidak lepas dari realitas bahwa berinvestasi di Indonesia termasuk menguntungkan. Karena itu, dalam tahun-tahun belakangan, arus investasi itu semakin meningkat.

Di Kota Batu, indikator investasi menggambarkan besarnya nilai investasi dan jumlah investor yang masuk di Kota Batu. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan semakin meningkat pula kondisi perekonomian. Gambaran tentang besarnya dan pertumbuhan investasi, antar waktu dapat didekati dengan besarnya posisi kredit investasi yang diberikan oleh kalangan perbankan kepada masyarakat Kota Batu setiap tahun.

Peningkatan investasi tahun 2009 adalah 18,58% dibanding tahun 2008. Sedangkan laju pertumbuhan investasi antar waktu sejak tahun 2005-2011 mencapai 16,47%. Kondisi ini ditunjang pula dengan semakin besarnya distribusi kredit perbankan di Kota Batu pada tahun 2011. Berdasarkan laporan Bank Indonesia laju pertumbuhan kredit di Kota Batu tahun ini sebesar 43,01% (yoy) dengan porsi terbesar terletak pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mencapai Rp. 132.265 juta dengan *growth* 111,82%

#### 4. Meluasnya Ekonomi Pasar

Ekonomi pasar telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya Kota Batu. Di antara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi dari Kota Batu untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki ekonomi pasar itu, sehingga keberadaannya membawa manfaat untuk Kota Batu.

*Kedua*, faktor tantangan.

##### 1. Penetrasi Kekuatan Ekonomi Pasar Global

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat dan menjadi bagian dari kegiatan. Hal ini, misalnya, terlihat dari masuknya bisnis ritel sampai ke berbagai daerah. Kekuatan besar ini telah berpengaruh terhadap hidup matinya bisnis ritel tradisional. Manakala kekuatan ekonomi pasar global itu tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan pasar global itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kota Batu. Persaingan akan semakin tajam, sementara itu daya saing produk lokal masih belum kuat. Sektor ekonomi riil masih didominasi oleh sektor informal sehingga untuk peningkatan kapasitasnya masih menghadapi kendala-kendala teknis dan pendanaan.

##### 2. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu

Pemanasan global telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. Hal ini terlihat kuat pada 2010. Kita tidak mengetahui secara pasti mana bulan-bulan yang terkatagori musim hujan dan mana bulan-bulan yang terkatagori musim kemarau. Kecenderungan demikian mengganggu pola tanam yang dilakukan oleh petani. Para nelayan juga terganggu karena pola iklim yang tidak menentu itu juga berpengaruh terhadap naik turunnya ombak di laut. Konsekuensinya, para petani dan nelayan itu mengalami kerugian akibat iklim yang tidak menentu tersebut. Pada tahun 2010 kinerja sektor Pertanian diwarnai oleh anomali iklim, yaitu La Nina, yang mengakibatkan musim basah sepanjang tahun, bahkan diperkirakan sampai bulan Maret atau April 2011

##### 3. Hama Penyakit Tanaman

Hama tanaman masih menjadi salah satu ancaman serius bagi usaha para petani. Hama wereng, misalnya, telah menghancurkan harapan para petani untuk menikmati hasil dari lahan-lahan yang mereka garap. Setiap saat, terdapat potensi ancaman hama yang menyerang tanaman para petani.

##### 4. Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Tingkat kerusakan lingkungan di Kota Batu termasuk cukup tinggi. Kerusakan itu, misalnya, terlihat dari semakin tidak suburnya lahan-lahan yang ditanami para petani. Hal ini tidak lepas dari pola tanam yang tidak bagus dan penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia yang berlebihan. Konsekuensinya, produktivitas lahan di Kota Batu mengalami penurunan setiap tahun. Ketika hal ini dibiarkan, bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani. Selain itu, Kota Batu termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, karena kedudukan wilayah Kota Batu yang merupakan dataran tinggi

menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor. Bencana alam sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam, isu pemanasan global, permasalahan bencana alam, dan berbagai permasalahan lain yang terkait dengan *space of life*.

#### 5. Dekadensi Moral dan Budaya

Globalisasi dikhawatirkan menurunkan keibadahan dan keimanan masyarakat. Sebagai kota pariwisata, Kota Batu rawan terhadap berbagai benturan sosial dan budaya. Masuknya arus globalisasi yang membawa arus informasi, modal, dan tenaga kerja bisa mengancam eksistensi budaya lokal. Terjadinya pergeseran nilai budaya dan masuknya budaya asing dapat menimbulkan benturan nilai ketahanan budaya sehingga mendorong masyarakat untuk semakin meninggalkan nilai-nilai luhur budaya ketimuran/lokal.

#### 6. Persaingan Ekonomi Antar Daerah

Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kota Batu, contohnya, harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya untuk memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat. Juga harus bersaing di dalam menarik para investor.

### 3.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan.

#### 3.2.1. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan di dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala kualitas pendidikan dan kesehatan bagus, kualitas SDM akan sekaligus bagus. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi bagian penting dari MDGs sebagaimana diprogramkan oleh PBB. Sehingga, negara-negara lain juga menaruh perhatian yang serius terhadap dua isu ini.

SDM merupakan faktor utama dari pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lebih baik, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga lebih baik, biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Pada akhirnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Jepang dan sejumlah negara lainnya, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Hanya saja mengingat negara-negara itu memiliki SDM yang berkualitas, mereka mampu menjadi negara yang maju. Karena memiliki kualitas SDM yang bagus, banyak negara maju telah menjadi negara yang jauh lebih kompetitif (*competitive state*) kalau dibandingkan negara-negara lain. Di Asia, di antara negara yang kompetitif adalah Jepang dan Singapura.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. Untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kota Batu dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah.

Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada di Kota Batu. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Keberadaan Kota Batu dengan potensi fasilitas pendidikan yang cukup-lengkap mulai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD, SMP, SMA, dan SMK yang berkualitas, yang telah memiliki orientasi pengembangan sampai ke tingkat kompetensi nasional dan global (internasional). Keberhasilan bidang pendidikan yang telah dicapai sangat menggembirakan. Telah terwujudnya Jardiknas dan JIS (Jaringan Informasi Sekolah) merupakan suatu upaya nyata dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kompetensi global bidang pendidikan. Dalam bidang Pendidikan terutama perlu diupayakan melalui:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat.
- 2) Penguatan keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan.
- 3) Pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global.
- 4) Penciptaan atmosfer yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan.
- 5) Akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
- 6) Pemantapan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun.
- 7) Pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional, internasional, dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- 8) Peningkatan mutu pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan .
- 9) Pengembangan fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca.
- 10) Penguatan dan pembinaan prestasi bagi pemuda dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 11) Peningkatan prestasi olah raga di setiap cabang olahraga sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Batu masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada 2005, AHH di Kota Batu 65,60, sementara di Jawa Timur rata-rata sudah mencapai 68,47. AHH penduduk Kota

Batu mencapai 69,37 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah sekitar 73 tahun. Sementara di Jawa Timur sudah menjadi 69,15. Sedangkan AKB mencapai 37,36 artinya rata-rata dari setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian imunisasi. Pada tahun 2009 banyaknya balita bawah garis merah adalah 1,30%, Keadaan ini diperparah oleh rendahnya pola pangan harapan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Di samping, angka kematian bayi dan ibu-ibu yang melahirkan masih cukup tinggi. Keadaan demikian menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Batu.

AHH penduduk Kota Batu pada tahun 2011 mencapai 69,66 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah sekitar 70 tahun. Sedangkan AKB mencapai 29,20 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 29-30 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian imunisasi.

Di sisi lain, Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia. Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota. Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang memadai.

IPM Kota Batu termasuk dalam kategori tinggi di Jawa Timur, namun indeks harapan hidup masih relatif rendah. Oleh karena itu, Kinerja bidang kesehatan perlu ditingkatkan dengan: 1) Pemerataan layanan kesehatan ke seluruh wilayah perdesaan melalui perbaikan ratio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis, serta dapat menjangkau dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi lemah, 2) Peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional, 3) Peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, 4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional berlangsung cepat dan dinamis, harus diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta kecukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi, serta 5) Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Kota Batu.

### **3.2.2. Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acap kali terkait satu sama lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber

penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Di Kota Batu, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kota Batu memang mengalami penurunan. Tetapi, jumlah penduduk yang terkatagori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Pada tahun 2007 BPS Propinsi Jawa Timur mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Batu adalah 17.300 orang atau sebesar 9,71% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 207.166,00 lebih tinggi dari Kota Malang yang pada periode yang sama mencapai Rp. 201.031,00. Garis kemiskinan Kota Batu menduduki peringkat ke 4 (empat) di seluruh Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Pada tahun 2009, berdasarkan data dari BPS Kota Batu besarnya penduduk miskin di Kota Batu adalah 5.817 KK di antara seluruh jumlah 55.136 KK. Angka tersebut merupakan angka murni yang dijadikan dasar untuk penyaluran Raskin Kota Batu tahun yang sama. Berdasarkan data itu, maka tingkat kemiskinan di Kota Batu pada tahun 2009 mencapai 10,55%.

Lapangan pekerjaan di Kota Batu umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08%, pada sektor pertanian 20,66%, perdagangan 19,51%, jasa 10,21% dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54%. Pada tahun 2005 jumlah penganggur terbuka di Kota Batu sebanyak 7.626 orang kemudian meningkat menjadi 8.206 orang pada tahun 2006. Angka ini meningkat kembali menjadi 10.080 orang pada tahun 2007.

Dalam situasi semacam itu, di antara tantangan besar bagi Kota Batu di dalam meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara terus menerus dengan jalan:

- 1) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan.
- 2) Sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- 5) Penguatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi.
- 6) Penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/pendampingan serta perlindungan.

### **3.2.3. Revitalisasi Sektor Pertanian dan Pariwisata**

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ke tiga bagi PDRB di Kota Batu. Dalam lima tahun terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB menjadi 20%. Secara riil perekonomian Kota Batu banyak digerakkan oleh tiga sektor utama yaitu: perdagangan, jasa, dan pertanian. Sektor perdagangan dan pariwisata (termasuk Perhotelan dan Restoran) menyumbangkan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Batu, yaitu rata-rata sebesar 39,86%. Kontribusi sektor jasa-jasa rata-rata sebesar 23,64%, dan sektor pertanian memberikan kontribusi riil rata-rata terhadap pertumbuhan sebesar 15,62%. Di samping sebagai salah satu penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan

penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena sektor industri olahan, tidak cukup berkembang. Sementara itu, sektor jasa yang berkembang lebih cepat, secara tradisional memang dikenal sebagai sektor yang tidak banyak menyerap angkatan kerja.

Meskipun demikian, sektor pertanian di Kota Batu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Para petani, menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Para nelayan, menghadapi masalah dengan penurunan tangkapan ikan. Di pihak lain, para petani dan nelayan tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Tantangan terbesar bagi Kota Batu adalah melakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini, produksi sektor pertanian akan meningkat, sehingga sumbangannya pada PDRB juga akan meningkat. Selain itu, revitalisasi juga berkaitan dengan upaya mengkaitkan (*linkage*) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani dan nelayan juga akan mengalami peningkatan.

Di sektor pertanian diperlukan upaya-upaya: 1) Pengembangan agribisnis dan penguatan jejaring untuk meningkatkan kesejahteraan petani, 2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penguatan sistem pertanian, 3) Penguatan kelembagaan petani pangan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani, dan 4) Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan sub sektor perkebunan ditingkatkan kinerjanya melalui pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Batu, pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan dari hulu-hilir termasuk peningkatan mutu SDM, pengelolaan sumber daya perkebunan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani, dan mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal.

Sementara itu, sektor jasa yang memiliki potensi bagi peningkatan sumbangan terhadap PDRB adalah sektor pariwisata dan yang terkait dengan industri pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan industri kerajinan. Kota Batu memiliki potensi wisata alam yang cukup besar. Potensi ini lebih besar lagi kalau dikaitkan dengan posisi Kota Batu, sebagai daerah pintu masuk ke Bali melalui perjalanan darat. Manakala potensi wisata itu bisa dikembangkan secara baik, industri kaitan lainnya juga akan berkembang secara baik pula.

Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungannya yang kondusif, akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkan potensi pertanian yang ada di Kota Batu dan sekaligus bisa dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh. Mulai dari hasil produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanaman hias, bunga potong serta hasil produksi buah-buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan yang tak kalah menarik adalah hasil produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk pertanian yang lain.

Potensi pariwisata Kota Batu berupa alam, adat istiadat, seni dan budaya perlu dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan kepariwisataan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai setempat. Ekowisata dan desa wisata lebih

ditekankan/menjadi prioritas sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Di samping itu harus didukung sumber daya manusia, fasilitas pariwisata yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana wisata belanja untuk menampung produk khas Kota Batu termasuk industri kecil/kerajinan. yang akan dikembangkan adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Wisata alam dan wisata budaya menunjukkan keunggulan atau kekhasan Kota Batu. Sedangkan untuk wisata belanja dalam perkembangannya harus diarahkan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk khas Kota Batu seperti kerajinan dan sebagainya.

#### **3.2.4. Infrastruktur**

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur.

Kondisi infrastruktur fisik di Kota Batu tergolong masih belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Seiring dengan semakin meningkatkan pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional jalan propinsi dan kotamadya harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan region nal/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kota Batu mencapai 490,83 Km, terbagi atas jalan propinsi sepanjang 19,00 km dan jalan Kotamadya 471,83 km. Jika diamati menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 66,67 persen dari total panjang jalan. Berikutnya berupa kerikil sebesar 15,18 persen dan tanah sebesar 7,96 persen. Kondisi permukaan jalan jika dilihat dari kondisinya, pada tahun 2009 sekitar 19,52 persen termasuk dalam kategori baik, 45,06 persen kategori sedang, 22,38 persen rusak ringan dan sisanya masuk kategori rusak berat. Kondisi demikian jelas tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya.

Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat terdapat dana yang memadai. Di Kota Batu, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Di antaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infratraktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi.

Oleh karena itu, Perlu diwujudkan “Insentif Investasi” melalui peningkatan iklim investasi dalam rangka mempertahankan investor yang sudah ada dalam rangka mendatangkan investor baru dan dalam rangka menjawab tantangan persaingan global, melalui langkah-langka konkrit, peningkatan kualitas SDM petugas/aparat terkait, perubahan metode promosi, dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap infrastruktur pendukung investasi.

#### **3.2.5. Lingkungan**

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Di antara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan.

Di Kota Batu masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.

Perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan khususnya di Kota Batu. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak harus dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang daerah melalui kebijakan penyediaan ruang terbuka sebesar 30% seperti diamanatkan dalam UU No 26 tahun 2007.

Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun mengakibatkan berkurangnya imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama. Ancaman bencana alam gempa bumi, angin ribut, banjir, serta kekeringan walaupun tidak dapat diprediksi kejadiannya masih menjadi tantangan di masa mendatang sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dan kesadaran harus terus dilakukan.

Terkait dengan kondisi geomorfologis, letak geografis, topografis, di persimpangan jalan Malang-Kediri-Jombang-Surabaya, iklim yang sejuk, serta adanya potensi alam yang bernilai sangat strategis merupakan peluang yang sangat positif bagi upaya untuk menciptakan suatu lingkungan sentra pariwisata, agropolitan, perdagangan, industri dan jasa yang dapat dijadikan sebagai kawasan terintegrasi dimana sentra dan obyek pariwisata serta beberapa fasilitas perdagangan, industri, dan jasa dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Karena itu, tantangan besar bagi Kota Batu adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Kota Batu ke depan diproyeksikan untuk menjadi kota yang ramah, bersih, dan nyaman dengan indikator lingkungan yang sehat dan tumbuhnya investasi dalam koridor *green economy*. Kondisi ini ditandai dengan semakin rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, udara di bawah ambang batas yang ditetapkan, semakin luasnya wilayah ruang terbuka hijau kota serta makin beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat Kota Batu.

Pembangunan fisik dilakukan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dipandu dengan perangkat perencanaan kota yang secara substantif mampu menjamin kelestarian lingkungan.

### **3.2.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Globalisasi membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan Pusat maupun Daerah, salah satunya pemanfaatan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Konsekuensinya, masyarakat akan semakin menuntut pelayanan yang cepat, praktis namun murah. Di masa depan pengaruh TI

ini harus berdampak positif pada perubahan kinerja dalam bidang aparatur negara. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* harus di dukung juga oleh *e-government* yang memadai dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Oleh karena itu pentingnya dipersiapkan sejak awal personil-personil yang sangat memahami masalah IT di lingkungan pemerintah daerah Kota Batu.

Proses demokratisasi secara nasional sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan desentralisasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat di seluruh Indonesia semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi peluang, tantangan, sekaligus menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini. Tiadanya partisipasi masyarakat akan membuat aparatur negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi dan tuntutan masyarakat di masa depan perlu dikodifikasikan dalam bentuk agenda masa depan, agar mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dapat memenuhi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dan kinerja organisasi publik.

Pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan masih sedikit dan merupakan sasaran pembangunan yang masih akan menjadi isu penting dan sulit dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya seiring terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh: desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi.

Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kota Batu. Perwujudannya berarti adanya tatanan yang akan menunjang upaya untuk mewujudkan Kota Batu lebih baik di masa mendatang.

Karakteristik masyarakat yang memiliki dasar nilai-nilai keagamaan yang kuat, merupakan modal paling penting untuk dapat mewujudkan suatu entitas kota yang bermartabat yang menjunjung tinggi budaya luhur sehingga tercipta masyarakat berparadigma global dengan kearifan lokal berdasarkan imtaq dan iptek. Upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan SDM baik dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, yang bermoral, berbudaya memberikan peluang bagi meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kota yang berkualitas dan bersih dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*clean government and good governance*).

### **3.3 Modal Dasar**

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan daerah, antara lain:

1. Karakteristik masyarakat Kota Batu yang religius dan heterogen, mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis Kota Batu yang berada di persimpangan Malang-Kediri-Jombang-Surabaya, menjadi lintasan utama arus penumpang dan barang di Provinsi Jawa Timur.
3. Jumlah penduduk menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah;
4. Keragaman budaya Kota Batu merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan;
5. Kota Batu memiliki produk-produk unggulan UKM seperti agroindustri, makanan olahan, kerajinan dan sebagainya.
6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kota Batu; serta
7. Ketersediaan sumber daya buatan (infrastruktur) yang ada dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah.

## BAB IV

### VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

#### 4.1 Visi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan filosofi pembangunan Kota Batu yaitu **"HAKARYO GUNO MAMAYU BAWONO"** merupakan sasanti yang bermakna *Berkarya Guna Membangun Negara*. Filosofi tersebut sebagai perwujudan dari tekad Pemerintah dan masyarakat Kota Batu yang senantiasa bekerja keras, pantang menyerah dan selalu menjaga keserasian hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan alam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sejalan dengan filosofi Kota Batu tersebut dan capaian hasil pembangunan sebelumnya perlu adanya konsep-konsep sehingga pembangunan ke depan terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu menetapkan visi dan misi pembangunan daerah periode 2005-2025. Visi pembangunan Kota Batu adalah:

**"Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani"**

Visi tersebut mengandung beberapa variable utama, yaitu:

##### (a) Sentra pariwisata

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kota Batu dijadikan kota sentra wisata bukan tanpa dasar. Jika dicermati lebih mendalam, Kota Batu memiliki kekayaan dan potensi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur. Potensi tersebut juga dikembangkan melalui wisata artifisial, wisata budaya dan wisata agronomi. Keadaan itulah yang membuat Kota Batu banyak diminati oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara. Namun demikian kekayaan dan potensi alam tersebut belum digarap secara maksimal sehingga perlu mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak. Berdasarkan uraian tersebut, kiranya sudah cukup alasan yang sangat kuat untuk meningkatkan posisi Kota Batu menuju sentra pariwisata.

##### (b) Berbasis Pertanian

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pariwisata yang berdaya saing tinggi, maka didukung sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura yang mempunyai spesifikasi tersendiri dan tidak dimiliki daerah lainnya. Didukung tanahnya yang subur, udara bersih, sejuk dan panorama yang indah semakin memperkuat daya tarik untuk mengembang sektor pertanian, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

### **(c) Berdaya Saing**

Kota Batu yang berdaya saing mengacu pada kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; struktur perekonomian yang kokoh dan kompetitif; kualitas SDM yang tinggi sebagaimana tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG); layanan publik yang berkualitas yang ditunjang dengan *e-government*, terintegrasinya infrastruktur baik *software*, *hardware*, dan *brainware*, serta terwujudnya *clean government and good governance*.

### **(d) Masyarakat Madani**

Masyarakat madani merupakan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-NYA. Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah, masyarakat berperadaban, *civil society*. Masyarakat madani Kota Batu diharapkan merupakan sebuah komunitas sosial dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi, yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Karakteristik masyarakat madani, adalah ditemukannya fenomena: (a) demokratisasi, (b) partisipasi sosial, dan (c) supremasi hukum; dalam masyarakat. Dalam tataran praktis bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Batu kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara material maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

#### **• Demokratisasi**

Demokratis memiliki makna yang luas di dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan demokratis mengandung indikator sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan khususnya infrastruktur oleh masyarakat serta pemeliharaan sarana publik.
- b. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam segala aspek kehidupan.
- d. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi adanya pemerintahan/birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

#### **• Partisipasi Sosial**

Partisipasi sosial adalah keterlibatan mental dan emosional masyarakat Kota Batu di dalam situasi bermasyarakat/bernegara yang mendorong untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan berbagi tanggung jawab di dalam pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi sebagai bagian integral dari pelibatan masyarakat adalah suatu proses yang

menggunakan seluruh kapasitas masyarakat yang dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi suksesnya program-program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana pembangunan. Partisipasi sosial dapat diketahui dari persepsi anggota masyarakat bahwa dirinya merasa mengalami peristiwa penting ketika dilibatkan dalam aktivitas yang dilakukan sehingga membuat sebagian perhatian berpusat pada aktivitasnya dan merasa bahwa aktivitas tersebut adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Tiga aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah:

1. Keterlibatan emosi dan mental masyarakat yaitu, melibatkan emosi dan mental dari pada kegiatan fisik. Keterlibatan psikologis lebih besar dari pada secara fisik. Anggota/komponen masyarakat yang mempunyai partisipasi tinggi akan nampak dalam perilakunya yaitu aktivitas yang kreatif dan semangat yang tinggi.
2. Motivasi untuk menyumbang yaitu, motivasi untuk menyumbangkan ide-ide kreatif dan membangun.
3. Penerimaan tanggung jawab yaitu, mampu menerima tanggung jawab dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi merupakan proses sosial yang melibatkan diri pelaku usaha dalam bermasyarakat untuk mencapai keberhasilan. Komponen masyarakat yang dapat menerima tanggung jawab dalam aktivitas masyarakat akan dapat bekerja sama dalam satu kesatuan yang merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Asas partisipasif, berarti setiap warga Kota Batu mempunyai hak untuk bersuara dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang disalurkan melalui intermediasi institusi dan legitimasi lewat sistem perwakilan. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berbicara dan berpendapat untuk selanjutnya secara konstruktif diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tahap pemeliharaan.

- **Supremasi Hukum**

Artinya pemerintahan berdasarkan hukum dan hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara, termasuk para pejabat pemerintah, tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Kebebasan sipil dan hak-hak sipil yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, serta kebebasan pers akan sangat sulit diwujudkan jika hukum tidak diberlakukan secara tegas dan pada semua orang, termasuk pejabat pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum (*rule of law*) merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil.

*Rule of Law* mengandung arti bahwa pemerintah yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat di setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat, serta memiliki kesempatan untuk dievaluasi. Upaya tersebut sangat penting untuk dilakukan di era reformasi seperti sekarang ini karena

tanpa keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian daerah dan nasional pertumbuhannya kurang maksimal.

Pada akhir periode RPJPD tahun 2025, pembangunan di Kota Batu dalam bidang kesejahteraan diharapkan telah mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitas lembaga jaminan sosial; kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa serta pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

## 4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kota Batu terkait dan tidak terlepas dari misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur yakni: (a) mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro; (b) mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya; (c) mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup; (d) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; (e) mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi, dan (f) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik; Memperhatikan substansi yang terkandung dalam visi Kota Batu 2005-2025; maka perlu dirumuskan misi yang mengarah pada pencapaian kondisi akhir (tahun 2025) sebagaimana tercermin pada visi, yakni:

### 4.2.1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal

Pesatnya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan arus globalisasi semakin deras, sehingga batas ruang dan waktu antar wilayah makin kabur. Salah satu dampak globalisasi adalah masyarakat semakin mudah mengenal nilai-nilai kehidupan yang berasal dari budaya luar (asing), tanpa terkecuali masyarakat Kota Batu. Akibatnya, terjadi akulturasi dan asimilasi budaya, di mana nilai-nilai budaya lokal akan mengadopsi nilai budaya asing. Hal ini bukan menjadi suatu masalah, sepanjang nilai-nilai budaya asing tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Hal yang perlu diantisipasi adalah ketika nilai-nilai budaya asing tersebut justru mereduksi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah berkembang di masyarakat Kota Batu. Ancaman penurunan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, terutama dihadapi oleh generasi muda Kota Batu. Hal ini tercermin dari perilaku sebagian besar pemuda yang kurang memperhatikan norma-norma sosial dan nilai-nilai keagamaan. Generasi muda Kota Batu lebih mudah menerima budaya asing yang sarat dengan nilai-nilai hedonistik dan individual.

Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal memiliki kontribusi positif bagi pembentukan modal sosial, yang juga diperlukan bagi pembentukan masyarakat madani di Kota Batu. Modal sosial tidak akan berkembang bahkan akan terancam hilang, apabila kehidupan masyarakat kental dengan nilai-nilai hedonistik dan individual. modal sosial hanya akan tumbuh dan berkembang ketika terdapat rasa kebersamaan yang kuat diantara anggota suatu komunitas atau masyarakat.

Memperhatikan manfaat dari modal sosial bagi pembangunan, serta melihat kondisi terdegradasinya nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal di masyarakat Kota Batu, terutama generasi mudanya; maka Pemerintah Kota Batu berinisiatif untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Sebagai suatu inisiatif, tentunya kebijakan pemerintah dalam membangun modal sosial memerlukan peran aktif dari berbagai pihak; terutama institusi-institusi sosial dan keagamaan.

Pemerintah Kota Batu akan merumuskan kebijakan yang ditujukan bagi pemberdayaan institusi-institusi tersebut (misal: lembaga keagamaan, lembaga sosial dan lembaga kepemudaaan), agar dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melestarikan serta mengembangkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Harapannya, agar gerak langkah kehidupan masyarakat Kota Batu senantiasa lekat dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal merupakan langkah awal, yang akan ditindaklanjuti dengan membangun pemaknaan masyarakat terhadap hakikat yang terkandung di dalamnya. Harapannya, tindakan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, bukan sebatas memenuhi kewajiban; namun lebih dari itu, mereka diharapkan memahami hakikatnya, sehingga manfaat atas amalan-amalan tersebut lebih efektif dalam membangun modal sosial.

#### **4.2.2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Manusia adalah pelaku (*actor*) utama pembangunan, karena merekalah yang menjadi ujung sekaligus pangkal dari pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya, merupakan alasan yang mendasari pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan yang utama adalah manusia, sehingga merekalah yang melaksanakan pembangunan. Akhirnya, tujuan hakiki dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dalam perspektif membangun masyarakat madani di Kota Batu, sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan untuk membentuk insan kamil yang memenuhi kriteria kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Artinya, mereka mampu mewujudkan harmonisasi antara kehidupan agama dengan kehidupan social. Atau dengan kata lain, nilai-nilai luhur ajaran agama senantiasa tercermin dalam hubungan sosial mereka.

Strategi untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dalam hal kualitas di Kota Batu, ditempuh melalui tiga strategi utama (*triple track strategy*) yakni: memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Secara keseluruhan, hasil dari pelaksanaan ketiga strategi tersebut akan tercermin dalam indeks pembangunan manusia, yang sekaligus juga menjadi ukuran relatif kualitas sumber daya manusia di Kota Batu.

#### 4.2.3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdiri pada tiga pilar utama, yakni: Pertama, prinsip partisipasi yang menghendaki terakomodasinya aspirasi para pemangkukepentingan (*stakeholders*) dalam berbagai tahapan pembangunan. Kedua, prinsip transparansi yang mempersyaratkan adanya akses bagi pemangkukepentingan untuk memperoleh segala informasi terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Ketiga, prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, atas setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kota menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, sehingga tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang publik tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kota menyadari bahwa masyarakat adalah subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga mereka lebih memahami permasalahan pembangunan lebih dari siapapun. Menimbang dua hal tersebut, maka Pemerintah Kota mengembangkan berbagai mekanisme untuk menjaring partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, misal: forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Keterbukaan (transparansi) merupakan salah satu alat untuk memastikan (*controlling*) bahwa pembangunan telah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi kontrol tersebut, sekaligus juga berperan sebagai pengingat dini (*early warning tools*) terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pembangunan. Misal, penyediaan *web site* Batu.go.id dan media masa elektronik dan cetak.

Sebagai pihak yang telah mengamanatkan aspirasinya dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batu, maka masyarakat melalui lembaga perwakilan daerah, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada Pemerintah Kota. Transparansi merupakan perangkat untuk memonitor pembangunan, sedangkan akuntabilitas merupakan perangkat untuk mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan pembangunan. Terdapat beragam mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Kota untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik, di antaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lain-lain.

#### 4.2.4 Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang, misal: aktivitas ekonomi dan budaya. Sumber ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni: perilaku manusia (*man made*) dan fenomena alam (*nature disaster*).

Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, dapat diminimalisir ketika interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku, atau dengan kata lain supremasi hukum dapat diwujudkan. Karakter masyarakat, institusi sosial dan figur publik memiliki peran penting bagi upaya untuk mewujudkan perilaku manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pada dasarnya masyarakat Kota Batu memiliki karakter yang agamis, sehingga senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dalam setiap gerak langkah hidupnya. Kondisi ini semakin diperkuat dengan mantapnya fungsi dan peran institusi sosial keagamaan (misal, pondok pesantren), dalam mengarahkan tindakan anggota masyarakat agar selaras dengan ajaran agama. Di samping itu, masyarakat Kota Batu cenderung memiliki tokoh agama yang mereka jadikan figur dalam setiap tindakannya.

Kondisi masyarakat di atas, merupakan faktor pendukung bagi upaya Pemerintah Kota untuk mewujudkan supremasi hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semangat pembangunan partisipatif, mendasari kebijakan Pemerintah Kota untuk melibatkan institusi sosial dan figur publik, agar percepatan pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai.

Sebagai upaya untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh bencana alam, maka Pemerintah Kota Batu merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang merugikan bagi keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah membentuk satuan tugas penanggulangan bencana di setiap kecamatan, yang ditunjang dengan pembentukan tim SAR (*search and rescue*) Kota Batu juga pasukan pemadam kebakaran (damkar) Kota Batu. Disamping itu, penanganan bencana alam juga melibatkan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Batu, Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR).

Pemerintah Kota Batu juga menjalin kerja sama secara aktif dengan jajaran institusi militer dan institusi kepolisian se-Kota Batu, dalam format Bapeltibda, untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat yang mendukung pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Batu.

#### **4.2.5 Mewujudkan Pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan**

Berdasarkan kondisi alamnya, maka kota Batu dijadikan kota sentra wisata bukan tanpa dasar. Jika dicermati lebih mendalam, kota Batu memiliki kekayaan dan potensi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur. Potensi tersebut juga dikembangkan melalui wisata *artificial*, Wisata budaya dan wisata agronomi. Keadaan itulah yang membuat Kota Batu banyak diminati oleh wisatawan baik wisatawan domestic maupun wisatawan manca Negara. Namun demikian kekayaan dan potensi alam tersebut belum digarap secara maksimal sehingga perlu mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak.

Pengembangan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktifitas pariwisata.

Selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk dapat melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Batu,

sehingga aktifitas ekonomi meningkat yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan masyarakat dan terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai potensi pariwisata yang berbasis pada alam, obyek wisata buatan serta dengan dukungan sarana penunjang seperti hotel dan restoran, maka kota Batu dapat menjadi pusat pariwisata di Jawa Timur. Perpaduan antara sektor pertanian, agroindustri, budaya masyarakat akan lebih mengokohkan Kota Batu sebagai tujuan utama wisata di Jawa Timur melalui program *agrotourism* maupun *ecotourism*. Sehingga wisatawan yang datang tidak hanya wisatawan dalam negeri akan tetapi mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pariwisata yang berdaya saing tinggi, maka didukung sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura yang mempunyai spesifikasi tersendiri dan tidak dimiliki daerah lainnya. Didukung tanahnya yang subur, udara bersih, sejuk dan panorama yang indah semakin memperkuat daya tarik untuk mengembang sektor pertanian, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Selain di sektor sekunder dan tersier, sebagian besar penduduk Kota Batu mengandalkan aktivitas ekonomi sektor primer sebagai sumber mata pencaharian, terutama sub sektor pertanian pangan, peternakan dan perikanan. Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Bidang pertanian selama ini masih mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effects* yang besar, karena sekitar 40 % masyarakat Kota Batu menggantungkan hidupnya di sektor ini. Selain itu, mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian diupayakan sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titi pusat, sebagai penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, begitu pula sektor ini masih menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi menjadi berkelanjutan. Peningkatan usaha pertanian harus didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk menjadikan pertanian Kota batu menjadi salah satu pusat pertanian Jawa Timur terutama untuk pengembangan komoditi hortikultura. Selain itu, perlu dilakukan pengetatan kebijakan untuk menahan laju konversi lahan pertanian yang terus mengancam seiring dengan peningkatan kebutuhan lahan pemukiman dan peningkatan sektor industri dan jasa yang tentunya membutuhkan lahan untuk perkantoran dan tempat produksi.

Secara umum kontribusi sektor pertanian Kota Batu dalam Produk Domestik Regional Bruto tidaklah sebesar sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Namun besarnya tenaga kerja yang ditampung oleh sektor ini berfungsi strategis dan besarnya sumberdaya dapat dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan. Keuntungan tersebut yang harus digali untuk meningkatkan peran sektor pertanian pada pendapatan regional namun di sisi lain kepentingan petani sebagai produsen juga diperhatikan. Di bidang pertanian, penurunan produksi pada tahun-tahun lalu antara lain disebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas yang antara lain disebabkan pergantian pola musim, masalah pupuk, masalah menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, rendahnya akses ke sumber daya produktif, belum optimalnya sistem penyuluan, sistem irigasi mengalami penurunan (kuantitas dan kualitas), serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali.

Potensi Peternakan di Kota Batu cukup besar yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya produksi budidaya sapi perah dan sapi potong, kambing, Kelinci dan ayam ras potong maupun petelur. Namun demikian konsumsi protein hewani asal ternak masih perlu dipacu agar lebih meningkat.

Di bidang kehutanan, Kota Batu memiliki sumberdaya hutan seluas 11.227 Ha atau meliputi hampir kurang lebih 56,4% dari luas wilayah Kota Batu dengan potensi yang memadai, namun demikian keberadaan kawasan hutan tersebut belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kondisi sumberdaya hutan tersebut secara umum telah dan sedang mengalami proses degradasi fungsi secara serius baik disebabkan oleh penjarahan, perambahan, maupun kebakaran, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Pada tahun 2009, perekonomian Kota Batu menunjukkan proses pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Seluruh sektor kegiatan memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2009 yang tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 6,74 persen, yang berarti sedikit lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski pertumbuhan pada 2009 cukup tinggi, namun ditinjau dari struktur produksi sektoral, pertumbuhan yang terjadi kurang mencerminkan fondasi yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama mengingat masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir terbesar.

Kota Batu adalah salah satu daerah yang kurang cocok untuk dijadikan daerah kawasan industri karena kondisi geografis yang kurang mendukung. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur, keberadaan kawasan industri akan mengganggu kelestarian lingkungan Kota Batu. Namun bukan berarti industri besar/ sedang, kecil dan kerajinan rumah tangga tidak diberdayakan, karena kontribusinya yang cukup signifikan dalam membentuk PDRB Kota Batu.

Pada Tahun 2009 profil industri di Batu cenderung masih didominasi oleh industri kecil. Dominasi tersebut dapat dilihat dari persentase jumlah industri kecil yang mencapai lebih dari 95 persen. Perusahaan industri besar/ sedang di Kota Batu yang pada tahun 2009 mampu menyerap 519 tenaga kerja disektor industri pengolahan.

Jenis industri yang didirikan akan berpengaruh erat terhadap besarnya nilai investasi yang ditanam. Total investasi di sektor industri pengolahan yang di tanam di Kota Batu pada tahun 2009 mencapai 9,02 milyar. Kelompok industri non formal menduduki urutan pertama dalam penanaman investasi yaitu sebesar 9,01 milyar.

Terlepas dari masih rendahnya angka pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Batu, kecenderungan laju pertumbuhan yang terus meningkat sejak 2001 sebenarnya memberi momentum yang baik bagi proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa momentum yang dapat menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan yang terus menerus ini. Pertama, sebagai daerah otonom baru, Kota Baru banyak menarik investor menanamkan modal karena dianggap mempunyai nilai strategis. Kedua, sebagai Kota *Agro Wisata* dan *Agro Politan*, Kota Batu cukup menarik wisatawan terutama wisatawan domestik mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada.. Momentum pertumbuhan ini juga didukung oleh *multiplier effect* yang ditimbulkan sektor pariwisata dalam menggerakkan roda perekonomian.

Peran ekonomi rakyat di sektor perdagangan Kota Batu, ditunjukkan secara nyata oleh kontribusi pedagang kaki lima (PKL) dalam memberikan sumber penghasilan dan

menyerap tenaga kerja. Jumlah PKL yang meningkat di antaranya mengindikasikan bahwa PKL merupakan profesi alternatif yang cukup menarik untuk berusaha. Sebagian besar PKL tersebut berlokasi di kawasan-kawasan perniagaan dan pusat-pusat keramaian publik yang tersebar di Kota Batu. Oleh karena itu Pemerintah Kota berupaya untuk menata lokasi usaha PKL, agar tidak mengganggu ketertiban umum sekaligus mampu meningkatkan pendapatan PKL.

Industri Rumah Tangga atau IRT dan PKL, merupakan salah satu bentuk ekonomi rakyat yang bergerak di sektor non formal. Dari sisi penyediaan lapangan kerja, sektor non formal di Kota Batu mampu menyerap tenaga kerja ketika sektor formal mengalami kelesuan usaha akibat krisis ekonomi. Namun demikian sektor non formal belum dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usahanya secara optimal.

Oleh karena itu dalam 20 tahun ke depan, rumusan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batu akan difokuskan pada pemberdayaan sektor non formal secara komprehensif, untuk meningkatkan kinerja para pelaku usahanya, meliputi: pengelolaan bahan baku, produksi, permodalan, pemasaran sampai persaingan usaha. Pemberdayaan ini juga melibatkan peran aktif para pemangku-kepentingan untuk menyatukan gerak dan langkah, melalui mekanisme kemitraan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat di Kota Batu.

Aktivitas manusia, terutama aktivitas produktif di bidang ekonomi, turut mempengaruhi kualitas lingkungan. Perilaku manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, akan menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) akan terancam, karena daya dukung lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas manusia. Ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan akan berpotensi menurunkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri.

Pengembangan sektor ekonomi unggulan Kota Batu diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dari sudut pandang kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi akan dikatakan berkualitas apabila pencapaiannya tidak menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek bagi generasi sekarang berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Beragam permasalahan lingkungan (misal: pencemaran udara, air dan tanah), mendorong Pemerintah Kota Batu untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, yang terutama ditujukan bagi pengendalian produksi sampah, dengan prinsip: *re-use*, *re-duce* dan *re-cycle*. Pada intinya, pelaksanaan prinsip-prinsip ini mengajak kepada segenap pelaku usaha untuk menghemat penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarukan, sekaligus untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan dari aktivitas produktif.

Selain melalui kampanye tersebut, Pemerintah Kota Batu juga berupaya untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain:

- a. Mengatur penggunaan ruang secara proporsional untuk aktivitas konservasi dan budidaya;

- b. Mengubah lahan kritis, terutama di bagian utara wilayah Kota Batu, menjadi kawasan konservasi sumber daya alam dan kawasan budidaya;
- c. Memelihara dan mengembangkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai ruang publik sekaligus resapan air hujan.

### 4.3 Strategi

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan Kota Batu tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui strategi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur yang dilandasi dan didukung oleh tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perwujudan keamanan dan ketertiban yakni: (a) stabilitas politik; (b) supremasi hukum; dan (c) partisipasi sosial.

Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi lokal di semua lokasi produksi domestik masyarakat Kota Batu, sehingga mampu menghasilkan produksi lokal dan nilai tambah bruto. Upaya pemerataan ini lebih ditekankan pada pemerataan penguasaan faktor-faktor produksi oleh semua pelaku ekonomi di semua lapisan masyarakat Kota Batu untuk menghasilkan nilai tambah bruto. Sedangkan strategi pertumbuhan yang berkualitas diupayakan melalui penciptaan basis fundamental pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis perdagangan, industri, dan jasa dengan cara mendorong pergeseran industri dari berbasis pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke arah industri yang didorong oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub-sistemnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

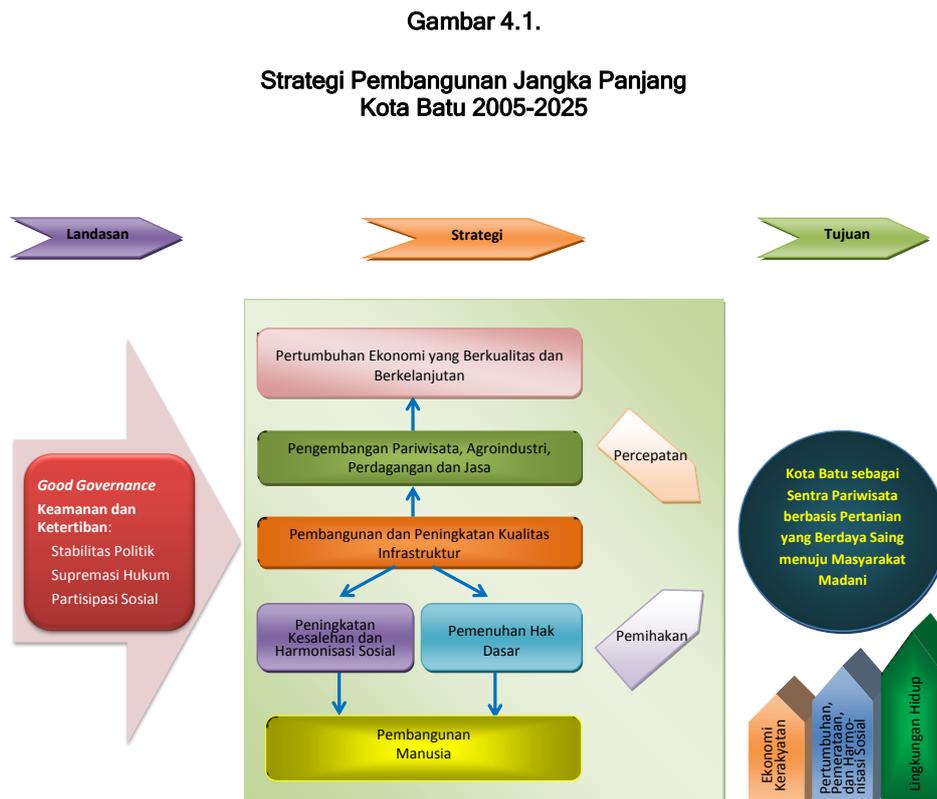
Pembangunan manusia diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya yang dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kota Batu yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan memberikan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran

Dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan, serta pemenuhan hak-hak sosial dasar masyarakat akan dapat dipenuhi secara lebih adil dan merata dalam hal hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada ekonomi kerakyatan, partisipasi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup, serta menempatkan individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Untuk mewujudkan keduanya dilakukan upaya untuk mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi, dengan membangun sarana dan prasarana strategis untuk mendorong pengembangan pusat-pusat produksi (industri), distribusi (perdagangan), dan jasa (*services*) yang didukung oleh dominasi investasi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi melalui *multiplier effects* yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan landasan yang kokoh berupa tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung

profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM.

Pola tatanan dan urutan tentang hal tersebut secara garis besar diperlihatkan dalam bentuk strategi pembangunan jangka panjang Kota Batu 2005-2025 pada Gambar 4.1. sebagai berikut:



Bedasarkan analisis SWOT pada Bab III, diketahui bahwa Kota Batu memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kota Batu juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan.

Untuk mengatasi hal itu, disusun strategi pembangunan daerah Kota Batu berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama. *Pertama* adalah strategi S - O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. *Kedua* adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. *Ketiga* adalah strategi S - T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. *Keempat*, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap hal itu terlihat di dalam Gambar 3.2.

Gambar 4.2:

Strategi Pembangunan Daerah Berdasar SWOT

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<b>Strategi S-O</b> 1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian; 2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Peningkatan Investasi; 4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif ( <i>good Governance</i> ); 5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal; 6. Pengasutamaan Jender dan Perlindungan Anak	<b>Strategi W-O</b> 1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster; 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak; 3. Peningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan; 4. Pengembangan Infrastruktur dan tata ruang; 5. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 7. Pengembangan pendidikan berbasis moral dan keagamaan; 8. Peningkatan kesadaran hukum.
Tantangan (T)	<b>Strategi S-T</b> 1. Bertani Selaras Lingkungan; 2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat; 3. Mengembangkan Jejaring antar daerah, pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi;	<b>Strategi W-T</b> 1. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian; 2. Regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah; 3. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi 4. Rehabilitasi Lahan dan Hutan; 5. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Keterangan:

- S - O : Menggunakan kekuatan (*S=strength*) untuk meraih peluang (*O=opportunity*)
- W - O : Menekan kelemahan (*W=weakness*) untuk meraih peluang
- S - T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (*T=threat*)
- W - T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan.

Sebagaimana terlihat dari visi misi tujuan pokok dari pembangunan di Kota Batu adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Tidak hanya sejahtera, melainkan juga mandiri dan berakhlak. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan semacam itu, digunakan tiga strategi pokok yaitu strategi *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. *Pro job* berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Pro job* berarti pembangunan

diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. *Pro poor* berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. Ketiga strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini kita kenal, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Melalui ketiga strategi itu, diharapkan bisa tercipta adanya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang relatif tinggi secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu diusahakan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau sektor, melainkan oleh banyak orang. Karena itu, selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga mendukung adanya alokasi dan distribusi sumber-sumber ke berbagai sektor dan wilayah.

Sebagaimana terlihat di dalam Gambar 4.2, terdapat empat kelompok strategi pembangunan daerah Kota Batu berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

Pertama adalah strategi S - O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup:

1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian;
2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Peningkatan Investasi;
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (*good Governance*);
5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal;
6. Pengasutamaan Jender dan Perlindungan Anak.

Kedua adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup:

1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak;
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan;
4. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;
6. Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang;
7. Pengembangan Pendidikan Berbasis Moral dan Keagamaan;
8. Peningkatan Kesadaran Hukum

Ketiga adalah strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Bertani Selaras Lingkungan;
2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat;
3. Mengembangkan Jejaring antar daerah pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi;

Keempat, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Strategi ini mencakup:

1. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian;
2. Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah;
3. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi;
4. Rehabilitasi Lahan dan Hutan;
5. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal;

Keempat strategi utama itu dimaksudkan untuk mencapai adanya masyarakat Kota Batu yang mandiri, sejahtera dan adil. Di dalam mewujudkan masyarakat demikian, peran Pemerintah Daerah Kota Batu pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (*to serve*), melakukan pengaturan (*to regulate*) dan memberdayakan (*empowering*).

Adapun langkah-langkah utamanya dibagi ke dalam tiga tahapan pokok. Pertama adalah tahap konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal berkaitan dengan upaya untuk mengkonsolidasikan pola pikir dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan kebijakan dan regulasi, konsolidasi program, dan adanya komitmen banyak pihak (*stakeholders*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di luar pemerintahan, baik kekuatan masyarakat sipil maupun pasar. Kedua adalah tahap peningkatan kesejahteraan. Tahap ini dilakukan melalui penerapan tiga strategi pokok di dalam pembangunan, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Melalui tiga strategi pokok ini, adanya pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan akan lebih mudah diraih. Tahap terakhir adalah adanya peningkatan kemandirian masyarakat Kota Batu dalam berbagai dimensi, mulai dari segi ekonomi sampai budaya. Tahap yang terakhir ini memungkinkan terbukanya pintu lebih lebar bagi terwujudnya masyarakat Kota Batu yang sejahtera dan adil.

Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK) di dalam pembangunan Daerah Kota Batu didasarkan pada analisis SWOT sebagaimana dikemukakan di atas dan dikaitkan dengan visi dan misi Walikota. Berdasarkan analisis SWOT dan visi misi itu, beberapa faktor yang terkatagori sebagai FPK adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Sektor Pertanian dan Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Sektor Pertanian;
2. Pengembangan Sektor Pariwisata;
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak dan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan.
4. Tersedianya Infrastruktur, baik infrastruktur fisik, seperti jalan, bendungan dan saluran irigasi; sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, serta pendidikan dan kesehatan; pasar; maupun infraatruktur non-fisik seperti adanya regulasi yang melindungi masyarakat; mendorong iklim investasi;
5. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.

## BAB V

### SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Uraian visi pembangunan Kota Batu 2005-2025, menunjukkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai melalui pembangunan Kota Batu adalah Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani. Sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi akhir tersebut, maka dirumuskan serangkaian misi yaitu: mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan pengembangan Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan dalam jangka 20 tahun ke depan sesuai rumusan misi dalam rangka mewujudkan visi, maka perlu ditunjang penetapan sasaran, arah kebijakan serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota Batu tahun 2005-2025.

#### **5.1 Sasaran dan Arah Pembangunan Kota Batu**

Sasaran pembangunan Kota Batu 2005-2025, diformulasikan dari serangkaian misi yang mengarah pada pencapaian kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun perencanaan. Rumusan sasaran pembangunan diupayakan terukur agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian misi-misi. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengukuran pencapaian masing-masing misi, maka penulisan rumusan sasaran dikelompokkan berdasarkan misi.

Guna menjaga agar pelaksanaan pembangunan jangka panjang tetap mengarah pada pencapaian sasaran, maka perlu disusun rumusan kebijakan yang berfungsi sebagai pengarah (*guidance*). Kebijakan merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Batu dalam rencana pembangunan jangka panjang, yang akan dinyatakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif. Mengingat antara sasaran dan arah pembangunan memiliki kesalingterkaitan, maka arah pembangunan juga disusun berdasarkan misi pembangunan.

Namun demikian; patut disadari bahwa setiap pencapaian suatu misi memiliki kesalingterkaitan dengan misi yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan pencapaian suatu sasaran dapat menunjang pencapaian lebih dari satu misi. Artinya, pembagian sasaran dan arah kebijakan per misi pembangunan bukanlah hal yang bersifat linier yang kaku (*rigid*) dan tekstual, namun lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Berikut ini rincian sasaran yang disusun per misi-misi pembangunan Kota Batu.

##### **5.1.1. Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal**

Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, diperlukan untuk memupuk modal sosial guna menunjang percepatan pencapaian masyarakat madani di Kota Batu. Karakteristik masyarakat Kota Batu yang cenderung religius diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Kondisi

tersebut akan menunjang pencapaian misi peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang diukur melalui serangkaian sasaran-sasaran pembangunan berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan; serta
3. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Agar pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat meningkat, maka disusun arah pembangunan bidang keagamaan sebagai berikut:

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial;
2. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antarumat beragama;
3. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;
4. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umat beragama pada proses pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; serta
6. Meningkatkan peranan dan fungsi tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.

Selain terbentuk dari pengamalan nilai-nilai keagamaan, modal sosial juga dibentuk dari pengamalan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya setempat. Terwujudnya masyarakat yang memiliki jati diri dan berketahanan budaya diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan terutama untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pariwisata.

Pembangunan kebudayaan di Kota Batu ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengahnya semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pengembangan seni dan budaya di Kota Batu diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan. Pada tahun-tahun lalu telah dilakukan berbagai macam kegiatan untuk melestarikan dan mengaktualisasikan adat budaya daerah sebagai upaya mengelola kekayaan dan keragaman budaya serta mempromosikan, menjalin kemitraan dan mengembangkan destinasi pariwisata di Kota Batu.

Efektivitas pembangunan budaya daerah guna meningkatkan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Kota Batu, dapat dievaluasi melalui serangkaian sasaran berikut:

1. Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat;
2. Terbentuknya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional; serta
3. Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur.

Untuk menunjang percepatan pencapaian sasaran-sasaran di atas, maka disusun arah kebijakan pembangunan budaya Kota Batu sebagai berikut:

1. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kota Batu;
2. Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu;
3. Pemantapan serta penguatan identitas dan jati diri masyarakat Kota Batu;
4. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang sesuai dengan ajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat;
5. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas masyarakat Kota Batu; serta
6. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional.
7. Membentuk karakter kelompok masyarakat yang sadar wisata.

#### **5.1.2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Terwujudnya masyarakat Kota Batu yang sehat, berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur yang mendasarkan setiap tindakan kepada norma dan nilai luhur agama dan budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya. Tanpa disertai dengan SDM yang mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, pembangunan tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek keberlanjutan.

Efektivitas modal sosial dalam mempercepat pencapaian masyarakat madani Kota Batu, tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan manusia yang saling terkait satu sama lain dalam suatu pola hubungan yang kompleks, meliputi: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan anak, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketahanan pangan dan kependudukan.

Pembangunan pendidikan baik formal maupun nonformal diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian nasional, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas;
2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan; serta
4. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menunjang pencapaian sasaran-sasaran pembangunan bidang pendidikan di atas, maka dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat;
2. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;
3. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata;
4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dengan standar yang memadai disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan;
6. Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya;
7. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
8. Pemenuhan tuntutan anggaran minimal dan biaya minimal pendidikan sesuai dengan UUD 1945; serta
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan bidang kesehatan di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu serta dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas;
3. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu;
4. Menurunnya jumlah penyakit menular yang diderita masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; serta
6. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dalam rangka meminimalkan ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok penduduk;

2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medis;
3. Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;
4. Membantu dan memberikan peluang bagi berdiri dan berkembangnya RSU swasta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; serta
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin.

Pembangunan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja sektor pertanian, perdagangan dan sektor informal lainnya memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja;
3. Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Kota Batu untuk pasar tenaga kerja di dalam maupun luar Kota Batu;
2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa;
3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal; serta
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM Kota Batu diselenggarakan untuk memberikan dukungan nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat Kota Batu yang memiliki semangat dan daya juang tinggi. Untuk itu pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif;
2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan; serta
4. Meningkatnya minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada olahraga sebagai budaya maupun olahraga sebagai prestasi.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kepemudaan agar menjadi modal manusia (*human capital*) yang memiliki karakter dan daya saing;
2. Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan dan bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aktivitas keolahragaan yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olahraga prestasi; serta
4. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat serta memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan diri.

Stigma bahwa perempuan makhluk lemah, porsi perempuan di rumah, perempuan merupakan obyek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik; menjadi fakta yang melatarbelakangi pengarusutamaan kesetaraan gender dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan dan anak) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender. Untuk itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Batu, diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. Menguatnya kelembagaan dan pangarusutamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan;
3. Meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
4. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik;
5. Meningkatkan pelayanan dan penanganan sosial pada korban *trafficking* pada anak dan perempuan; serta
6. Menurunnya jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan;
2. Peningkatan jaminan keadilan gender dalam berbagai kebijakan publik dan program pembangunan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan di berbagai bidang pembangunan;
3. Memperluas akses kaum perempuan ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha; serta
4. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan keluarga sejahtera. Sebagai seorang ibu, keberdayaan perempuan akan diekspresikan untuk membentuk keluarga sejahtera. Terbentuknya keluarga sejahtera akan memungkinkan bagi seorang ibu untuk mengembangkan keluarga sebagai media pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu pembangunan keluarga berencana diarahkan

pada pembentukan keluarga sejahtera, yang pencapaiannya dapat dievaluasi melalui pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak;
2. Meningkatnya kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, merata dan bermutu; serta
3. Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menata ulang peran keluarga sejahtera sebagai media pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak; serta
2. Meningkatkan peran keluarga berencana (KB) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya diarahkan untuk menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk alami maupun arus migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan. Oleh karena itu pembangunan kependudukan di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi;
2. Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta
3. Meningkatnya kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk antar wilayah;
2. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah; serta
3. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mampu menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Batu, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk itu pembangunan sosial di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya aktivitas berbasis komunitas untuk mengatasi masalah kesejahteraan;
3. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial;
4. Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Batu;
5. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan;
6. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran; serta
7. Meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial;

Untuk mendukung semua hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat;
2. Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Penanggulangan Kemiskinan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga;
5. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak rawan sosial;
6. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial;
7. Mengembangkan sekaligus menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
8. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya; serta
9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Masalah kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan bahan pangan. Oleh karena itu pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau;
2. Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal;

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem ketahanan pangan sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan;
2. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya; serta
3. Meningkatkan pemerataan ketersediaan pangan secara terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

### **5.1.3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Upaya untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja dan profesionalitas. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

*Good governance* hanya akan terbentuk apabila prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi. Dalam upaya untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut, maka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan;
3. Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan;
5. Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah;
7. Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat;
8. Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan sampai pemberhentian pegawai;
9. Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan;
10. Terciptanya aparatur pengawasan yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi;
11. Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah;

12. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal; serta
13. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.

Guna mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui penetapan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;
3. Peningkatan harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pemerintahan;
5. Memperbaiki penyusunan indikator kinerja dan penetapan target kinerja yang mengarah pada obyektifitas dan keterukuran;
6. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
7. Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi serta kesejahteraan aparatur;
8. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan;
9. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;
10. Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur tetap dalam mendukung profesionalisme kerja dan memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja;
11. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia dalam melayani masyarakat; serta
12. Memberdayakan birokrasi untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

#### **5.1.4. Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tertib sosial berlandaskan hukum. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah faktor utama dan berperan penting dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Batu. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum yang kuat dan independen.

Upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Batu, lebih diarahkan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan pada sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
3. Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik;
4. Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan;
5. Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasif, dan preventif;
6. Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram dan damai; serta
7. Meningkatnya kemampuan mengelola risiko ancaman bencana alam.

Untuk itu disusun arah kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai berikut:

1. Menumbuhkan masyarakat yang tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) dalam menganggulangi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban;
2. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;
3. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Perwujudan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ditunjang dengan pembentukan budaya hukum di daerah;
6. Menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan;
7. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum;
8. Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum; serta
9. Pembaharuan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan dinamika kehidupan, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan kesadaran hukum.

#### **5.1.5. Mewujudkan Pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan**

Potensi pariwisata di Kota Batu cukup menjanjikan, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal, proporsional dan profesional, serta belum sepenuhnya ditempatkan sebagai kegiatan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang saat ini dimiliki oleh Kota Batu antara lain: wisata alam, wisata budaya/pendidikan, wisata olahraga dan wisata belanja. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan para pelaku pariwisata telah memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Kota Batu. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 836.091 sedangkan tahun 2008 sebanyak 1.180.042 wisatawan dan pada tahun 2009 tercatat meningkat menjadi tidak kurang dari 1.914.530 wisatawan atau meningkat sebesar 62,24%.

Potensi pariwisata Kota Batu berupa alam, adat istiadat, seni dan budaya perlu dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan kepariwisataan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai setempat. Ekowisata dan desa wisata lebih ditekankan/menjadi prioritas sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Disamping itu harus didukung sumber daya manusia, fasilitas pariwisata yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana wisata belanja untuk menampung produk khas Kota Batu termasuk industri kecil/kerajinan. yang akan dikembangkan adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Wisata alam dan wisata budaya menunjukkan keunggulan atau kekhasan Kota Batu. Sedangkan untuk wisata belanja dalam perkembangannya harus diarahkan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk khas Kota Batu seperti kerajinan dan sebagainya.

Pengembangan Pariwisata, diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya. Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi pangan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani (NTP), meningkatnya indeks daya beli masyarakat dan menurunnya angka pengangguran serta kemiskinan.

Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kota Batu secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi Kota Batu tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pariwisata, pertanian, kehutanan, agroindustri/agrobisnis, perdagangan beserta sektor-sektor lainnya yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah, penataan ruang dan kelestarian lingkungan.

Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah meliputi: peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian, pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas, berdaya saing, berbasis agrobisnis, serta Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier. Sedangkan penguatan struktur industri, diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai *leading sector* dalam perekonomian lokal maupun regional. Oleh karena itu, upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan mencakup: penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata rantai industri hulu dan hilir, pengembangan klaster agroindustri berbasis kekayaan alam daerah, pengembangan dan penguasaan daya saing produk-produk inovatif agroindustri berbahan baku lokal, serta penguatan kemitraan usaha-usaha ekonomi lokal dengan usaha agroindustri.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan meningkatkan produksi pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur dan industri pendukungnya. Revitalisasi pertanian tersebut juga didukung oleh peningkatan konservasi dalam rangka penyediaan air baku bagi kegiatan Agrobisnis.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata, dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal dan agrowisata.
2. Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha;
3. Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain;
4. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Batu, terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru;
5. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah;
6. Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan: regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal;
7. Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi;
8. Terpenuhinya sarana prasarana (infrastruktur) pendukung investasi;
9. Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau; serta
10. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.
11. Pengembangan pelbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah dan murah.

Untuk mencapai kondisi ini, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Pemantapan *city branding* untuk mengantarkan terwujudnya sentra pariwisata yang didukung oleh pengembangan agropolitan modern;
2. Revitalisasi pertanian, termasuk peternakan dan perikanan, yang mengarahkan pada kondisi pertanian yang maju dan modern.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan;
4. Peningkatan, pemantapan, penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian dan perdesaan;
5. Optimalisasi, pemanfaatan dan keberlanjutan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan;
6. Optimalisasi, pemanfaatan dan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.

7. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis pertanian yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional;
8. Pengembangan pariwisata, pertanian, industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
9. Memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usahawan besar, menengah, dan kecil;
10. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;
11. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
12. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi lokal dan dalam negeri;
13. Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor;
14. Menyehatkan badan usaha milik daerah yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum;
15. Penciptaan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya hubungan bisnis dan kemitraan antara kelompok swadaya, asosiasi, pedagang, investor dan para penyedia jasa;
16. Pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan serta memperhatikan prinsip *re-use*, *re-duce* dan *re-cycle* dalam setiap aktivitas produktifnya;
17. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang; demi tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi; serta
18. Pengembangan Energi diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi serta diversifikasi atas energi-energi utama dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Kota Batu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.

Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi lokal serta perumusan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi.

Pengembangan industri yang bersifat padat karya dan berbasis sumber daya lokal dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batu.

Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin usaha, peningkatan investasi di bidang agroindustri/agrobisnis, pengembangan dan penataan kawasan agropolitan, dan pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Adapun pengembangan sektor primer Kota Batu (sektor pertanian dalam arti luas), diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar;
2. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen;
3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer (pertanian, kehutanan, dan sumber daya mineral);
4. Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian dalam arti luas dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya; serta
6. Energi dan sumber energi alternatif

Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, serta sarana dan prasarana pemukiman; diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur;
2. Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah;
3. Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi dan non ekonomi;
4. Terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah;

5. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar pendukungnya yang layak, sehat dan murah;
6. Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah;
7. Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif serta dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang pertanahan secara efektif.

Untuk itu, disusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

1. Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi dan non ekonomi;
2. Pengembangan sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya;
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan peningkatan kinerja pengelola air minum;
4. Pembangunan prasarana sumber daya air melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan, pengkonsumsian air; dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) untuk meningkatkan keandalan pasokan air;
5. Peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana dasar (air bersih, persampahan, drainase dan lain-lain) bagi kawasan pemukiman sehat;
6. Peningkatan penanganan persampahan dan drainase pada permukiman;
7. Peningkatan pemberian ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan;
8. Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat Kota Batu berbasis informasi (*knowledge-based society*);
9. Peningkatan peran masyarakat secara aktif di dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah;
10. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh;
11. Peningkatan perencanaan dan pengendalian sistem prasarana dan sarana wilayah yang terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis atas aspirasi kebutuhan masyarakat; serta
12. Peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang bagi pembangunan wilayah yang terpadu, dan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya hutan, sumber daya air dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Guna menunjang pencapaian kondisi tersebut, maka pembangunan lingkungan hidup di Kota Batu diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;
4. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah; serta
5. Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu disusun arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam khususnya sumber daya hutan;
3. Pengembangan dan peningkatan akses informasi kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Peningkatan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Peningkatan peran tata ruang wilayah untuk mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan; serta
7. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara geografis wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi yang rentan terhadap ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Upaya penanganan bencana ke depan lebih diarahkan kepada pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengurangan risiko bencana diarahkan kepada pencegahan lebih dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan risiko bencana harus masuk dalam setiap proses tahapan pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang yang berbasis kebencanaan, sistem informasi kebencanaan dan kerentanan terhadap iklim, sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana, merupakan hal-hal yang mendapat perhatian khusus.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R (*re-*

*cycle*/daur ulang, *re-duce*/pengurangan, *re-use*/pemakaian ulang). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktur dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabeling, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif.

Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, penataan daerah risiko tinggi bencana (erosi dan tanah longsor), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, dan air tanah. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

## 5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Batu

Dalam upaya mewujudkan Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani, Pemerintah Kota dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pentahapan dan prioritas masalah-masalah mendesak yang akan diselesaikan pada setiap tahapannya. Dalam jenjang perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Batu ini, tahapan dan prioritas pembangunan terbagi ke dalam 4 periode perencanaan jangka menengah 5 tahunan.

Pembagian rencana pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah, harus tetap mengarah pada pencapaian visi Kota Batu 2005-2025, yakni: Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani. Artinya, substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025, harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu selama kurun waktu duapuluh tahun ke depan.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Batu dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM=80), diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJM Daerah ke empat yaitu pada tahun 2025.

Patut disadari bahwa pencapaian target kinerja tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kota Batu dengan berbagai tingkatan pemerintahan (Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat); termasuk dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dinyatakan dengan adanya peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Kota Batu. Bentuk komitmen tersebut diimplementasikan ke dalam kerangka anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batu serta dana dari masyarakat/dunia usaha) dan kerangka regulasi.

### 5.2.1 Lima Tahun Pertama (RPJMD 2005-2010)

Penekanan pada lima tahun pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi.

Pada tahap ini, mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian, pariwisata dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan meningkatkan produksi pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur dan industri pendukungnya. Revitalisasi pertanian tersebut juga didukung oleh peningkatan konservasi dalam rangka penyediaan air baku bagi kegiatan Agrobisnis. Target pencapaian pembangunan pada tahun 2010 meliputi:

**Tabel 5.1**  
**Target pencapaian pembangunan pada tahun 2010**

INDIKATOR SASARAN	Satuan	2010
o IPM sebesar	indeks	70.50
o Indeks Pendidikan		80.00
· Angka Partisipasi Kasar (APK)		
a. SD	(%)	122.00
b. SMP	(%)	83.00
c. SMU	(%)	44.50
· Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
a. SD	(%)	99.00
b. SMP	(%)	89.00
c. SMU	(%)	70.00
o Angka Melek Huruf (AMH)	(%)	97.00
o Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.95
o Indeks Kesehatan	indeks	
§ Indeks Harapan Hidup (IHH)	Tahun	70.00
§ Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	(%)	38.96
§ Rasio Balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita	(%)	0.080%
§ Cakupan peserta KB aktif (dari JumI PUS)	(%)	84.00%
§ Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	80.00
o Cakupan Kelurahan UCI	Kelurahan	24
o Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy miskin (Askeskin)	(%)	100
o Jumlah Penduduk	Jiwa	192,000
o Laju Pertumbuhan Penduduk	(%)	1.05
o Jumlah Tempat Ibadah	Unit	612
o Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	(%)	6.50
o Indeks Daya Beli (PPP)	indeks	55.0
o PDRB ADHB	Juta Rp.	2,008,000
o PDRB per kapita ADHB	Rupiah	10,455,000
o Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	(%)	21,0
o Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	45.75
o Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	(%)	14.80
o Prosentase penduduk miskin.	(%)	11.00
o TPAK sebesar	(%)	60.92
o Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	10.17

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antar umat beragama, yang ditunjang dengan upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama; dengan prioritas pada:
    - ✓ Pengembangan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.
    - ✓ Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan social.
  - b. Mewujudkan pembangunan kebudayaan yang ditujukan bagi ketahanan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, dengan prioritas pada:
    - ✓ Identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Kota Batu.
2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran (*Role Sharing*) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kota Batu dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.  
  
Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional juga menjadi prioritas pada periode ini.
  - b. Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini diprioritaskan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan, peningkatan pengamatan yang terus menerus (*surveilans*) penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.
  - c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritas pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.
  - d. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
  - e. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan

pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahaman semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.

- f. Pembangunan bidang kepemudaan di Kota Batu diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang keolahragaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga yang berskala regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di Kota Batu. Selain olahraga prestasi, pengembangan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat menjadi prioritas pada RPJM Daerah tahap pertama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah dengan membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara bertahap.
  - g. Pembangunan bidang keluarga berencana dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau, untuk mengendalikan angka kelahiran bayi.
  - h. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
  - i. Pembangunan ketahanan pangan diprioritaskan pada tercukupinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu dan harga yang terjangkau.
  - j. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diprioritaskan pada perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi; penataan sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kota Batu.
3. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan, yakni sebagai berikut:
- Pembangunan bidang aparatur diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai, penguatan unit-unit pelayanan publik, pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.
4. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan, yakni sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang politik diprioritaskan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif;
  - b. Dalam bidang hukum diprioritaskan pada upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah;

- c. Pembangunan bidang keamanan lingkungan diprioritaskan pada upaya mewujudkan rasa tenteram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial dan bencana, menurunnya angka pelanggaran peraturan.
5. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan industri di Kota Batu diprioritaskan pada revitalisasi peran industri kecil-menengah dalam perekonomian daerah, penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil-menengah sebagai pendukung industri besar;
  - b. Peningkatan sistem perdagangan melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok;
  - c. Pengembangan pertanian dan peternakan melalui penguatan sumber daya manusia, penguatan usaha dan penguatan kondisi lingkungan;
  - d. Pembangunan perikanan diarahkan pada pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/pengrajin ikan tradisional serta pelestarian lingkungan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;
  - e. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya;
  - f. Penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Kota Batu. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Kota Batu sebagai daerah tujuan investasi yang prospektif;
  - g. Pengembangan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi: jalan tembus/lingkar dan arteri, angkutan umum, jaringan air baku, jaringan air bersih dan sanitasi serta permukiman.
  - h. Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pencapaian kawasan lindung yang proporsional dengan kawasan budidaya.
  - i. Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Kota Batu, dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah, berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan

lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya upaya mitigasi bencana.

## 5.2.2 Lima Tahun Kedua (RPJMD 2011-2015)

Pada tahap kedua ini, pengembangan Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian diarahkan pada sentra-sentra lokasi obyek wisata serta produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di samping perluasan pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan pembangunan berbagai obyek wisata, pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan pariwisata dan agrobisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran pariwisata dan agrobisnis dalam perekonomian. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih dominan ke pengembangan sub sektor pariwisata dan agrobisnis yang merupakan keunggulan daerah.

Penekanan pada lima tahun kedua adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM, yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Target pencapaian pembangunan pada tahun 2015 meliputi:

**Tabel 5.2**  
**Target pencapaian pembangunan pada tahun 2015**

INDIKATOR SASARAN	Satuan	2015
o IPM sebesar	indeks	73.50
o Indeks Pendidikan		84.70
· Angka Partisipasi Kasar (APK)		
a. SD	(%)	120.00
b. SMP	(%)	85.00
c. SMU	(%)	50.00
· Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
a. SD	(%)	100.00
b. SMP	(%)	92.00
c. SMU	(%)	75.00
o Angka Melek Huruf (AMH)	(%)	98.00
o Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.00
o Indeks Kesehatan	indeks	
§ Indeks Harapan Hidup (IHH)	Tahun	72.00
§ Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	(%)	34.04
§ Rasio Balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita	(%)	0.060%
§ Cakupan peserta KB aktif (dari Juml PUS)	(%)	88.00%
§ Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	85.00
o Cakupan Kelurahan UCI	Kelurahan	24
o Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy miskin (Askeskin)	(%)	100
o Jumlah Penduduk	Jiwa	210,000

o Laju Pertumbuhan Penduduk	(%)	1.03
o Jumlah Tempat Ibadah	Unit	620
o Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	(%)	6.80
o Indeks Daya Beli (PPP)	indeks	65.0
o PDRB ADHB	Juta Rp.	2,790,000
o PDRB per kapita ADHB	Rupiah	13,286,000
o Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	(%)	20.05
o Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	47.50
o Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	(%)	15.50
o Prosentase penduduk miskin.	(%)	9.75
o TPAK sebesar	(%)	62.71
o Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	6.52

Pada akhir periode kedua ini, IPM diproyeksikan mencapai 73.50; yang akan dicapai pada tahun 2015. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, maka dilakukan upaya-upaya berikut:
    - ✓ Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
    - ✓ Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
  - b. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu. Upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.
2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); melalui upaya Kota Batu Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS), dengan cara menekankan penuntasan penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Pada kurun waktu ini dilakukan akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu; guna mewujudkan *education for all* (pendidikan untuk semua).

Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Selain itu pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal.

Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi lokasi-lokasi yang mempunyai keunggulan pariwisata dan agroindustri/agrobisnis.

Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal.

- b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.
- c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
- d. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- e. Pembangunan bidang keolahragaan diprioritaskan pada persiapan pembangunan gelanggang olahraga Kota Batu, yang akan dikembangkan sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala regional maupun nasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Kota Batu.

Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

Adapun pembangunan bidang kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas kepemudaan baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.

- f. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja.

- g. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - h. Pembangunan ketahanan pangan diprioritaskan pada kemandirian ketersediaan bahan pangan yang murah dan merata. Serta didukung upaya rintisan bagi pengembangan bahan pangan alternative berbasis potensi sumber daya pertanian lokal.
  - i. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, melalui: penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah.
3. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan prinsip transparansi; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel di seluruh SKPD Kota Batu.
- b. Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS).
4. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif;
  - b. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, melalui: perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu penataan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.
  - c. Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat,

pengecahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.

5. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:

- a. Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.
- b. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar daerah, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Kota Batu.
- c. Pembangunan pertanian pada tahap RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian.
- d. Prioritas pengembangan perikanan Kota Batu pada tahap kedua ini diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Utara Jawa, pengembangan usaha sarana produksi, perikanan budidaya, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.
- e. Pembangunan KUMKM dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.

- f. Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
- g. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah strategis pada tahap ini, ditandai dengan peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, melalui penyelesaian pembangunan jalan di wilayah utara (jalan lingkar utara) dan pemantapan jalan lingkar selatan Kota Batu.

Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan kebijakan mekanisme pendanaan jalan melalui penyusunan konsep kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis.

Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi, proses penyiapan pranaanya dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pengembangan infrastruktur strategis Kota Batu sebagai sentra pariwisata.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; dilakukan melalui: pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi dan drainase.

h. Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi antar aspek lingkungan dengan kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan antar daerah, serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya mewujudkan Kota Batu sebagai *Eco-Residence*, melalui prioritas-prioritas berikut:

- ✓ Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan.
- ✓ Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai.
- ✓ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R.
- ✓ Pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, tercapainya kawasan lindung, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan. Serta melakukan penataan lingkungan yang terintegrasi.
- ✓ Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.

### 5.2.3 Lima Tahun Ketiga (RPJMD 2016-2020)

Penekanan pada lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah,

akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang. Target pencapaian pembangunan pada tahun 2020 meliputi:

**Tabel 5.3**  
**Target pencapaian pembangunan pada tahun 2020**

INDIKATOR SASARAN	Satuan	2020
o IPM sebesar	indeks	78.19
o Indeks Pendidikan		88.55
· Angka Partisipasi Kasar (APK)		
a. SD	(%)	110.00
b. SMP	(%)	95.00
c. SMU	(%)	95.00
· Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
a. SD	(%)	100.00
b. SMP	(%)	95.00
c. SMU	(%)	80.00
o Angka Melek Huruf (AMH)	(%)	99.00
o Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12.00
o Indeks Kesehatan	indeks	
§ Indeks Harapan Hidup (IHH)	Tahun	73.0
§ Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	(%)	29.74
§ Rasio Balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita	(%)	0.04%
§ Cakupan peserta KB aktif (dari JumI PUS)	(%)	92.00%
§ Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	90.00
o Cakupan Kelurahan UCI	Kelurahan	24
o Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy miskin (Askeskin)	(%)	100
o Jumlah Penduduk	Jiwa	220,700
o Laju Pertumbuhan Penduduk	(%)	1.0
o Jumlah Tempat Ibadah	Unit	640
o Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	(%)	6.90
o Indeks Daya Beli (PPP)	indeks	75.65
o PDRB ADHB	Juta Rp.	3,876,000
o PDRB per kapita ADHB	Rupiah	8,460,000
o Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	(%)	20,00
o Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	49.50
o Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	(%)	16.50
o Prosentase penduduk miskin.	(%)	8.50
o TPAK sebesar	(%)	64.77
o Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	4.38

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Batu memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama.

Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara
  - b. Pembangunan di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Prioritas utama pembangunan bidang pendidikan adalah penyelesaian Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut, antara lain:
    - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui rehabilitasi dan penambahan ruang kelas.
    - ✓ Peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.
  - b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
  - c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui: peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.

Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
  - d. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga

sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- e. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada penyiapan kemandirian kepemudaan dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya, tanpa banyak tergantung pada pihak lain.

Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kota Batu sebagai daerah yang mampu berprestasi, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada *event* olahraga regional.

Selain itu dalam rangka meningkatkan budaya berolahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat.

- f. Pembangunan bidang keluarga berencana diprioritaskan pada pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.

Pembentukan keluarga sejahtera diawali dengan upaya untuk merevitalisasi peran dan fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan ideal bagi anak-anak. Keluarga adalah tempat dimana anak-anak memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya, sekaligus sebagai institusi pendidikan utama bagi anak-anak.

- g. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- h. Pembangunan bidang ketahanan pangan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, melalui pembangunan jaringan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dengan penyediaan pasokan pangan.
- i. Pada periode ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi.

- 3. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Bidang Aparatur diprioritaskan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan Kelurahan diarahkan pada pengembangan kapasitas Kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.

- 4. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan bidang politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*).

Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik, penataan daerah otonom di Kota Batu serta pemantapan kerjasama institusional di pemerintahan.

- b. Pembangunan bidang hukum diprioritaskan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

- c. Pembangunan Bidang Ketentraman lingkungan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

5. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan bidang industri diprioritaskan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.
- b. Pembangunan bidang perdagangan diprioritaskan pada perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar daerah.
- c. Pada bidang pertanian diprioritaskan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian di Kota Batu.

Pemantapan mutu merupakan komitmen Kota Batu sebagai bentuk respon setiap tuntutan konsumen, terutama terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya.

- d. Pengembangan sektor perikanan Kota Batu pada tahap ketiga diprioritaskan pada: penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan teknologi komunikasi, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi pemasaran perikanan.
- e. Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian, melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kota Batu dan memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional dan nasional.

- f. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (*sister city*).
- g. Pada aspek infrastruktur wilayah diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Batu yang produktif dan memiliki daya saing.

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi umum yang handal, jaringan infrastruktur transportasi, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengendalian bencana dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta meningkatnya penyediaan pemukiman yang layak bagi masyarakat.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas kemandirian infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya melalui penyelesaian persiapan pembangunan jalan lingkar.

Pengembangan infrastruktur transportasi dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal pada penataan fungsi moda transportasi Kota Batu.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui persiapan dan pembangunan jaringan drainase kota yang terintegrasi, serta pemulihan fungsi DAS di Kota Batu.

- h. Pembangunan bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan Kota Batu sebagai *eco-residence*, yang capai melalui:
  - ✓ Penataan ruang di Kota Batu yang mampu memuat jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota-kota, secara seimbang sesuai daya tampungnya,
  - ✓ Penataan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan penyediaan infrastruktur alam serta fungsi lingkungan hidup, yang diarahkan bagi ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kualitas udara dan ekosistem yang lebih baik, terwujudnya optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan.
  - ✓ Pemantapan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal.
  - ✓ Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan dengan cara:

menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, meningkatkan efektifitas upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan air bawah tanah.

#### **5.2.4 Lima Tahun Keempat (RPJMD 2021-2025)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap ke empat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pariwisata dan agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pariwisata dan agrobisnis tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Pada tahap ke empat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan lptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya masyarakat informasi; Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian (kawasan Agropolitan). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini juga, pembangunan dalam bidang kesejahteraan telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial; kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Penekanan pada lima tahun ke empat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Tabel 5.4

## Target pencapaian pembangunan pada tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	Satuan	2025
o IPM sebesar	indeks	82.64
o Indeks Pendidikan		90.54
· Angka Partisipasi Kasar (APK)		
a. SD	(%)	100.00
b. SMP	(%)	100.00
c. SMU	(%)	97.00
· Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
a. SD	(%)	100.00
b. SMP	(%)	98.00
c. SMU	(%)	85.00
o Angka Melek Huruf (AMH)	(%)	99.00
o Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	14.00
o Indeks Kesehatan	indeks	
§ Indeks Harapan Hidup (IHH)	Tahun	74.0
§ Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	(%)	25.99
§ Rasio Balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita	(%)	0.02%
§ Cakupan peserta KB aktif (dari JumI PUS)	(%)	95.00%
§ Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	95.00
o Cakupan Kelurahan UCI	Kelurahan	24
o Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy miskin (Askeskin)	(%)	100
o Jumlah Penduduk	Jiwa	231,700
o Laju Pertumbuhan Penduduk	(%)	0.98
o Jumlah Tempat Ibadah	Unit	670
o Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	(%)	7.0
o Indeks Daya Beli (PPP)	indeks	80.42
o PDRB ADHB	Juta Rp.	5,436,000
o PDRB per kapita ADHB	Rupiah	23,462,000
o Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	(%)	19.50
o Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	51.01
o Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	(%)	17.28
o Prosentase penduduk miskin.	(%)	7.25
o TPAK sebesar	(%)	66.79
o Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	3.00

Untuk itu, maka disusun prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Batu diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama.

Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain:

- ✓ Meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
  - ✓ Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.
- b. Pembangunan bidang kebudayaan di Kota Batu diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain:
- ✓ Mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Kota Batu.
2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Perhatian bidang pendidikan pada periode 2020-2025 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Untuk itu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- ✓ Peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
  - ✓ Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan paya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri unggulan daerah yang berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komptif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

- b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

- c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan; dan Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
  - d. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
  - e. Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian kepemudaan sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.  
  
Adapun pembangunan keolahragaan diprioritaskan untuk meraih prestasi olahraga Kota Batu di tingkat regional dan nasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Batu.
  - f. Pembangunan bidang keluarga berencana diprioritaskan pada pemantapan layanan reproduksi bagi pasangan usia subur, yang ditunjang dengan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan remaja.  
  
Adapun pembentukan keluarga sejahtera diprioritaskan pada pemberdayaan sumber-sumber kesejahteraan keluarga, untuk menunjang pemantapan fungsi keluarga sebagai media pendidikan yang ideal bagi pembentukan karakter anak-anak.
  - g. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - h. Pembangunan bidang ketahanan pangan diprioritaskan pada pemantapan ketersediaan pangan, yang ditunjang dengan pemberdayaan potensi sumber daya pangan lokal.
  - i. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.
3. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang Aparatur diprioritaskan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan; serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan kelurahan diprioritaskan pada pengembangan kapasitas kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayan

publik diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

4. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Kota Batu, serta penguatan kerjasama antar institusi.
  - b. Pembangunan Bidang Hukum diprioritaskan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.
  - c. Pembangunan Bidang Ketentraman Lingkungan Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pada bidang industri dan perdagangan, diprioritaskan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.
  - b. Pembangunan bidang perikanan pada tahap keempat diprioritaskan pada pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi budidaya dan pemasaran produk pengolahan ikan, pengembangan budaya konsumsi ikan dan pengembangan usaha eko-konservasi.
  - c. Pengembangan KUMKM diprioritaskan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM, untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.
  - d. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.
  - e. Pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.
  - f. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi umum yang handal,

terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan pemukiman yang layak.

- g. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Kota Batu, maka ditetapkan prioritas untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.

## Pentahapan Pembangunan Kota Batu 2005-2025

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Penekanan</b>	Pembangunan prasarana dan sarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing, serta konsolidasi potensi-potensi daerah.	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung utama keunggulan daerah, yang memiliki daya dukung untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM, yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi.	Penguatan dan pendayagunaan kapasitas prasarana dan sarana, penerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi unggulan, serta meningkatkan daya saing keunggulan daerah.	pemantapan dan keberlanjutan penguatan prasarana dan sarana, daya saing pada pembangunan SDM, serta ekspansi perekonomian berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.
	<b>Target IPM</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	<b>78,19</b>	<b>82,64</b>
<b>1</b>	<b>Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal</b>				
	<b>Pendidikan</b>	1 Penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan spritual dan sosial.	1 Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.	1 Mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.	1 Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.
		2 Pengembangan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.	2 Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.	2 memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama.	2 Meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Kebudayaan</b>	1 Identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Kota Batu.	1 Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.	1 Mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1 Mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Kota Batu.
<b>2</b>	<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>				
	<b>Pendidikan</b>	1 Percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, melalui pembagian peran ( <i>Role Sharing</i> ) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kota Batu dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.	1 peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); melalui upaya Kota Batu Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS), dengan cara menekankan penuntasan penangangan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Wajib Belajar Dua Belas Tahun.	1 penyelesaian Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya; melalui: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, dan 2) Peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.	1 Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana; melalui: peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
		2 Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional juga menjadi prioritas pada periode ini.	2 Akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.	2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.	2 Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan paya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
			3 pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi lokasi-lokasi yang mempunyai keunggulan pertanian (hortikultura) dan industri kerajinan.		3 Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.
			4 Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal.		4 pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri unggulan daerah yang berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global
	<b>Kesehatan</b>	1 Peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.	1 Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.	1 memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	1 peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Tenaga Kerja</b>	1 peningkatan kompetensi dan daya saing, pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	1 Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	1 peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui: peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan	1 peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan;
		2 Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja	2 Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja	2 Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja	2 Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industri untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	1 Mengoptimalkan peran lembaga kekepemudaan, sedangkan pembangunan bidang kekeolahragaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi keolahragaan yang berskala regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di Kota Batu.	1 peningkatan kualitas kepemudaan baik sebagai individu maupun organisasi kekepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.	1 penyiapan kemandirian kepemudaan dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya, tanpa banyak tergantung pada pihak lain.	1 Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian kepemudaan sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.
			2 Pengembangan kekeolahragaan masyarakat dan keolahragaan tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berkeolahragaan dengan baik dan terarah.	2 perwujudan Kota Batu sebagai daerah yang mampu berprestasi, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event keolahragaan regional.	2 Adapun pembangunan keolahragaan diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan keolahragaan Kota Batu di tingkat regional dan nasional, serta mewujudkan keolahragaan sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Batu.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
			3 Keolahragaan prestasi diprioritaskan pada persiapan pembangunan Gelanggang Keolahragaan Kota Batu, yang akan dikembangkan sebagai pusat sarana dan prasarana keolahragaan yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas keolahragaan yang berskala regional maupun nasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi keolahragaan di Kota Batu	3 Dalam rangka meningkatkan budaya keolahragaan masyarakat dan keolahragaan tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat	
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	1 penyelenggaraan layanan yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahaman semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.	1 peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.	1 peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.	1 peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
				2 Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
	<b>Keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>	1 peningkatan layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau, untuk mengendalikan angka kelahiran bayi	1 pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja	1 pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera	1 Pemantapan layanan reproduksi bagi pasangan usia subur, yang ditunjang dengan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan remaja.
	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil dan Transmigrasi</b>	1 perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi; penataan sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kota Batu.	1 peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, melalui: penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah.	1 Peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi.	1 Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial</b>	1 peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	1 peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	1 peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
	<b>Ketahanan Pangan</b>	1 Tercukupinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu dan harga yang terjangkau.	1 Kemantapan ketersediaan bahan pangan yang murah dan merata. Serta didukung upaya rintisan bagi pengembangan bahan pangan alternative berbasis potensi sumber daya pertanian lokal.	1 Upaya-upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, melalui pembangunan jaringan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dengan penyediaan pasokan pangan.	1 Pemantapan ketersediaan pangan, yang ditunjang dengan pemberdayaan potensi sumber daya pangan lokal.
<b>3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>					
	<b>Perencanaan Pembangunan dan Statistik</b>	1 Adanya keterpaduan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	1 Peningkatan validitas (keabsahan) dan reliabilitas (kehandalan) hasil kajian/penelitian dalam menunjang terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel khususnya dalam pengembangan potensi lokal.	1 Peningkatan kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dalam kerangka penganggaran jangka menengah yang didukung oleh basis data yang lengkap, akurat, dan <i>realtime</i> .	1 Keterhandalan proses perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dicapai sebelumnya serta dilakukan <i>review</i> dan penyesuaian mutakhir.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	1 Pembangunan komunikasi dan informatika yang diprioritaskan pada keterjangkauan jaringan telekomunikasi dan informatika ke seluruh wilayah.	1 Kehandalan jaringan telekomunikasi dan informatika menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang sadar informasi.	1 Penguasaan teknologi informatika (IT) untuk membentuk masyarakat di seluruh wilayah yang berbasis ilmu pengetahuan ( <i>knowledge-based society</i> ).	1 Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informatika (IT) masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan ( <i>knowledge-based society</i> ) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat madani.
	<b>Pemerintahan Umum, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Kependudukan, dan Catatan Sipil</b>	1 Pembangunan bidang aparatur diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai, penguatan unit-unit pelayanan publik termasuk perpustakaan, kearsipan, statistik, pertanahan, dan pencatatan sipil, dll., pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan mulai dari aspek perencanaannya.	1 Pembangunan bidang aparatur dan pemerintahan umum diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan prinsip transparansi; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan/desa; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.	1 Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan dan perbaikan iklim investasi.	1 Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan; serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diprioritaskan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel untuk menjamin <i>rule of law</i> serta kondusifnya iklim investasi.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
4	<b>Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat</b>				
	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	1 Pembangunan bidang politik diprioritaskan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif.	Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani ( <i>civil society</i> ), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif.	1 perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani ( <i>civil society</i> ).	1 membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Kota Batu, serta penguatan kerjasama antar institusi.
		2 Dalam bidang hukum diprioritaskan pada upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.		2 penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).	2 pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
		3 Pembangunan bidang keamanan lingkungan diprioritaskan pada upaya mewujudkan rasa tenteram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial dan bencana, menurunnya angka pelanggaran peraturan	3 Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.	3 meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.	3 mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
<b>5 Mewujudkan Pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan</b>					
	<b>Pariwisata</b>	1 Pengembangan dan revitalisi obyek wisata Kota Batu.	1 Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	1 Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	1 Keberlanjutan penguatan dan pemantapan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
		2 Promosi pariwisata daerah.	2 Promosi pariwisata daerah dan pencitraan Batu Kota Wisata.	2 Promosi pariwisata daerah dan pemantapan <i>city branding</i> Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional.	2 Mantapnya jaringan dan komunikasi pariwisata daerah dan <i>city branding</i> Batu Kota Wisata khususnya agrowisata terpadu.
		3 Pengembangan paket wisata	3 Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten	3 pariwisata yang kompeten dan profesional	
	<b>Pertanian dan Kehutanan</b>	1 Pengembangan pertanian dan peternakan melalui penguatan sumber daya manusia, penguatan usaha dan penguatan kondisi lingkungan.	1 Peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian.	1 pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir.	

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
		2 Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan.	2 Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.	2 Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.	1 Keberlanjutan pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal, regional dan internasional dan ketahanan pangan.
			3 Peningkatan sarana prasarana pertanian & perdesasan.	3 Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.	2 Penguatan dan pelestarian sarana pertanian dan perdesaan.
			4 Pembangunan Pasar Induk Agribisnis.		
			5 Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan	4 Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.	3 Keberlanjutan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
			6 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan hutan secara berkelanjutan.	5 Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	4 Keberlanjutan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.
				6 Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.	
		3 Peningkatan sistem informasi produksi dan informasi pasar.	7 Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar.	7 Penguasaan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan.	5 Keberlanjutan penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai kelompok tani/petani.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
		4 Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis.	8 Penelitian, Pengembangan, Penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis.	8 Penguasaan, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i> , teknologi pasca panen, teknologi produk.	6 Keberlanjutan penguasaan, pemanfaatan, penelitian dan pengembangan teknologi meliputi: aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i> , teknologi pasca panen, teknologi produk.
		5 Revitalisasi lembaga penyuluhan	9 Peningkatan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya.	9 Peningkatan dan pemantapan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya.	7 Kemandirian petani, dan lembaga pendukungnya.
		6 Peningkatan kualitas SDM penyuluh.	10 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM penyuluh.	10 Pemantapan sarana dan prasarana penyuluh serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.	8 Keberlanjutan pemantapan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.
	<b>Perikanan</b>	1 Pembangunan perikanan diarahkan pada pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/pengrajin ikan tradisional serta pelestarian lingkungan untuk mendukung kegiatan perikanan dan budidaya.	1 pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha perikanan budidaya, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.	1 penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi pemasaran.	1 Pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi pemasaran, pengembangan budaya, dan pengembangan usaha eko-konservasi.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Perdagangan</b>	1 Peningkatan sistem perdagangan melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok.	1 mengoptimalkan pasar daerah, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Kota Batu.	1 perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar daerah.	
	<b>Perindustrian</b>	1 Pembangunan industri di Kota Batu diprioritaskan pada revitalisasi peran industri kecil-menengah dalam perekonomian daerah, penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil-menengah sebagai pendukung industri besar.	1 Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring ( <i>networking</i> ), melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.	1 penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.	1 pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.
	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	1 Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya	1 optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.	1 peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.	1 pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM, untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
			2 Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional		
	<b>Penanaman Modal</b>	1 Penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Kota Batu. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Kota Batu sebagai daerah tujuan investasi yang prospektif	1 mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal	1 peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain ( <i>sister city</i> ).	1 Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang</b>	1 peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi: jalan tembus/lingkar dan arteri, angkutan umum, pelabuhan, jaringan air baku, jaringan air bersih dan sanitasi serta permukiman.	1 pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.	1 percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Batu yang produktif dan memiliki daya saing.	1 pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Ditandai dengan mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi umum yang handal, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan pemukiman yang layak.
		2 Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pencapaian kawasan lindung yang proporsional dengan kawasan budidaya.	2 Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; dilakukan melalui: pengendalian bencana erosi dan tanah longsor dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi dan drainase.		
	<b>Perhubungan</b>	1 Penanganan seluruh jaringan jalan, terutama yang kondisinya kritis, rusak akibat bencana.	1 Mempertahankan kemantapan jaringan jalan dan jembatan.	1 Mempertahankan kemantapan jaringan jalan.	1 Mempertahankan kemantapan jaringan jalan.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
		2 Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.	2 Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.	2 Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.	2 Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
			3 Pemeliharaan, peningkatan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.	3 Pemeliharaan, peningkatan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antara dan intermoda.	3 Pemeliharaan, peningkatan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.
	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral/Alam</b>	1 Pemenuhan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif (bersih) yang terbarukan.	1 Pembangunan pengembangan dan pendistribusian energi alternatif yang ramah lingkungan.	1 Peningkatan pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.	1 Optimalisasi pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.
			2 Pencegahan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan perusakan bagi SDA terbarukan.	2 Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung serta pengelolaan SDA terbarukan.	
		2 Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA terbarukan.			2 Pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari.
			3 Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan.	3 Pemanfaatan SDA terbarukan secara Optimal dan lestari.	
			4 Rehabilitasi & pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan.		
		3 Identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan Perusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah & lahan, udara, hutan).	5 Pengelolaan SDA terbarukan.		3 Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui Pemberdayaan masyarakat.

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
	<b>Lingkungan Hidup</b>	1 pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah, berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya upaya mitigasi bencana.	1 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan.	1 Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan dengan cara: menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, meningkatkan efektifitas upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan air bawah tanah.	1 Memantapkan daya dukung lingkungan Kota Batu, maka ditetapkan prioritas untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.
			2 Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.	2 Pemantapan peran aktif dan kemitraan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan, serta berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal	
			3 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R.		
			4 Pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam berupa hutan, air permukaan, maupun air tanah.		

No.	Penekanan / Misi / Urusan	Penekanan dan Prioritas Setiap Tahapan Pembangunan			
		RPJMD 2005-2010	RPJMD 2011-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2025
			5 Meningkatkan penegakan hukum lingkungan.		
			6 Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.		

## **BAB VI**

### **KAJIDAH PELAKSANAAN**

Selanjutnya RPJPD ini bertindak sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program unit kerja, di mana program ini menjadi bentuk nyata implementasi dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat luwes, disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, dengan mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh lembaga pemerintahan daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berkewajiban untuk memberdayakan keseluruhan potensi dan kekuatan pemerintahan dalam menjalankan dan mengendalikan pembangunan daerah;
3. Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keseluruhan lembaga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang menjadi tumpuan masing-masing lembaga dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
5. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis masing-masing Lembaga Pemerintahan; dan
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen dan peran serta aktif melalui profesionalisme aparatur pemerintahan, umpan-balik pembangunan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempermudah penggunaan indikator dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara komprehensif, maka harus ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan arah kebijakan. Oleh karena itu perlu disusun matriks arah kebijakan dan program/kegiatan, yang tercantum dalam lampiran pendukung berikut.

RPJPD ini pada akhirnya merupakan sebuah produk perencanaan yang tidak sepenuhnya sempurna dan memiliki keterbatasan, meski masih diyakini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program dan arah-arah kegiatan

pembangunan daerah. Sehingga aspirasi dan umpan-balik penyempurnaan dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan pada hasil-hasil pembangunan yang tercita-citakan sangat diharapkan. Besar harapan atas apa yang ditulis dalam dokumen ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Daerah Kota Batu beserta lembaga Pemerintahan bagi penyelenggaran pembangunan.

## BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kota Batu selama dua puluh tahun yang akan datang dengan memperhitungkan peluang dan tuntutan masyarakat serta proyeksi potensi daerah yang dalam waktu dekat segera dikembangkan. RPJPD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses penyusunannya sekaligus menjadi sebuah tumpuan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh elemen yang terlibat, termasuk pemerintahan, pelaku usaha dan ekonomi, serta masyarakat Kota Batu.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 mengikuti pola penyusunan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 mengenai Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 sesuai dengan fungsinya adalah sebagai dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada setiap sektor atau bidang pembangunan daerah yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batu.

RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan Arah Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kota.
3. Acuan bagi penentu kebijakan dalam menetapkan arah program dan kegiatan pembangunan.

Program transisi dirumuskan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025. Program transisi merupakan sebuah rancangan program indikatif selama satu tahun setelah periode RPJPD berakhir, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka Panjang pada masa akhir jabatan Walikota Batu.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah Kota Batu memiliki keterbatasan baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya 1 tahun. Dengan demikian ada beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang (*multiyears*) seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kunci. Program-program itu memiliki kebutuhan dana yang cukup besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap. Selain itu, pendekatan pembangunan yang berubah dari *top-down* ke pendekatan partisipatif, membawa dampak proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Oleh karena itu, program-program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan *multiplier efek* yang ditimbulkan. Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pada akhir masa jabatan Walikota, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 masih berlaku dan menjadi pegangan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh pelaku

pembangunan di Kota Batu. Dokumen perencanaan akan tidak berlaku manakala sudah disusun dokumen perencanaan yang baru, yang akan menggantikan dokumen sebelumnya, atau terdapat kondisi lain yang memaksa untuk membatalkan keabsahan dokumen perencanaan.